

Jepang-India Perdalam Aliansi, Kemitraan Ekonomi Kian Diperluas

Jumat, 3 Juli 2026 16:00 WIB

Atul Dev dan Sakura Murakami

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113914/jepang-india-perdalam-aliansi-kemitraan-ekonomi-kian-diperluas/2>

Bloomberg, Berdiri di depan dekorasi bunga lili segar dan patung merak perak, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memamerkan kedekatan dinamika baru yang mereka sepakati: hubungan antara "adik perempuan" dan "kakak laki-laki".

"Saya baru saja disebut sebagai 'seorang adik perempuan yang cantik'," ujar Takaichi sambil tersenyum dalam pidato singkatnya setelah pertemuan bilateral tersebut. "Dalam pembicaraan kami sebelumnya, kami berjanji untuk bekerja sama layaknya kakak dan adik."

Kunjungan resmi pertama Takaichi ke India ini memang tidak menelurkan komitmen investasi senilai 10 triliun yen seperti tahun lalu. Kendati demikian, kunjungan kali ini menandai pendalaman hubungan yang signifikan. Kehangatan interaksi kedua pemimpin diikuti dengan penandatanganan berbagai kesepakatan, mulai dari latihan militer angkatan laut bersama hingga proyek produksi film Bollywood di Hokkaido, pulau paling utara Jepang.

"Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi lonjakan minat yang masif dari perusahaan-perusahaan Jepang terhadap India," ungkap Kenji Hiramatsu, ketua di The Japan Research Institute sekaligus mantan Duta Besar Jepang untuk India. "Ketertarikan ini tidak hanya datang dari korporasi raksasa, tetapi juga dari usaha kecil-menengah (UKM) serta perusahaan rintisan (start-up). Ada perluasan relasi yang sangat nyata."

Kedua pemimpin negara tersebut menerbitkan empat pernyataan bersama yang mencakup berbagai sektor, mulai dari keamanan maritim, kecerdasan buatan (AI), hingga ketahanan energi. Mereka juga mengonfirmasi penandatanganan lebih dari 100 perjanjian kerja sama antara pelaku bisnis Jepang dan India, termasuk komitmen kolaborasi di sektor semikonduktor, amonia, energi hijau, hingga proyek misi bersama ke bulan. Terdapat pula kesepakatan mengenai budidaya jamur shiitake dan buah stroberi di India.

"Jika berkaca pada sejarahnya, sebagian besar bisnis kedua negara bergerak di industri otomotif. Namun, sekarang sektornya jauh lebih beragam," tambah Hiramatsu. "Agar Jepang dan India bisa memperdalam hubungan di lini ekonomi, saya rasa penting bagi bisnis skala kecil dan menengah yang membangun rantai pasok, serta perusahaan pemilik teknologi baru, untuk masuk ke India. Dan tampaknya tren tersebut mulai berjalan saat ini."

Langkah ekspansi ini didorong oleh komitmen yang dibuat pada tahun 2025 lalu, di mana pemerintah Jepang berjanji akan mendorong perusahaan-perusahaan domestiknya untuk menggelontorkan investasi sekitar 10 triliun yen dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pertemuan tersebut Modi dan Takaichi mengonfirmasi bahwa korporasi Jepang saat ini telah bersiap menginvestasikan dana sekitar 2 triliun yen di India.

Dalam kunjungan ini, Takaichi turut didampingi oleh lebih dari 50 perwakilan bisnis papan atas Jepang, termasuk pemimpin dari Suzuki Motor Corp, raksasa otomotif yang selama ini meraup keuntungan melimpah dari India sebagai pasar terbesar mereka.

Dari pihak tuan rumah, konglomerat milik miliarder India, Gautam Adani, dikabarkan tengah mengincar pinjaman dalam denominasi mata uang yen senilai US\$1,5 miliar sebagai bagian dari upaya

nyata mereka melakukan dedolarisasi. Adani Group bahkan menyambut kedatangan Takaichi dengan memasang iklan satu halaman penuh di sejumlah surat kabar nasional, yang salinannya tersebar di lobi-lobi hotel bintang lima tempat delegasi Jepang menginap.

Kehadiran hubungan diplomatik yang erat ini juga memberikan keuntungan kompetitif bagi bank-bank raksasa Jepang—mulai dari Sumitomo Mitsui Financial Group hingga Mitsubishi UFJ Financial Group—yang saat ini tengah melakukan ekspansi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pasar finansial India.

Pertemuan bilateral ini digelar di saat kedua negara sama-sama tengah berupaya mendiversifikasi kemitraan dagang mereka demi mengurangi ketergantungan pada China dan AS, sekaligus di tengah upaya bersama menavigasi dampak ekonomi setelah perang Iran.

Takaichi menyampaikan pentingnya memetakan solusi bersama guna menangkal potensi guncangan geopolitik di masa depan, termasuk di antaranya dengan mengamankan pasokan energi dan teknologi serta membentengi perekonomian domestik dari guncangan eksternal.

"Jepang dan India harus memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menjadi lebih kuat dan makmur bersama di tengah gejolak internasional saat ini," tegas Takaichi.

Kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh New Delhi. Pasokan minyak mentah India sempat terganggu akibat aksi blokade di Selat Hormuz beberapa waktu lalu, yang memberikan tekanan bagi momentum pertumbuhan ekonomi mereka.

Faktor China juga menjadi perhatian bersama bagi kedua negara, meskipun Tokyo dan New Delhi mengambil pendekatan yang berbeda dalam menghadapinya.

"Kedua negara, baik Jepang maupun India, sama-sama menginginkan stabilitas dan kemakmuran. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan keamanan yang kondusif bagi pertumbuhan," jelas Deepa Gopalan Wadhwa, mantan Duta Besar India untuk Jepang, kepada Haslinda Amin dari Bloomberg News pada hari Jumat. "Kami memang berupaya memastikan bahwa seluruh negara di kawasan ini mematuhi aturan tertentu, dan itu juga mencakup China."

Hingga saat ini, India sebenarnya masih sangat bergantung pada China untuk pasokan mesin dan bahan baku industri—terutama komoditas logam tanah jarang (rare earths)—yang sangat krusial bagi ambisi manufaktur domestik mereka. Karenanya, India secara perlahan mencoba memperbaiki hubungan dengan Beijing. Sebaliknya, hubungan bilateral Jepang-China justru berada dalam fase yang sangat dingin bagi Takaichi, terutama setelah ia menyulut kemarahan Beijing pada bulan November lalu ketika berspekulasi mengenai potensi keterlibatan militer Jepang untuk membela diri jika China nekat menyerang Taiwan.

"Perluasan kerja sama keamanan maritim menjadi hal yang sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas regional," pungkas Takaichi, seraya menambahkan bahwa Jepang dan India akan terus menggelar latihan angkatan laut bersama di Samudra Hindia. Hubungan antara India dan Jepang, lanjutnya, "kini telah menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya."

Sektor Manufaktur Meroket, Ekonomi Vietnam Q2-2026 Tumbuh 8,39%

Jumat, 3 Juli 2026 12:15 WIB

Nguyen Dieu Tu Uyen

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113855/sektor-manufaktur-meroket-ekonomi-vietnam-q2-2026-tumbuh-8-39/2>

Bloomberg, Laju pertumbuhan ekonomi Vietnam berhasil melampaui estimasi pasar pada kuartal kedua tahun ini. Di saat yang sama, kinerja perdagangan domestik tumbuh lebih cepat dari perkiraan sepanjang bulan Juni, sementara tingkat inflasi mulai bergerak melambat.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kantor Statistik Nasional di Hanoi pada hari Jumat (3/7), Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam melonjak 8,39% pada periode April-Juni jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini bergerak lebih cepat ketimbang nilai tengah estimasi para analis dalam survei Bloomberg yang mematok angka 7%. Realisasi tersebut juga berhasil mengalahkan pertumbuhan kuartal pertama, yang angkanya direvisi naik menjadi 7,94% dari sebelumnya 7,83%.

Ekspor Vietnam pada bulan Juni melonjak 28,1%, melampaui perkiraan awal sebesar 20%. Sementara itu, angka impor melesat tajam hingga 45,2%, jauh di atas estimasi pasar yang berada di kisaran 35%.

"Sektor manufaktur menjadi kekuatan pendorong utama bagi perekonomian secara keseluruhan," jelas pihak kantor statistik melalui laman resmi mereka. Lembaga tersebut menyebut pemulihan pesanan ekspor serta dampak positif dari investasi publik sebagai faktor utama yang mendukung pertumbuhan.

Data yang berada di atas ekspektasi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif dagang serta guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah gagal membendung ambisi Vietnam untuk mengejar target pertumbuhan dua digit pada tahun 2026. Sinyal positif lainnya terlihat dari total nilai investasi asing langsung (FDI) yang terdaftar di Vietnam hingga akhir Juni, yang sukses menyentuh angka US\$34,65 miliar atau melesat 61% dibandingkan setahun lalu.

Bank Sentral Vietnam pada hari Kamis menyatakan akan terus memperluas akses penyaluran kredit dengan memprioritaskan sektor-sektor industri yang berorientasi pada pertumbuhan, sembari tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

Vietnam sejauh ini tetap menjadi negara eksportir kunci untuk berbagai komoditas, mulai dari alas kaki hingga komponen mesin. Kendati kebijakan tarif dagang tahun 2025 serta guncangan energi tahun ini sempat menguji ketahanan model ekonomi mereka, data hari Jumat ini mengindikasikan bahwa kerja keras pemerintah untuk memacu pertumbuhan mulai membuahkan hasil.

Meski demikian, otoritas terkait pada pekan lalu sempat menyatakan bahwa Vietnam masih "menghadapi banyak tantangan" untuk bisa mengamankan target pertumbuhan tahun 2026 yang dipatok minimal 10% tahun ini. Perdana Menteri Le Minh Hung dilaporkan telah menginstruksikan seluruh kementerian dan bank sentral untuk menjalankan perluasan kebijakan fiskal dan moneter secara terarah serta terfokus demi menopang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Vietnam kini membidik pertumbuhan sebesar 11,9% pada paruh kedua tahun 2026 demi merealisasikan target keseluruhan tahun sebesar 10%. Adapun di sepanjang semester pertama tahun ini (Januari-Juni), perekonomian Vietnam tercatat sudah berekspansi sebesar 8,18%.

Di sisi lain, inflasi indeks harga konsumen (IHK) Vietnam merangkak naik 4,69% secara tahunan pada bulan Juni, melandai dibandingkan posisi bulan Mei yang sempat menyentuh 5,60%. Pemerintah sendiri

menargetkan untuk membatasi inflasi di level 4,5% tahun ini, meskipun bank sentral sebelumnya sempat memproyeksikan inflasi bisa melejit hingga 5,5%.

Sebagai salah satu raksasa manufaktur baru, Vietnam sukses membukukan surplus perdagangan sebesar US\$75,3 billion dengan Amerika Serikat (AS) dalam enam bulan pertama tahun ini, mencerminkan kenaikan 21,3% dari periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu, Vietnam menempati peringkat ketiga sebagai negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi AS—hanya berada di belakang China dan Meksiko—sebuah kondisi yang kian menegaskan masifnya pergeseran rantai pasok global keluar dari China.

Daly The Fed Sebut Inflasi AS Mulai Mereda tapi Masih Ada Risiko

Jumat, 3 Juli 2026 08:30 WIB

Catarina Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113826/daly-the-fed-sebut-inflasi-as-mulai-mereda-tapi-masih-ada-risiko/2>

Bloomberg, Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) wilayah San Francisco, Mary Daly, menyatakan bahwa tingkat inflasi seharusnya mulai melambat. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada ketidakpastian besar yang membayangi prospek perekonomian ke depan.

"Kami terus mempertahankan kebijakan moneter pada posisi yang sedikit restriktif, sehingga inflasi seharusnya bisa turun," ujar Daly pada hari Kamis (2/7) dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Spanyol di Santander, Spanyol.

Daly memaparkan bahwa lonjakan inflasi sebelumnya dipicu oleh pemberlakuan tarif dagang serta meroketnya harga minyak mentah pada musim semi tahun ini, tepatnya setelah AS meluncurkan serangan militer ke Iran. Ia mengapresiasi mulai meredanya lonjakan harga minyak setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran, yang menurutnya memberikan "harapan akan adanya pelonggaran beban ekonomi." Namun, ia mewanti-wanti bahwa arah perkembangan ekonomi ke depan masih sulit diprediksi. Daly pun menjabarkan berbagai skenario yang mungkin membutuhkan respons berbeda dari The Fed, seraya menegaskan bahwa bank sentral AS tersebut kemungkinan perlu bertindak lebih agresif jika inflasi terus membandel.

Para pejabat The Fed sendiri memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan mereka bulan lalu. Meski demikian, mereka merilis proyeksi yang menunjukkan kekhawatiran yang kian meningkat, di mana bank sentral mungkin harus kembali menaikkan suku bunga demi meredakan tekanan kenaikan harga. Sembilan dari 18 pembuat kebijakan memprediksi bahwa setidaknya diperlukan satu kali kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini.

Indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed tercatat melonjak 4,1% secara tahunan hingga bulan Mei lalu, menandai kenaikan tertinggi sejak April 2023. Laju kenaikan harga-harga barang ini telah bergerak lebih cepat melampaui target ideal The Fed yang dipatok di level 2% selama lebih dari lima tahun terakhir.

Di sisi lain, data yang dirilis pada hari Kamis kemarin menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di AS melambat secara signifikan sepanjang bulan Juni. Lesunya pasar kerja ini dimotori oleh penurunan tajam pada angka penggajian di sektor pariwisata dan perhotelan, yang mencatatkan penurunan terbesarnya sejak tahun 2020.

Daly juga menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk mempertimbangkan berbagai metode baru dalam menilai kondisi perekonomian. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas The Fed dengan tidak mengubah target utama dari mandat mereka, yaitu menciptakan lapangan kerja maksimum dan menjaga stabilitas harga.

"Tidak, kami tidak akan memindahkan targetnya, tetapi kami pasti akan terus mempelajari, memodernisasi, dan bekerja lebih baik besok daripada apa yang kami lakukan hari ini," tegas Daly.

Langkah modernisasi ini sejalan dengan kebijakan Kevin Warsh, yang baru saja mengambil alih jabatan sebagai Gubernur The Fed pada bulan Mei lalu. Warsh diketahui telah membentuk sejumlah tim tugas khusus untuk mempelajari berbagai aspek operasional dan proses pengambilan kebijakan di internal The Fed, termasuk meninjau kembali basis data ekonomi yang selama ini digunakan.

Penyerapan Tenaga Kerja AS Melambat Tajam, Pasar Kerja Lesu

Jumat, 3 Juli 2026 06:30 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113815/penyerapan-tenaga-kerja-as-melambat-tajam-pasar-kerja-lesu/2>

Bloomberg, Laju penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) melambat tajam pada bulan Juni meskipun angka pengangguran terpantau menurun. Kondisi ini menahan sebagian momentum pertumbuhan lapangan kerja yang sempat tumbuh meyakinkan di awal tahun ini.

Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang dirilis pada hari Kamis (2/7) menunjukkan bahwa nonfarm payrolls hanya bertambah 57.000 pada bulan lalu. Ditambah lagi, adanya revisi penurunan angka untuk dua bulan sebelumnya kian mengurangi kuatnya laporan ketenagakerjaan yang sempat melonjak pada periode lalu. Di sisi lain, tingkat pengangguran turun ke posisi 4,2% yang dipicu oleh merosotnya angka partisipasi angkatan kerja.

Realisasi angka payroll tersebut meleset dari hampir seluruh estimasi dalam survei Bloomberg, kecuali satu prediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja AS masih menghadapi tantangan berat terlepas dari adanya tanda-tanda penguatan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pengeluaran konsumen sempat tangguh menghadapi guncangan energi akibat perang Iran, masyarakat AS terpantau masih pesimistis terhadap tingginya harga-harga barang. Faktor inilah yang dinilai membuat para pemberi kerja cenderung berhati-hati dalam menambah karyawan.

Penurunan ini terutama dipicu oleh merosotnya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan perhotelan ke level terendah sejak 2020. Menurut pihak BLS, kondisi ini "mencerminkan lemahnya perekrutan musiman dari biasanya," setelah sempat mencatatkan kenaikan kuat pada bulan Mei. Padahal sebelum laporan ini dirilis, sejumlah ekonom memproyeksikan gelaran Piala Dunia FIFA yang dimulai bulan lalu bakal mendongkrak jumlah pekerja di sektor tersebut.

Merespons data ini, indeks saham S&P 500 dibuka menguat di zona hijau, sementara imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS terpantau turun. Para investor juga mulai menurunkan ekspektasi mereka terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed), meski mereka tetap memproyeksikan setidaknya akan ada satu kali kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini.

"Laporan ketenagakerjaan bulan Juni ini jelas mengecewakan, meskipun laporan ini seharusnya tidak mengubah pandangan menyeluruh siapa pun terhadap prospek makroekonomi," ujar Neil Dutta, kepala ekonomi di Renaissance Macro Research, dalam catatannya. "Kisah utama di sini adalah tentang pasar

tenaga kerja yang merefleksikan kondisi ekonomi secara lebih luas. Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak merata, dan akibatnya, pasar tenaga kerja pun menjadi tidak merata."

Laporan ketenagakerjaan ini sendiri terdiri dari dua survei terpisah, yakni survei rumah tangga dan survei pemberi kerja. Survei rumah tangga—yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran dan partisipasi kerja—menunjukkan hasil yang lebih lesu, meskipun indikator ini memang terkenal cenderung lebih volatil.

Menurut laporan hari Kamis tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja—yaitu persentase populasi yang bekerja atau sedang aktif mencari kerja—merosot ke angka 61,5%, yang merupakan level terendah dalam lebih dari lima tahun terakhir. Pihak BLS menyatakan bahwa jika disesuaikan dengan adaptasi jumlah populasi, angka ini sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan posisi tahun lalu.

Sementara itu, tingkat partisipasi untuk pekerja usia produktif (usia 25 hingga 54 tahun) turun ke posisi 83,3%, menyamai level terendah sejak tahun 2023. Beberapa ekonom menilai penurunan tajam pada kedua indikator tersebut kemungkinan besar hanya merupakan anomali statistik semata.

Rincian Sektor

Sektor layanan kesehatan dan bantuan sosial, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pendorong utama pertumbuhan lapangan kerja, kembali memimpin perekrutan dan menyumbang sebagian besar kenaikan jumlah pekerja pada Juni.

Jumlah pekerja di sektor manufaktur dan konstruksi juga meningkat. Banyak ekonom menilai pembangunan pusat data menjadi salah satu faktor yang mendorong permintaan tenaga kerja konstruksi sepanjang 2026, meskipun pembangunan perumahan masih tertahan akibat tingginya suku bunga.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Meta Platforms Inc dan Microsoft Corp terus mengurangi jumlah karyawan, antara lain untuk mengimbangi besarnya investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Jumlah pekerja di sektor informasi kembali menurun, menjadi penurunan ke-17 dalam 18 bulan terakhir.

Jumlah pekerja di sektor jasa keuangan, yang juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja kantor dan dianggap paling rentan terhadap otomatisasi, relatif tidak berubah.

Rata-rata upah per jam naik 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Para ekonom mencermati bagaimana dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja memengaruhi pertumbuhan upah, terutama ketika inflasi mulai melampaui kenaikan upah di berbagai sektor.

Sentimen konsumen mulai membaik setelah perundingan damai antara AS dan Iran kembali berlangsung serta harga minyak turun tajam. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong perusahaan meningkatkan perekrutan dalam beberapa bulan mendatang.

Data terpisah yang juga dirilis Kamis menunjukkan jumlah pengajuan tunjangan pengangguran pekan lalu relatif tidak berubah. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap rendah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memunculkan kondisi yang oleh para ekonom disebut sebagai pasar tenaga kerja dengan "PHK rendah, perekrutan juga rendah" (low-fire, low-hire).

Dari sudut pandang Federal Reserve, "pasar tenaga kerja stabil dan tidak ada tekanan inflasi yang berasal dari pasar kerja," kata Kepala Ekonom Navy Federal Credit Union, Heather Long. "Namun bagi sebagian besar masyarakat Amerika, ini adalah kabar yang mengecewakan. Peluang kerja masih terbatas, sementara inflasi menghapus seluruh kenaikan upah yang mereka peroleh."

Menteri keuangan Jepang Siap Mengatasi Volatilitas Yen, Hubungi Otoritas AS

Jumat, 3 Juli 2026 09:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/menteri-keuangan-jepang-siap-mengatasi-volatilitas-yen-hubungi-otoritas-as>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan bahwa pemerintah akan menanggapi pergerakan mata uang dengan tepat, mengulangi peringatannya saat para pedagang bersiap untuk kemungkinan intervensi dari otoritas Jepang.

"Sikap kami tidak berubah. Kami akan menanggapi dengan tepat kapan pun diperlukan," kata Katayama pada konferensi pers rutin ketika ditanya tentang pelemahan yen yang terus-menerus seperti dilansir Reuters, Jumat (3/7/2026).

Katayama juga menekankan bahwa pemerintah telah menjalin kontak erat dengan otoritas AS mengenai masalah valuta asing, "bahkan ketika AS sedang libur."

Yen tiba-tiba melonjak terhadap dolar pada hari Kamis, dengan para pedagang waspada terhadap prospek intervensi dan cemas tentang kemungkinan pendekatan baru terhadap pembelian mata uang resmi.

Para pedagang mengira pergerakan tersebut mungkin terlalu kecil untuk menunjukkan intervensi, tetapi yen segera mendapat dorongan lebih lanjut karena angka pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan membuat dolar melemah.

Yen diperdagangkan pada 161,2 per dolar pada hari Jumat, dibandingkan dengan titik terendah 40 tahun sebesar 162,84 yang dicapai awal pekan ini.

Mengenai lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB), Katayama menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan di pasar obligasi dan keberlanjutan keuangan publik.

Imbal hasil JGB acuan melonjak ke level tertinggi hampir 30 tahun pada hari Jumat karena investor khawatir tentang kesehatan fiskal ekonomi Jepang.

PMI Jasa China Turun ke 54,1 pada Juni, Ekspansi Ditopang Permintaan Luar Negeri

Jumat, 3 Juli 2026 09:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pmi-jasa-china-turun-ke-541-pada-juni-ekspansi-ditopang-permintaan-luar-negeri>

KONTAN.CO.ID - Aktivitas sektor jasa China masih mencatat ekspansi pada Juni 2026, meski lajunya sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Perlambatan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan bisnis baru yang mulai melemah, meskipun permintaan dari pasar luar negeri meningkat ke level tertinggi dalam 20 bulan terakhir.

Mengutip Reuters Jumat (3/7/2026), hasil survei swasta RatingDog China General Services Purchasing Managers' Index (PMI) yang disusun S&P Global menunjukkan, indeks PMI jasa China berada di level 54,1 pada Juni, turun tipis dari 54,4 pada Mei.

Meski melambat, angka tersebut masih berada di atas ambang 50, yang menandakan sektor jasa tetap berada dalam fase ekspansi.

Hasil survei ini berbeda dengan survei resmi pemerintah China yang dirilis pekan ini, yang menunjukkan aktivitas sektor jasa justru meningkat tipis. Perbedaan tersebut disebabkan cakupan responden yang digunakan kedua survei tidak sama.

Survei S&P Global menunjukkan pertumbuhan bisnis baru melambat dibandingkan Mei. Namun, peningkatan permintaan dari luar negeri membantu menopang aktivitas sektor jasa secara keseluruhan.

Indeks pesanan ekspor baru bahkan mencatat kenaikan tercepat sejak Oktober 2024, mencerminkan membaiknya permintaan internasional terhadap layanan dari China.

Di sisi harga, perusahaan jasa mulai menaikkan harga jual untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir.

Kenaikan harga tersebut juga menjadi yang tercepat dalam lebih dari dua tahun, meskipun tekanan biaya input mulai mereda.

Seiring membaiknya permintaan, perusahaan-perusahaan jasa juga mempercepat perekrutan tenaga kerja pada Juni.

Sementara itu, optimisme pelaku usaha terhadap prospek bisnis dalam 12 bulan ke depan masih berada di zona positif. Namun, tingkat kepercayaan tersebut sedikit melemah dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun Composite Output Index, yang menggabungkan aktivitas sektor manufaktur dan jasa, turun menjadi 53,6 pada Juni dari 54,0 pada Mei, menandakan pertumbuhan ekonomi sektor swasta China masih berlanjut meski momentumnya sedikit melambat.

Aktivitas Sektor Jasa Jepang Kembali Ekspansif pada Juni, Tekanan Biaya Meningkat

Jumat, 3 Juli 2026 07:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/aktivitas-sektor-jasa-jepang-kembali-ekspansif-pada-juni-tekanan-biaya-meningkat>

KONTAN.CO.ID - Aktivitas sektor jasa Jepang kembali berekspansi pada Juni 2026 setelah sempat stagnan pada bulan sebelumnya.

Meski demikian, optimisme pelaku usaha masih tertahan di tengah meningkatnya tekanan biaya dan kekhawatiran terhadap ketegangan di Timur Tengah.

Survei swasta yang dirilis S&P Global pada Jumat (3/7/2026) menunjukkan, Indeks Pembelian Manajer (Purchasing Managers' Index/PMI) sektor jasa Jepang naik menjadi 52,2 pada Juni dari 50,0 pada Mei.

Angka di atas 50 menandakan aktivitas bisnis berada dalam fase ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Kenaikan tersebut menandai ekspansi sektor jasa selama 14 dari 15 bulan terakhir, meski laju pertumbuhannya masih tergolong moderat dan sedikit lebih lambat dibandingkan rata-rata dalam setahun terakhir.

Dari sisi permintaan, bisnis baru meningkat dengan salah satu laju tercepat dalam hampir dua tahun terakhir. Namun, pesanan ekspor baru kembali menyusut untuk tiga bulan berturut-turut.

Sejumlah perusahaan melaporkan peningkatan permintaan di sektor transportasi, didorong oleh peluncuran produk baru serta penyelenggaraan berbagai acara.

Di sisi lain, tekanan biaya semakin meningkat. Harga input naik pada laju tercepat sejak Juni 2022, dipicu oleh kenaikan harga minyak, energi, pangan, serta upah tenaga kerja.

Meski demikian, laju kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen mulai melambat dibandingkan level yang hampir menyentuh rekor tertinggi pada Mei.

Pertumbuhan lapangan kerja juga masih berlangsung, meski kecepatannya tetap moderat. Perekrutan tenaga kerja meningkat dibandingkan Mei, tetapi masih berada di bawah rata-rata selama 10 bulan terakhir.

Associate Director Economics S&P Global Market Intelligence Annabel Fiddes mengatakan, momentum pertumbuhan memang membaik, tetapi kepercayaan pelaku usaha hanya meningkat tipis.

"Walaupun momentum pertumbuhan membaik, kepercayaan dunia usaha hanya menguat sedikit pada Juni karena ketidakpastian akibat konflik dan meningkatnya biaya masih membayangi prospek bisnis," ujarnya.

Sementara itu, PMI Komposit Jepang, yang menggabungkan sektor manufaktur dan jasa, naik menjadi 52,8 pada Juni dari 51,1 pada Mei. Capaian tersebut menjadi laju ekspansi terkuat dalam tiga bulan terakhir.

Dolar AS Kehilangan Tenaga Jumat (3/7), Harapan Kenaikan Suku Bunga The Fed Memudar

Jumat, 3 Juli 2026 09:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-kehilangan-tenaga-jumat-37-harapan-kenaikan-suku-bunga-the-fed-memudar>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) menuju pelemahan mingguan terbesar dalam hampir tiga bulan pada perdagangan Jumat (3/7/2026), setelah data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan meredam ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut turut memberikan ruang bagi yen Jepang untuk menguat dari level terendahnya dalam beberapa dekade.

Mengutip Reuters, pelemahan dolar masih berlanjut pada awal perdagangan Asia. Euro bertahan di kisaran US\$ 1,1442, mendekati level tertinggi dalam dua pekan terakhir.

Sementara itu, poundsterling berada di US\$ 1,3361 dan berpotensi mencatat kenaikan mingguan sekitar 1,2%, yang akan menjadi penguatan terbaiknya dalam hampir tiga bulan.

Mata uang yang sensitif terhadap sentimen risiko juga menguat. Dolar Australia diperdagangkan di US\$ 0,6935 dan berpotensi mengakhiri tren pelemahan selama empat pekan berturut-turut. Sementara dolar Selandia Baru (kiwi) berada di US\$ 0,5702, naik sekitar 1,2% sepanjang pekan ini.

Indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama termasuk yen dan euro, turun 0,2% ke level 100,77 setelah merosot 0,5% pada perdagangan Kamis.

Secara mingguan, indeks dolar telah melemah sekitar 0,58%, menjadi penurunan terbesar sejak awal April.

Pelemahan dolar dipicu oleh data tenaga kerja AS yang menunjukkan perlambatan signifikan. Non-farm payrolls (NFP) hanya bertambah 57.000 lapangan kerja pada Juni, jauh di bawah ekspektasi ekonom yang memperkirakan penambahan 110.000 pekerjaan.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi 61,5%, level terendah dalam lebih dari lima tahun.

Data tersebut mendorong pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan September kini sekitar 52%, turun dari 64% pada sehari sebelumnya.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS juga terkoreksi. Yield obligasi tenor dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga turun sekitar 4 basis poin, mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari berturut-turut.

"Di satu sisi, data ini bernada dovish karena membantu meredakan kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja yang terlalu panas dan mengurangi kebutuhan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif," ujar analis strategi valuta asing OCBC, Sim Moh Siong.

Meski demikian, ia menilai prospek dolar AS masih tetap positif, terutama terhadap mata uang dengan imbal hasil rendah, selama ekspektasi pengetatan kebijakan moneter The Fed belum sepenuhnya hilang.

Yen Mendapat Angin Segar

Yen Jepang terakhir diperdagangkan di level 161,01 per dolar AS, setelah menguat hampir 1% pada sesi sebelumnya.

Penguatan ini mengangkat yen dari posisi terendah dalam beberapa dekade seiring melemahnya dolar AS.

Pelaku pasar juga tetap mewaspadaai potensi intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Sebelumnya, pejabat Jepang dikabarkan mengubah strategi komunikasi dengan tidak lagi memberikan sinyal terlebih dahulu sebelum melakukan intervensi, melainkan memilih pendekatan yang lebih mengejutkan guna menekan aksi spekulatif terhadap yen.

Di sisi lain, anggota panel penasihat ekonomi pemerintah Jepang Toshihiro Nagahama mengatakan, Bank of Japan (BOJ) perlu melanjutkan kenaikan suku bunga secara bertahap guna membatasi pelemahan yen yang berlebihan.

Analisis IG Tony Sycamore menilai, fokus pasar kini bergeser pada data ekonomi AS berikutnya dan perkembangan pasar obligasi pemerintah Jepang.

"Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah level 162,83 menjadi puncak jangka menengah bagi pasangan dolar-yen akan sangat bergantung pada data ekonomi AS berikutnya dan perkembangan di pasar obligasi Jepang," ujarnya.

Hari Ini, Ringgit dan Rupiah Pimpin Penguatan Mata Uang Asia terhadap Dolar AS

Jumat, 3 Juli 2026 09:31 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/hari-ini-ringgit-dan-rupiah-pimpin-penguatan-mata-uang-asia-terhadap-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Mata uang rupiah dan ringgit Malaysia menjadi dua mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (3/7/2026) pagi, di tengah pergerakan mayoritas mata uang regional yang relatif terbatas.

Mengutip Reuters, hingga pukul 02.09 GMT, rupiah menguat 0,27% ke level Rp 17.940 per dolar AS, setelah sehari sebelumnya berada di level Rp 17.988 per dolar AS.

Sementara itu, ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia, naik 0,34% terhadap dolar AS ke level 4,063 per dolar AS.

Sejumlah mata uang Asia lainnya juga mencatat penguatan tipis. Peso Filipina naik 0,08%, dolar Singapura menguat 0,05%, yuan China bertambah 0,04%, serta baht Thailand dan won Korea Selatan masing-masing menguat 0,02%.

Di sisi lain, yen Jepang melemah tipis 0,04% terhadap dolar AS ke level 161,16 per dolar AS, sedangkan dolar Taiwan turun 0,13%. Adapun rupee India relatif tidak berubah.

Meski menguat pada perdagangan hari ini, rupiah masih menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan data Reuters, sejak awal 2026 hingga Jumat (3/7), rupiah telah melemah sekitar 7,08% terhadap dolar AS.

Pelemahan tersebut hanya lebih baik dibandingkan won Korea Selatan yang terkoreksi 6,51%, sementara baht Thailand melemah 5,17%, rupee India 5,79%, dan peso Filipina 4,21%.

Sebaliknya, yuan China justru menjadi salah satu mata uang yang menguat sepanjang tahun ini dengan apresiasi sekitar 3,06% terhadap dolar AS, sedangkan ringgit Malaysia relatif stabil dengan pelemahan tipis 0,17% sejak awal tahun.

Harga Pangan Global Turun pada Juni, Tak Lagi Fokus Pada Perang

Jumat, 3 Juli 2026 20:00 WIB

Eleanor Thornber

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113932/harga-pangan-global-turun-pada-juni-tak-lagi-fokus-pada-perang/2>

Bloomberg, Harga pangan global turun tipis pada Juni setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran meredakan kekhawatiran terhadap gangguan lebih lanjut pada rantai pasok.

Indeks harga komoditas pangan yang disusun Food and Agriculture Organization (FAO) turun 0,3% pada Juni dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terutama didorong oleh harga biji-bijian (grains) dan gula, menurut laporan yang dirilis Jumat.

Kesepakatan damai sementara yang membuka masa negosiasi antara Washington dan Teheran telah memulihkan arus perdagangan melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi pengiriman biji-bijian serta berbagai input pertanian seperti pupuk dan solar. Premi risiko akibat perang Iran yang sempat mendorong kenaikan harga komoditas pertanian dan pupuk menghilang pada awal Juni, sehingga meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan berkepanjangan.

Harga Pangan Global Turun Tipis pada Juni

Namun, seiring dimulainya musim panen di Belahan Bumi Utara, perhatian pasar kini beralih pada penyusutan luas lahan tanam, penurunan hasil panen, dan cuaca buruk setelah gelombang panas yang memecahkan rekor melanda Eropa. Di sisi lain, fenomena El Niño yang mulai berkembang—pola iklim siklus yang dapat memicu banjir di satu wilayah dan kekeringan di wilayah lain—berpotensi semakin mengganggu ketahanan pangan global dengan merusak hasil panen di negara-negara produsen utama.

FAO memperkirakan produksi biji-bijian global akan mencapai hampir 3 miliar ton pada 2026. Angka tersebut sekitar 1,9% lebih rendah dibandingkan rekor tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada 2025, namun masih berpeluang menjadi produksi terbesar kedua dalam sejarah.

"Fokus pasar kini kembali pada faktor-faktor fundamental yang lebih tradisional di pasar biji-bijian dan minyak nabati," ujar Joseph Glauber, peneliti senior emeritus di International Food Policy Research Institute, melalui surat elektronik. "Secara umum, kondisi tanaman terlihat cukup baik."

Indeks FAO mengukur pergerakan harga komoditas pangan yang diperdagangkan di pasar internasional. Pada Juni, indeks tersebut masih naik 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun tetap hampir 19% lebih rendah dibandingkan rekor tertinggi yang tercapai setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Maret 2022.

Postur Pertanggungjawaban APBN 2025, Sejumlah Target Tak Tercapai

Jumat, 3 Juli 2026 12:54 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113863/postur-pertanggungjawaban-apbn-2025-sejumlah-target-tak-tercapai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 kepada parlemen dalam rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 pada Kamis (2/7/2026).

Meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi postur APBN 2025 menunjukkan sejumlah target pendapatan negara tidak tercapai, serta terdapat pembengkakan pada pos defisit.

"2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan, fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu logistik tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental," kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR.

Purbaya memaparkan realisasi pendapatan negara dan hibah hanya menyentuh Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target yang dipatok dalam APBN 2025 (Perpres No. 201/2024) sebesar Rp3.005,12 triliun.

Hal ini utamanya disumbang oleh penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari target. Purbaya beralasan, upaya optimalisasi pendapatan negara sangat menantang akibat faktor eksternal dan internal.

"Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, tetapi juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke BP Danantara," jelas Purbaya.

Meskipun demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan realisasi Rp541,53 triliun atau 105,43% dari target sebesar Rp513,63 triliun.

Lesunya penerimaan berdampak ke pengeluaran yakni realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.435,46 triliun atau 94,87% dari pagu APBN sebesar Rp3.621,31 triliun. Realisasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp849,04 triliun.

Defisit Membengkak

Melesetnya target penerimaan juga berdampak langsung pada keseimbangan fiskal seperti defisit APBN 2025 yang melebar menjadi Rp670,34 triliun atau 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui target awal yang dipatok 2,53% terhadap PDB atau Rp616,19 triliun.

Defisit keseimbangan primer juga melonjak tajam ke angka negatif Rp155,94 triliun atau menyentuh 246,23% dari patokan awal. Untuk menambal celah tersebut, realisasi pembiayaan neto mencapai Rp742,73 triliun, setara 120,54% dari target pembiayaan dalam APBN 2025.

Purbaya menyebut strategi pembiayaan ini dilakukan secara hati-hati (prudent) dan terkendali dengan memanfaatkan momentum membaiknya kondisi pasar keuangan.

Di sisi lain, Purbaya juga memaparkan posisi neraca keuangan yang solid hingga tutup buku 2025. Total aset yang dimiliki negara mencapai Rp14.600,89 triliun, kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun, dan ekuitas sebesar Rp3.073,69 triliun.

"Angka ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan," ujar dia.

Purbaya menerangkan posisi arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat minus Rp243,9 triliun. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang masing-masing minus sebesar Rp712,07 triliun dan Rp 44,16 triliun. Sementara itu, aktivitas pendanaan tercatat positif Rp 828,37 triliun.

"Arus kas dan aktivitas investasi yang minus mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional," jelas dia.

Ekonom Soroti Pusat Finansial RI: Sistem Keuangan Belum Memadai

Jumat, 3 Juli 2026 16:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113913/ekonom-soroti-pusat-finansial-ri-sistem-keuangan-belum-memadai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom mewanti-wanti pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terlalu dipaksakan padahal sejumlah sistem keuangan di Tanah Air belum memadai sebagai financial center seperti negara maju lainnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan perbankan komersial yang ada di Indonesia masih minim memiliki jaringan internasional, investment bank, asuransi global, hingga private equity.

Padahal syarat menjadi financial center yang ideal seperti Singapura, Hongkong, Dubai, Abu Dhabi, Qatar dan Swiss adalah memiliki mata uang yang stabil, kepastian hukum, ekosistem keuangan yang handal dan lengkap serta lokasi yang mudah diakses dunia.

“Industri keuangan kita masih jauh dari memadai sebagai financial center. Aspek perbaikan iklim investasi dan ekosistem keuangan yang perlu ditekankan, mengingat saat ini ekosistem industri keuangan kita masih sangat buruk,” kata Wijayanto ketika dihubungi, Jumat (3/7/2026).

Tak hanya itu, dia menilai sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan RI juga masih terbatas. Kemudian tren regulasi sektor keuangan Indonesia juga semakin anti dengan pasar lantaran pemerintah cawe-cawe terlalu dalam. Misalnya terkait penugasan bagi himpunan bank milik negara (Himbara), penentuan bunga kredit, independensi BI, hingga transparansi pasar modal.

Di sisi lain, dia menyebut jika PFII berhasil menarik investor dengan bisnis legal, ini akan berdampak bagi perekonomian RI. Namun, jika yang datang justru bisnis ilegal dan Indonesia dijadikan hub pencucian uang atau money laundering, dampaknya akan sangat buruk dan permanen bagi ekonomi Indonesia.

“Jadi, PFII harus memastikan bahwa hanya bisnis dan uang ilegal seperti hasil korupsi, trafficking, narkoba, terorisme tidak boleh masuk ke PFII tersebut,” ujarnya.

Soroti Wacana Bali Jadi Pusat Finansial

Tak hanya itu, dia juga menyoroti ihwal lokasi penempatan PFII yang direncanakan pemerintah akan berada di Pulau Bali. Menurutnya, Bali tidak memiliki sistem keuangan global yang andal sehingga sangat berat bagi Indonesia untuk bersaing dengan pusat keuangan dunia yang lain.

Dia mengkhawatirkan, pembentukan PFII di Bali hingga terdapat isu penerbitan Patriot-Merah Putih Bond dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) seolah memberi karpet merah bagi pencucian uang.

Dia menyebut Indonesia justru akan diposisikan oleh dunia sebagai surga pencucian uang. Jika anggapan ini terjadi, maka kepercayaan dunia kepada Indonesia akan hancur bahkan RI berpotensi dikucilkan.

“Jadi, pemerintah harus hati-hati, tidak boleh grasak grusuk. Bali saat ini tidak cocok, ekosistem keuangannya masih jauh dari memadai. Selain itu, sama dengan seluruh bagian NKRI, rupiah tidak stabil, kepastian hukum buruk, institusi keuangan tidak independen dan handal,” jelas dia.

Bagaimanapun, Wijayanto menilai tujuan PFII yang bagus tersebut belum diikuti dengan perencanaan yang memadai. Dia mengkhawatirkan, rencana pemerintah tersebut akan seperti program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tujuannya mulia tetapi pelaksanaannya penuh masalah sehingga menimbulkan beban.

“Seringkali kita mempunyai tujuan muluk dan indah tetapi kita akan berakhir di mana ditentukan oleh kemampuan kita membangun sistem. Artinya, perencanaan, kebijakan dan eksekusi yang bagus sangatlah penting; sayangnya ini seringkali absen di Indonesia,” ungkapnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Indonesia selama ini memang belum memiliki kawasan keuangan internasional yang dirancang dengan standar tata kelola, kepastian hukum, dan daya saing setara pusat-pusat keuangan dunia.

Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan pengaturan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global.

Purbaya menilai pusat-pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inovasi sektor keuangan dan memperkuat posisi negara tersebut dalam rantai nilai ekonomi dunia. Dia menyayangkan Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu wilayah keuangan internasional yang telah berkembang di berbagai negara.

"Dengan ukuran ekonomi yang besar, pasar domestik yang luas, posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang membaik, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan internasional di kawasan Asia dan dunia," ucap Purbaya.

Purbaya mengklaim manfaat PFII nantinya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di suatu wilayah. Dampaknya disebut akan lebih luas terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing Indonesia secara keseluruhan.

Sekadar catatan, pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) PFII. Payung hukum ini akan mulai dibahas di tingkat panitia kerja (panja), dan ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari 20 hari.

Menurut rencana, RUU PFII akan masuk dalam pembicaraan tingkat II pada 21 Juli 2026 dan akan disahkan menjadi UU.

Restitusi Pajak Makin Jumbo pada 2026, Ada yang Salah dengan Penarikan Pajak?

Jumat, 3 Juli 2026 15:18 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/restitusi-pajak-makin-jumbo-pada-2026-ada-yang-salah-dengan-penarikan-pajak>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Lonjakan pembayaran restitusi pajak yang diperkirakan mencapai Rp 500 triliun pada 2026 dinilai bukan sekadar mencerminkan percepatan pelayanan kepada wajib pajak.

Di balik kenaikan tersebut, terdapat sinyal bahwa kualitas penerimaan pajak pemerintah perlu dicermati lebih dalam.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengatakan meningkatnya restitusi dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga likuiditas dunia usaha sekaligus mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang sedang menghadapi tekanan.

Ia menjelaskan, berdasarkan data pemerintah, realisasi restitusi sepanjang 2025 mencapai Rp 361,2 triliun.

Sementara itu, dalam empat bulan pertama 2026 saja restitusi yang telah dibayarkan mencapai sekitar Rp160 triliun, atau setara dengan akumulasi restitusi selama sembilan bulan pada tahun sebelumnya.

"Isu mengenai lonjakan restitusi pajak di tahun 2026 menjadi perhatian besar. Penyebabnya adalah faktor likuiditas dunia usaha dan akurasi potret penerimaan negara," ujar Prianto kepada Kontan.co.id, Jumat (3/7).

Menurutnya, salah satu pemicu kenaikan restitusi ialah penerapan PMK Nomor 28 Tahun 2026 yang mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh, UMKM, serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Melalui aturan tersebut, proses pengembalian yang sebelumnya dapat memerlukan pemeriksaan hingga 12 bulan kini dipercepat melalui mekanisme penelitian sehingga dana lebih cepat kembali ke pelaku usaha.

Selain itu, mayoritas restitusi berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika ekspor dikenakan tarif PPN 0%, perusahaan tetap membayar pajak masukan di dalam negeri sehingga akumulasi lebih bayar PPN meningkat dan kemudian diajukan sebagai restitusi.

Faktor lain berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Menurut Prianto, banyak perusahaan membayar angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan proyeksi laba yang tinggi pada tahun sebelumnya.

Namun ketika keuntungan perusahaan menurun akibat perlambatan ekonomi global, pembayaran tersebut berubah menjadi kelebihan bayar saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Prianto juga menilai lonjakan restitusi dapat menjadi indikasi bahwa target penerimaan pajak maupun penarikan setoran pada periode sebelumnya terlalu agresif.

"Lonjakan restitusi pajak dapat menjadi indikasi kuat bahwa target perpajakan dan penarikan setoran pada periode sebelumnya terlalu optimis atau terlalu agresif," imbuh Prianto.

Ia menjelaskan, mekanisme penetapan angsuran PPh Pasal 25 masih mengacu pada kinerja tahun sebelumnya.

Akibatnya, ketika kondisi ekonomi memburuk, perusahaan tetap diwajibkan membayar angsuran dalam jumlah besar sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun.

"Pada akhirnya, setoran PPh tersebut baru terkoreksi menjadi status lebih bayar setelah penghitungan PPh badan pada SPT Tahunan dilakukan," katanya.

Di samping itu, ia menilai terdapat kecenderungan aparat perpajakan mengejar target penerimaan bruto menjelang akhir tahun sehingga wajib pajak didorong melakukan pembayaran maksimal.

Dampaknya, klaim restitusi meningkat pada tahun berikutnya.

"Lonjakan Rp500 triliun ini merupakan dampak dari setoran yang dipaksakan atau diestimasi terlalu tinggi di masa lalu," katanya.

Lebih lanjut, Prianto menilai besarnya restitusi menunjukkan bahwa kekuatan riil penerimaan pajak tidak sekuat yang tercermin dari angka bruto.

Menurutnya, indikator yang lebih tepat untuk menilai kesehatan fiskal adalah penerimaan neto, yakni penerimaan bruto setelah dikurangi restitusi.

Semakin besar nilai restitusi, semakin lebar selisih antara penerimaan bruto dan penerimaan neto.

Ia menambahkan, semakin lebar selisih antara penerimaan bruto dan penerimaan neto, semakin sempit pula ruang fiskal pemerintah yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Angka restitusi yang melonjak membuktikan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi riil fundamental di bawahnya sedang mengalami tekanan," terang Prianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hingga empat bulan pertama 2026 pemerintah telah mencairkan restitusi pajak sekitar Rp160 triliun.

Nilai tersebut setara dengan total restitusi yang biasanya baru tercapai dalam sembilan bulan pada tahun sebelumnya.

Menurut Purbaya, apabila tren tersebut berlanjut hingga akhir tahun, total restitusi pajak berpotensi menembus kisaran Rp 500 triliun.

Ia menegaskan kondisi tersebut menunjukkan pemerintah tidak menahan proses restitusi. Bahkan, menurutnya, wajib pajak justru menerima pengembalian kelebihan pembayaran dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Purbaya mengaku heran masih terdapat keluhan mengenai lambatnya proses restitusi. Berdasarkan data pemerintah, ia menilai tidak terdapat indikasi bahwa kebijakan restitusi saat ini menghambat aktivitas dunia usaha.

"Dengan angka tersebut gak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri yang main," kata Purbaya, belum lama ini.

Temuan OECD: Mesin Pajak Penghasilan Indonesia Mulai Kehilangan Tenaga

Jumat, 3 Juli 2026 13:31 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/temuan-oecd-mesin-pajak-penghasilan-indonesia-mulai-kehilangan-tenaga>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mesin penerimaan pajak penghasilan (PPh) Indonesia mulai kehilangan tenaga.

Laporan OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 mencatat penerimaan dari kelompok pajak atas penghasilan, laba, dan keuntungan modal (taxes on income, profits and capital gains) praktis tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data OECD menunjukkan penerimaan pajak penghasilan hanya naik dari Rp 1.061,24 triliun pada 2023 menjadi Rp 1.061,94 triliun pada 2024.

Kenaikannya hanya sekitar Rp 700 miliar atau setara 0,07% secara tahunan.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total penerimaan pajak Indonesia. Pada periode yang sama, total penerimaan pajak meningkat dari Rp 2.517,66 triliun menjadi Rp 2.620,67 triliun, atau bertambah sekitar Rp 103 triliun.

Apabila ditelisik, melambatnya pertumbuhan pajak penghasilan dipengaruhi oleh turunnya penerimaan dari pajak penghasilan badan.

OECD mencatat penerimaan pajak korporasi turun dari Rp 829,66 triliun pada 2023 menjadi Rp 818,30 triliun pada 2024, atau berkurang sekitar Rp 11,36 triliun.

Sebaliknya, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih mencatat pertumbuhan. Setoran dari kelompok ini meningkat dari Rp 231,59 triliun menjadi Rp 243,64 triliun, atau bertambah sekitar Rp 12,05 triliun.

Meski mulai melambat, pajak penghasilan masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.

Pada 2024, kelompok pajak ini menyumbang sekitar 40,5% dari total penerimaan pajak Indonesia.

Namun, data OECD juga menunjukkan peran pajak penghasilan mulai tertinggal dibandingkan pajak atas barang dan jasa.

Pada 2024, penerimaan dari kelompok pajak konsumsi mencapai Rp 1.128,67 triliun, lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 1.061,94 triliun.

Tren tersebut menandakan bahwa tambahan penerimaan pajak pada 2024 lebih banyak berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat dibandingkan dari pajak atas laba perusahaan maupun penghasilan.

Dalam perspektif jangka panjang, penerimaan pajak penghasilan memang tumbuh signifikan.

Pada 2000, penerimaan kelompok ini masih sebesar Rp 57,07 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 357,05 triliun pada 2010 dan menembus Rp 1.061,94 triliun pada 2024.

BUMN Rampungkan Laporan Keuangan 2025, Danantara Susun Laporan Konsolidasian

Jumat, 3 Juli 2026 12:22 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bumn-rampungkan-laporan-keuangan-2025-danantara-susun-laporan-konsolidasian>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seluruh badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dalam ekosistem Danantara Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025.

Setelah seluruh laporan entitas rampung, Danantara Indonesia kini melanjutkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang masih menunggu penyelesaian tahapan audit.

Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan, penyelesaian laporan keuangan masing-masing BUMN menjadi tonggak penting dalam proses konsolidasi kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.

"Seluruh BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Sejalan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut, Danantara Indonesia turut menyampaikan sejumlah sorotan atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang mencerminkan ketahanan, transformasi, dan kontribusi BUMN di berbagai sektor strategis terhadap perekonomian nasional," ujar Rohan dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).

Rohan menjelaskan, sorotan kinerja yang dipublikasikan merupakan contoh capaian sejumlah BUMN selama periode April 2025 hingga April 2026 atau satu tahun sejak perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam ekosistem pengelolaan Danantara Indonesia.

Menurutnya, daftar tersebut bukan merupakan keseluruhan kinerja seluruh BUMN. Pemilihan ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang bersifat menyeluruh, melainkan sebagai sorotan atas sejumlah BUMN dengan peningkatan kinerja yang menonjol sejak berada dalam ekosistem pengelolaan Danantara Indonesia.

"Di luar entitas yang ditampilkan, masih terdapat berbagai BUMN lain yang juga mencatatkan perkembangan kinerja positif dan terus menjadi bagian dari agenda transformasi berkelanjutan Danantara Indonesia," katanya.

Berdasarkan data Danantara, PT Pertamina (Persero) membukukan laba sebesar Rp 24,9 triliun hingga April 2026 atau meningkat sekitar Rp 11 triliun atau 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PT Pupuk Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan menjadi Rp 4,8 triliun atau naik 202% secara tahunan. Sementara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membukukan laba Rp 1,5 triliun atau meningkat 169%.

Di sektor pariwisata, PT Aviastar Pariwisata Indonesia (InJourney) membukukan laba Rp 300 miliar atau tumbuh 33% dibandingkan periode sebelumnya.

Kinerja positif juga ditunjukkan kelompok perbankan Himbara. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan laba Rp 21,2 triliun atau naik 15%. PT Bank Mandiri Tbk membukukan laba Rp 21,3 triliun atau meningkat 13%, sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) meraih laba Rp 7,2 triliun atau tumbuh 6%.

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk mencatatkan pertumbuhan laba tertinggi secara persentase. Laba emiten konstruksi tersebut mencapai Rp 69 miliar atau melonjak 667% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain pertumbuhan laba, Danantara juga menyoroti keberhasilan sejumlah BUMN melakukan turnaround kinerja setelah menjalankan restrukturisasi. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berhasil membukukan laba Rp 635 miliar setelah pada periode sebelumnya masih mencatatkan rugi Rp 981 miliar. Danantara menyebut perbaikan tersebut didukung restrukturisasi perusahaan serta capital support dari Danantara Asset Management (DAM).

Perbaikan serupa juga dicatatkan PT Kimia Farma Tbk yang membalikkan kondisi rugi Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar. Adapun PT Semen Indonesia Tbk membukukan laba Rp 106 miliar setelah sebelumnya mencatatkan rugi Rp 66 miliar, didorong transformasi bisnis yang dijalankan bersama DAM.

Selain mencatatkan perbaikan kinerja BUMN, Danantara juga mulai merealisasikan mandat investasinya melalui sejumlah proyek strategis yang didanai antara lain dari dividen BUMN yang diterima sepanjang 2025.

Sebagian dividen tersebut dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek yang dinilai memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional dan diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang.

Beberapa investasi yang telah direalisasikan antara lain pengembangan ekosistem haji dan umrah Indonesia di Makkah guna meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.

Selain itu, Danantara juga mulai mengembangkan proyek waste-to-energy (WTE) untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, meningkatkan ketahanan energi, serta mendorong transisi menuju ekonomi hijau.

Rohan menegaskan seluruh investasi tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, disiplin investasi, pengelolaan risiko yang prudent, serta berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Adapun laporan keuangan konsolidasian Danantara Indonesia tahun buku 2025 masih berada dalam proses penyelesaian sesuai tahapan audit yang berlaku. Perseroan menyatakan laporan tersebut akan dipublikasikan setelah seluruh proses audit selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menkeu Purbaya: Kinerja APBN di Jateng pada Semester I 2026 Tetap Terjaga

Jumat, 3 Juli 2026 16:31 WIB

Oleh Ismadi Amrin, Redaktur: Kristantyo Wisnubroto

<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/977153/menkeu-purbaya-kinerja-apbn-di-jateng-pada-semester-i-2026-tetap-terjaga>

Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah serta pelaksanaan program prioritas pemerintah antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Hingga Semester I Tahun 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan perekonomian. Pendapatan negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,33 persen (year-on-year).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah. "Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," kata Menkeu di Semarang, Jumat (3/7/2026).

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi digitalisasi penerimaan daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi.

Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Menkeu juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Untuk program MBG, hingga pertengahan tahun 2026 program ini telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja. Program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu (DJPb) saat ini melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN Jawa Tengah antara lain pada SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tenganan Bener Semarang.

Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusi bersama para pemangku kepentingan. “DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur”, ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga mengunjungi KDMP untuk melihat perkembangan implementasi program yang ditujukan memperkuat ekonomi desa dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif.

Menkeu juga mencermati perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menkeu menegaskan bahwa APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Salah satu fokus utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi kinerja belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal.

Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Gubernur Luthfi Gandeng Zheng He Society Dorong Investasi Jateng

Jumat, 3 Juli 2026 08:32 WIB

Agus Hermanto

<https://www.rmoljawatengah.id/gubernur-luthfi-gandeng-zheng-he-society-dorong-investasi-jateng>

Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kehormatan Presiden International Zheng He Society, Zhang Lu, bersama delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. (Foto: RMOL Jateng/Humas Jateng).

Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kehormatan Presiden International Zheng He Society, Zhang Lu, bersama delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. (Foto: RMOL Jateng/Humas Jateng).

Gubernur Ahmad Luthfi rangkul International Zheng He Society guna buka jalur investasi, perdagangan, dan wisata berbasis sejarah Laksamana Cheng Ho di Jawa Tengah. Sejarah

Jejak sejarah Laksamana Cheng Ho di Jawa Tengah kini diarahkan menjadi pintu masuk kerja sama ekonomi global.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng International Zheng He Society yang berbasis di Singapura untuk memperkuat kolaborasi di bidang budaya, pariwisata, perdagangan, hingga investasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Ahmad Luthfi menerima kunjungan kehormatan Presiden International Zheng He Society, Zhang Lu, bersama delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 2 Juli 2026

“Saya berterima kasih Presiden International Zheng He Society datang dalam rangka kolaborasi antara Singapura dan Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi. Informasi Jawa Tengah

Menurutnya, kerja sama tersebut berangkat dari ikatan sejarah yang telah terjalin sejak kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Semarang. Warisan sejarah itu dinilai memiliki nilai strategis untuk dikembangkan menjadi kekuatan diplomasi ekonomi dan budaya.

“Kita tahu bahwa di sini ada Sam Poo Kong. Itu merupakan legacy bahwa antara Tiongkok, Singapura, dan Indonesia pernah ada hubungan dengan Semarang,” katanya.

Luthfi menegaskan, kolaborasi yang dijabaki tidak berhenti pada pelestarian budaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di sektor investasi dan perdagangan.

“Ke depan kita akan bekerja sama terkait kebudayaan. Beberapa pengusaha yang diajak oleh beliau juga sudah berinvestasi di KITB Batang,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Singapura masih menjadi investor asing terbesar di Jawa Tengah. Informasi Jawa Tengah

Bahkan, sekitar 48 persen realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi ini berasal dari Singapura.

“Hari ini investasi Singapura hampir 48 persen. Itu adalah investasi PMA dari Singapura,” kata Luthfi.

Hubungan ekonomi kedua wilayah juga tercermin dari kinerja perdagangan.

Sepanjang 2025, nilai ekspor Jawa Tengah ke Singapura mencapai US\$114,96 juta dengan komoditas unggulan berupa tembakau, produk kayu, dan tekstil.

Sementara itu, Presiden International Zheng He Society, Zhang Lu, menilai Semarang memiliki modal sejarah yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya bertaraf internasional.

Menurutnya, sejarah Cheng Ho merupakan aset yang mampu memperkuat daya tarik daerah di mata dunia.

“Kami banyak bergerak di bidang budaya, AI, dan teknologi baru untuk mempromosikan kebudayaan,” ujarnya.

Zhang Lu mengatakan, promosi budaya pada era modern tidak cukup hanya mengandalkan objek wisata.

Daerah juga harus mampu menghadirkan narasi sejarah yang kuat agar menarik wisatawan, investor, hingga pelaku industri kreatif.

“Semoga ke depan bisa terhubung dengan Semarang, tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga menarik lebih banyak investor, kru film, perdagangan, dan kolaborasi lainnya,” katanya. Panduan & Petunjuk Perjalanan

Sebagai tindak lanjut peninjauan kerja sama tersebut, Zhang Lu mengundang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadiri konferensi internasional dan gala dinner di Singapura pada September 2026.

Agenda itu diharapkan menjadi langkah awal memperluas kolaborasi di bidang budaya, investasi, perdagangan, pariwisata, hingga pengembangan industri kreatif berbasis sejarah.

Pemprov mencari investor yang siap mengembangkan PRPP Jateng di Semarang

Jumat, 3 Juli 2026 16:07 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637223/pemprov-mencari-investor-yang-siap-mengembangkan-prpp-jateng-di-semarang>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencari investor yang siap mengembangkan atau melanjutkan revitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng, Semarang. Demografi

"Memang sekarang kita lagi carikan investor untuk PRPP," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat.

Ia berencana mewujudkan PRPP Jateng menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional.

Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut dilengkapi dengan convention hall berukuran besar.

Selain itu PRPP juga akan dijadikan "sport center" yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, seperti basket dan futsal.

Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP, mulai dari pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga POJ City.

Ia berharap tersebut diharapkan mendatangkan keuntungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng tersebut. Demografi

Menurut dia, BUMD harus mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta kepada manajemen PT PRPP untuk memperbaiki tata kelola dan memperbanyak event di kawasan PRPP.

Saat ini, yang menjadi unggulan PT PRPP untuk menarik kunjungan wisatawan hanya Taman Maerokoco dan Jateng Fair.

"Jateng Fair itu menjadi salah satu etalasnya Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Bupati Magelang mendorong OPD lakukan optimalisasi PAD

Jumat, 3 Juli 2026 07:09 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637191/bupati-magelang-mendorong-opd-lakukan-optimalisasi-pad>

Magelang (ANTARA) - Bupati Magelang Grengseng Pamuji menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD penghasil untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Magelang. Panduan Kota & Daerah

"Kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta dinamika fiskal nasional turut memengaruhi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (2/7).

Ia mengatakan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, juga berdampak terhadap pertumbuhan beberapa sektor usaha yang selama ini menjadi sumber penerimaan pajak daerah.

Menurut dia, kemandirian fiskal bukan semata-mata diukur dari besarnya PAD, melainkan dari kemampuan daerah dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan yang sehat, berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Saya meminta setiap Perangkat Daerah untuk menghadirkan inovasi yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil. Tidak cukup hanya menjalankan rutinitas pemungutan, tetapi juga harus mampu menggali potensi baru," katanya.

Untuk diketahui, pada Tahun 2025 target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,749 triliun, dengan realisasi mencapai Rp2,773 triliun atau 100,88 persen. Sedangkan PAD berhasil direalisasikan sebesar Rp713,530 miliar dari target Rp 648,525 miliar atau 110,02 persen.

Ia mengatakan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah mencapai 25,72 persen, sedangkan selebihnya merupakan dana transfer pemerintah pusat.

Keberhasilan peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama, katanya menegaskan.

Harga kedelai impor di Kudus mengalami penurunan

Jumat, 3 Juli 2026 13:50 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637204/harga-kedelai-impor-di-kudus-mengalami-penurunan>

Kudus (ANTARA) - Harga jual kedelai impor di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada pekan ini mengalami penurunan dari sebelumnya dijual Rp10.800 per kilogram menjadi Rp10.700/kg. Biji-bijian& Pasta.

"Harga jual kedelai impor turun mulai hari ini, setelah sebelumnya bertahan dengan harga Rp10.800/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kabupaten Kudus Amar Ma'ruf di Kudus, Jateng, Jumat.

Meskipun sering berfluktuasi mengikuti perubahan kurs rupiah terhadap mata uang dolar AS, kata dia, pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Kudus juga masih bertahan dengan harga jual sebelumnya.

Para pelaku usaha, kata dia, tidak berani menaikkan harga jual tahu maupun tempe hasil produksinya, karena pelaku usaha lain juga bertahan dengan harga lama.

Meskipun harganya turun Rp100, menurut dia, sangat berarti bagi pelaku usaha tahu dan tempe karena sebelumnya bertahan dengan laba yang mepet.

Untuk stok kedelai impor, kata Ma'ruf, tidak ada permasalahan karena di gudang tersedia 65 ton dan masih bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Di tengah fluktuasi harga kedelai impor, kedelai lokal yang bisa menjadi alternatif hingga saat ini juga belum tersedia. Biji-bijian& Pasta

"Kalaupun ada, harganya justru lebih mahal di bandingkan kedelai impor," ujarnya.

Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sonhaji mengungkapkan harga jual kedelai impor memang berfluktuasi.

"Untuk harga jual eceran hasil pantauan di pasar tradisional, harga jual kedelai impor hari ini masih bertahan dengan harga Rp12.000/kg, meskipun sudah ada penurunan harga," ujarnya.

Dimungkinkan, kata dia, kedelai yang dijual merupakan stok lama, sehingga mereka ingin menghabiskan terlebih dahulu.

Untuk stok kedelai dipastikan masih tersedia cukup, sedangkan fluktuasi harganya masih terus dipantau guna memastikan daya beli masyarakat masih terjangkau.

Sementara, harga jual tahu di tingkat produsen, masih bertahan dengan harga lama berdasarkan papan cetakan dijual Rp35.000.

Meskipun setiap papan dijual dengan harga sama, tetapi pelanggan bisa meminta pemotongan sesuai ukuran yang diinginkan, sehingga harga jual di pasaran antar pedagang bisa berbeda karena beda ukuran.

Kenaikan harga bawang merah di Purwokerto tertahan oleh harga cabai

Jumat, 3 Juli 2026 13:52 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637208/kenaikan-harga-bawang-merah-di-purwokerto-tertahan-oleh-harga-cabai>

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Christoveny mengatakan kenaikan harga bawang merah pada Juni 2026 tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit, sehingga tekanan inflasi di Purwokerto, Jateng, tetap terjaga.

"Inflasi Purwokerto pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,12 persen secara bulanan (month to month/mtm)," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Dia mengatakan kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa daerah sentra.

Akan tetapi secara umum, kata dia, inflasi bulanan utamanya dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang.

"Kendati demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit seiring terjaganya pasokan dan upaya stabilisasi harga pangan," katanya menegaskan.

Menurut dia, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten berupaya menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di tengah dinamika perekonomian daerah.

Selain itu, BI juga memfasilitasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) Business-to-Business (B2B) komoditas pangan di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara guna memperkuat distribusi antarwilayah.

Sementara itu, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Purwokerto pada Jumat terpantau mengalami penurunan.

Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Manis Purwokerto, Anjar mengatakan harga bawang merah saat ini turun menjadi sekitar Rp55.000 per kilogram setelah pada pekan lalu sempat mencapai Rp60.000 per kilogram. Buah& Sayuran

"Biasanya kami menjual bawang merah di kisaran Rp40.000 per kilogram, namun karena kemarin petani di Brebes gagal panen dan permintaan dari Jakarta sangat tinggi, harga bawang merah di sini melonjak," katanya.

Selain bawang merah, harga cabai rawit merah turun dari kisaran Rp60.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram atau berada di rentang harga acuan yang berkisar Rp40.000-Rp57.000 per kilogram, sedangkan cabai merah Rp50.000 per kilogram atau masih berada di rentang harga acuan yang berkisar Rp37.000-Rp55.000 per kilogram.

Sementara, harga telur ayam ras juga turun menjadi sekitar Rp24.000-Rp25.000 per kilogram atau di bawah harga acuan sebesar Rp26.500 per kilogram, sedangkan harga daging ayam ras turun ke kisaran Rp32.000-Rp35.000 per kilogram atau lebih rendah dari harga acuan sebesar Rp40.000 per kilogram.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi surplus produksi.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan berkoordinasi dengan asosiasi peternak, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten tetangga untuk memperluas akses pasar bagi telur produksi Banyumas.

"Kalau memang ada daerah yang kekurangan pasokan telur, nanti kita bantu komunikasikan agar distribusinya bisa berjalan. Yang penting suplai dan permintaan menjadi lebih seimbang," katanya.

Ia mengatakan salah satu langkah yang akan diperkuat adalah perdagangan antardaerah melalui skema kerja sama antardaerah (KAD) agar surplus produksi telur di Banyumas dapat disalurkan ke daerah yang masih membutuhkan pasokan sehingga keseimbangan suplai dan permintaan tetap terjaga.

Bank Mandiri Perkuat Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Jumat, 3 Juli 2026 16:13 WIB

Reporter: Tim KONTAN, Editor: Indah Sulistyorini

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-perkuat-ekosistem-ekonomi-perempuan-di-jawa-tengah>

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 3 Juli 2026 - Bank Mandiri berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan nilai tumbuh kepada masyarakat. Sebagai bagian dari Danantara Indonesia, Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam mendorong perekonomian kerakyatan dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan di berbagai daerah.

Konkritnya, bank berlogo pita emas ini memberikan bantuan berupa mesin tetas telur, perlengkapan dan peralatan lainnya kepada Koperasi Pemasaran Widuri Karya Nusantara di Desa Wonosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi multipihak dalam Program Nasional Miskin Ekstrem Pasti Kerja “Emak-Emak Jadi Pengusaha” yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Melalui program ini, bank bersandi saham BMRI ini memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus menciptakan peluang usaha produktif bagi masyarakat rentan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat model usaha produktif berbasis kawasan melalui budidaya Ayam Elba sebagai Ayam Petelur Berbasis Lokal yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai usaha, mulai dari penetasan bibit, pembesaran ayam, produksi telur, hingga distribusi dan pemasaran. Ia meyakini pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi yang terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, koperasi, dan masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan akselerasi yang bertumbuh bagi ekonomi keluarga sekaligus membangun fondasi usaha yang berkelanjutan di tingkat desa. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus melayani sepenuh hati dengan menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan” ujar Adhika dalam keterangan resmi pada Jumat (3/7).

Adapun program ini menyasar perempuan produktif usia 18 - 45 tahun dari keluarga penerima bantuan sosial desil 1 hingga 4 yang berada di Desa Wonosari. Mereka berperan sebagai pelaku utama usaha pembesaran ayam petelur yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga.

Menurut Adhika, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama program ini karena perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rumah tangga. Namun, masih banyak perempuan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, maupun peluang usaha produktif.

Melalui sinergi ekosistem layanan yang melibatkan koperasi sebagai offtaker kawasan, program ini juga memastikan keberlanjutan usaha para penerima manfaat. Koperasi Widuri akan berperan dalam pengumpulan hasil produksi serta distribusi telur dengan mekanisme harga yang adil dan stabil sehingga memberikan kepastian pasar bagi para pelaku usaha.

Inisiatif ini juga hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Dengan kemampuan produksi bibit secara mandiri melalui mesin tetas telur, masyarakat setempat diharapkan mampu menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan berdaya saing.

“Keunggulan yang berkelanjutan tidak hanya tercermin dari keberhasilan usaha yang tumbuh, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mandiri dan menciptakan dampak ekonomi yang terus berkembang. Karena itu, kami berharap program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah,” tambah Adhika.

Ke depan, program budidaya Ayam Elba ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, menciptakan lapangan usaha produktif berbasis rumah tangga, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta berkontribusi pada penyediaan pasokan telur bergizi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, Bank Mandiri akan terus menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di berbagai wilayah Indonesia.

Menkeu Purbaya: Kinerja APBN di Jateng pada Semester I 2026 Tetap Terjaga

Jumat, 3 Juli 2026 16:31 WIB

Oleh Ismadi Amrin, Redaktur: Kristantyo Wisnubroto

<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/977153/menkeu-purbaya-kinerja-apbn-di-jateng-pada-semester-i-2026-tetap-terjaga>

Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah serta pelaksanaan program prioritas pemerintah antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Hingga Semester I Tahun 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan perekonomian. Pendapatan negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,33 persen (year-on-year).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah. “Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” kata Menkeu di Semarang, Jumat (3/7/2026).

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi digitalisasi penerimaan daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi.

Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Menkeu juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Untuk program MBG, hingga pertengahan tahun 2026 program ini telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja. Program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu (DJPb) saat ini melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN Jawa Tengah antara lain pada SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tenganan Bener Semarang.

Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusi bersama para pemangku kepentingan. “DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur”, ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga mengunjungi KDMP untuk melihat perkembangan implementasi program yang ditujukan memperkuat ekonomi desa dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif.

Menkeu juga mencermati perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menkeu menegaskan bahwa APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Salah satu fokus utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi kinerja belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal.

Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Ekspor Via Selat Hormuz Pulih, Produksi OPEC Melonjak di Juni

Sabtu, 4 Juli 2026 11:30 WIB

Grant Smith, Julian Lee, dan Bill Lehane

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/113951/ekspor-via-selat-hormuz-pulih-produksi-opec-melonjak-di-juni/2>

Bloomberg, Produksi minyak mentah negara-negara anggota OPEC melonjak pada Juni setelah sejumlah produsen di kawasan Teluk Persia kembali meningkatkan ekspor melalui Selat Hormuz menyusul tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, menurut survei Bloomberg.

Produksi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) meningkat 2,34 juta barel per hari menjadi 18,75 juta barel per hari. Kenaikan terbesar berasal dari Kuwait, Arab Saudi, dan Iran. Meski demikian, produksi tersebut masih jauh di bawah level sebelum perang.

Bahkan sebelum kesepakatan damai tercapai, produsen di Teluk Persia telah menemukan cara untuk mengirimkan minyak melalui Selat Hormuz yang sempat nyaris ditutup pada fase awal konflik. Setelah kesepakatan AS-Iran memungkinkan pelayaran kembali dilakukan secara terbuka, pengiriman minyak Arab Saudi telah kembali mencapai sekitar 90% dari tingkat normal, berdasarkan data pelacakan kapal tanker.

Peningkatan pasokan tersebut terjadi ketika permintaan bahan bakar di China, konsumen minyak terbesar dunia masih lemah. Kondisi ini menciptakan surplus pasokan di sejumlah pasar, menghapus kenaikan harga minyak akibat perang, sekaligus memunculkan pertanyaan apakah negara-negara OPEC harus bersaing lebih ketat untuk mendapatkan pembeli.

Kontrak berjangka minyak Brent diperdagangkan di kisaran US\$72 per barel .

Produksi OPEC pada Juni masih 7,3 juta barel per hari, atau sekitar 28% lebih rendah dibandingkan Februari setelah disesuaikan dengan keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari OPEC.

UEA keluar dari OPEC pada Mei, sehingga memiliki keleluasaan untuk meningkatkan produksi setelah kondisi di Selat Hormuz sepenuhnya stabil. Sementara itu, Irak juga sempat mengancam akan keluar dari organisasi jika tidak memperoleh kuota produksi yang lebih besar.

OPEC+ Bahas Kuota Produksi

Negara-negara utama dalam aliansi OPEC+, termasuk Rusia, dijadwalkan menggelar konferensi video bulanan pada Minggu untuk membahas batas produksi minyak pada bulan berikutnya.

Subkelompok yang terdiri dari tujuh negara tersebut sebelumnya telah mengumumkan serangkaian kenaikan produksi dalam jumlah kecil selama masa perang sebagai bagian dari proses pemulihan produksi yang sempat dipangkas beberapa tahun lalu. Dua delegasi mengatakan pekan ini mereka

memperkirakan kuota produksi kembali dinaikkan sebesar 188.000 barel per hari pada Agustus, yang menjadi tahap kedua terakhir dari proses tersebut.

Survei Bloomberg menunjukkan Kuwait mencatat kenaikan produksi terbesar di antara 11 anggota OPEC pada Juni. Produksi negara itu naik 870.000 barel per hari menjadi 1,36 juta barel per hari. Produksi Kuwait sempat anjlok sekitar 80% akibat konflik dan hingga kini masih berada jauh di bawah tingkat normal.

Arab Saudi menjadi penyumbang kenaikan terbesar berikutnya dengan tambahan 550.000 barel per hari menjadi rata-rata 7,2 juta barel per hari.

Sementara itu, Iran meningkatkan produksi sebesar 510.000 barel per hari menjadi 2,85 juta barel per hari. Namun, negara tersebut masih menghadapi kesulitan mencari pembeli sehingga menumpuk persediaan minyak di kapal-kapal tanker yang berlabuh di laut.

Di luar OPEC, Rusia juga meningkatkan ekspor minyak mentah ke rekor tertinggi setelah serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang minyaknya. Kondisi tersebut diduga mendorong Rusia mengeksport minyak yang tidak dapat diolah di dalam negeri.

Survei produksi Bloomberg disusun berdasarkan data pelacakan kapal tanker, informasi dari para pejabat, serta estimasi dari Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler Ltd., dan Rystad Energy AS.

Pertumbuhan Lapangan Kerja Amerika Melambat Tajam

Sabtu, 4 Juli 2026 07:26 WIB

Andika Aditia

<https://money.kompas.com/read/2026/07/04/072624426/pertumbuhan-lapangan-kerja-amerika-melambat-tajam>

WASHINGTON, KOMPAS.com — Pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat (AS) melambat tajam pada Juni 2026, sementara penciptaan lapangan kerja pada dua bulan sebelumnya direvisi lebih rendah.

Kondisi ini mengindikasikan pasar tenaga kerja mulai mendingin dan mendorong pelaku pasar mengurangi ekspektasi pengetatan kebijakan moneter dalam waktu dekat oleh bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (2/7/2026), jumlah tenaga kerja nonpertanian (nonfarm payrolls) hanya bertambah 57.000 pada Juni. Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi ekonom yang disurvei Reuters, yakni 110.000 lapangan kerja baru.

Selain itu, data April dan Mei direvisi turun, menunjukkan perekonomian AS menciptakan 74.000 lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan laporan sebelumnya.

Meski demikian, tingkat pengangguran turun menjadi 4,2 persen pada Juni dari 4,3 persen pada Mei. Namun, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh keluarnya sekitar 720.000 orang dari angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi 61,5 persen, level terendah sejak Maret 2021.

Sejumlah ekonom menilai perlambatan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dari perkiraan kemungkinan merupakan dampak tertunda dari konflik di Timur Tengah, yang sempat mendorong kenaikan harga energi dan meningkatkan tekanan inflasi.

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah rekreasi dan perhotelan, yang kehilangan 61.000 pekerjaan pada Juni, menjadi penurunan terbesar sejak masa pandemi Covid-19. Penurunan terjadi di restoran dan bar sebanyak 32.900 pekerjaan, serta hotel dan motel sebanyak 21.700 pekerjaan.

"Sebagian besar pembuat kebijakan kemungkinan masih akan memandang pasar tenaga kerja berada dalam kondisi stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu lemah," kata Kepala Ekonom AS Santander U.S. Capital Markets Stephen Stanley.

Meski pertumbuhan lapangan kerja melambat, pasar tenaga kerja AS dinilai masih ditopang tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang relatif rendah. Para ekonom menggambarkan kondisi tersebut sebagai pasar kerja dengan pola "perekrutan rendah, PHK rendah".

Sektor jasa profesional dan bisnis menjadi penyumbang terbesar penciptaan lapangan kerja pada Juni dengan tambahan 36.000 pekerjaan.

Sementara itu, sektor bantuan sosial menambah 25.000 pekerjaan, dan sektor kesehatan bertambah 22.000 pekerjaan.

Di sektor lain, lapangan kerja di bidang konstruksi bertambah 11.000, manufaktur naik 3.000, sedangkan sektor ritel kehilangan 7.500 pekerjaan dan industri informasi berkurang 9.000 pekerjaan.

Sementara itu, pertumbuhan upah masih berada pada tingkat yang dinilai tidak memicu inflasi lebih tinggi. Pendapatan rata-rata per jam naik 3,5 persen secara tahunan pada Juni, sedikit lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,4 persen pada Mei.

Pasar keuangan kini memperkirakan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan bulan ini.

Peluang kenaikan suku bunga pada September juga menurun setelah publikasi data ketenagakerjaan terbaru tersebut.

Ekonom FHN Financial Chris Low menilai penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya arus imigrasi.

"Sebagian besar imigran baru aktif mencari pekerjaan dan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya," kata Low.

Berkah dan Beban ASEAN di Balik Pelemahan Tajam Yen Jepang

Sabtu, 4 Juli 2026 12:50 WIB

Editor Sandro Gatra

<https://money.kompas.com/read/2026/07/04/125000026/berkah-dan-beban-asean-di-balik-pelemahan-tajam-yen-jepang?page=all#page2>

KEJATUHAN nilai tukar yen Jepang (JPY) baru-baru ini, telah menjelma menjadi salah satu disrupsi makroekonomi paling mengguncang di pasar keuangan global dalam empat dekade terakhir.

Secara drastis, mata uang Negeri Sakura ini terjerembap melampaui level 162 yen per dolar Amerika Serikat (USD), titik terendah sejak Desember 1986.

Posisi ini menghadirkan kontras yang ekstrem jika ditarik secara historis pada musim semi tahun 1995, saat yen sempat perkasa menyentuh level 80 yen per dolar AS.

Kemerosotan ini kian sah ketika melihat nilai tukar efektif riil (Real Effective Exchange Rate/ REER) yen yang ambles ke level terendah dalam 54 tahun terakhir.

Depresiasi ekstrem ini tentu bukan hasil dari variabel tunggal, tapi akumulasi dari benturan kebijakan moneter asimetris, guncangan eksternal sektor energi, dan kecemasan fiskal domestik Jepang.

Pemicu utama rontoknya yen adalah kesenjangan suku bunga riil (yield spread) yang persisten antara Jepang dengan negara-negara maju lain, khususnya Amerika Serikat.

Bank of Japan (BOJ) sejatinya telah mengakhiri era suku bunga negatif pada Maret 2024 dan secara merayap menaikkan suku bunga kebijakan hingga mencapai 1,0 persen pada Juni 2026.

Namun, langkah pengetatan ini dinilai pasar keuangan global sangat terlambat dan lamban (falling behind the curve).

Di seberang samudra, Federal Reserve (The Fed) justru bersikukuh mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran tinggi, yakni 3,5 persen hingga 3,75 persen, demi meredam inflasi yang membandel.

Perbedaan imbal hasil yang menganga lebar ini memicu aliran modal keluar (capital outflow) secara masif dari Jepang untuk memburu imbal hasil yang lebih gurih di pasar keuangan AS, gerak modal yang otomatis mengerdilkan nilai yen.

Tekanan eksternal kian berat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran pada awal 2026, telah melambungkan harga minyak mentah global mendekati level 100 dollar AS per barel.

Sebagai negara yang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak mentahnya dari negara-negara Teluk, Jepang terpaksa menanggung pembengkakan tagihan impor energi dalam denominasi dolar AS.

Kebutuhan korporasi Jepang untuk terus memborong dolar AS demi membayar pasokan energi impor menciptakan tekanan jual yang konstan terhadap yen di pasar valuta asing.

Situasi pelik ini diperparah oleh memburuknya persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal domestik.

Pengumuman rencana investasi publik dan swasta raksasa oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi senilai 2,3 triliun dollar AS justru menyalakan alarm bahaya mengenai ekspansi fiskal yang berlebihan.

Dengan rasio utang pemerintah Jepang yang telah mengangkasa di kisaran 237 persen hingga 250 persen dari PDB, stimulus tanpa rincian pendanaan yang jelas tersebut memicu ketakutan akan terjadinya "dominasi fiskal" (fiscal dominance).

Polarisasi Domestik Jepang dan Ketangguhan ASEAN

Dampak dari pelemahan yen yang berkepanjangan melahirkan polarisasi yang sangat timpang di dalam negeri Jepang.

Di satu sisi, korporasi multinasional raksasa menikmati rekor keuntungan karena nilai pendapatan luar negeri mereka melonjak drastis saat dikonversi kembali ke dalam yen.

Keuntungan ini juga disokong oleh ledakan pariwisata luar negeri (inbound tourism) yang menembus rekor kunjungan hingga 36,87 juta wisatawan.

Namun, di sisi lain, sektor riil skala menengah ke bawah menderita akibat tekanan inflasi impor yang parah.

Biaya hidup rata-rata rumah tangga Jepang melonjak sebesar 90.000 yen pada tahun 2024, misalnya, akibat membengkaknya harga bahan pokok impor.

Meskipun negosiasi upah musim semi (Shunto) menghasilkan kenaikan upah nominal tertinggi, pertumbuhan upah riil tetap berada di zona negatif karena laju inflasi domestik jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat.

Sebaliknya, kebangkrutan yang secara langsung disebabkan oleh pelemahan yen (weak-yen-related bankruptcies) melonjak sebesar 32,3 persen menjadi 45 kasus pada paruh pertama tahun 2026, didominasi oleh sektor grosir (wholesale) yang tidak memiliki kekuatan menetapkan harga (pricing power).

Pada saat yang sama, performa jeblok yen ini sangat kontras dengan ketangguhan mata uang di kawasan Asia Tenggara.

Dolar Singapura (SGD) mencatatkan penguatan historis terhadap yen di kisaran 124,92 hingga 125,65 JPY/SGD.

Tren penguatan serupa dialami oleh ringgit Malaysia (MYR) di kisaran 39,77 JPY/MYR, dan Vietnam (VND) yang menguat kumulatif 15,8 persen, serta rupiah Indonesia (IDR) di level 0,0090 JPY/IDR.

Perbedaan performa ini berakar pada pengelolaan kebijakan moneter yang proaktif dan kondisi fiskal ASEAN yang jauh lebih sehat.

Otoritas moneter di ASEAN menerapkan respons kebijakan yang lebih fleksibel, seperti Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang menggunakan mekanisme nilai tukar efektif nominal (SGD-NEER) untuk meredam inflasi.

Ditambah lagi, rasio utang pemerintah terhadap PDB di sebagian besar negara ASEAN berada pada tingkat yang aman, berkisar antara 70-80 persen, memberikan ruang kebijakan (policy space) yang kredibel bagi bank sentral tanpa dibayangi risiko kegagalan fiskal.

Berkah Utang dan Paradoks Remitansi Kawasan

Dinamika mata uang Jepang mentransmisikan dampak sistemik yang luas bagi arsitektur ekonomi regional melalui saluran perdagangan, investasi langsung, dan pengelolaan utang luar negeri.

Bagi negara-negara berkembang di Asia yang memiliki eksposur utang luar negeri signifikan dalam denominasi yen, seperti Pinjaman Pembangunan Resmi (ODA) dari JICA maupun surat utang Samurai Bonds, depresiasi yen justru membawa berkah fiskal yang masif.

Pelemahan yen terhadap mata uang lokal ASEAN secara otomatis menyusutkan nilai nominal pokok utang serta beban pembayaran bunga tahunan saat dikonversi ke dalam mata uang domestik.

Malaysia, misalnya, menikmati keuntungan finansial bersih yang diproyeksikan mencapai RM 500 juta hingga RM 600 juta saat obligasi Samurai senilai 200 miliar yen yang diterbitkan pada 2019 jatuh tempo pada tahun 2029.

Vietnam juga mencatat penurunan rasio utang pemerintah berkat konversi utang JICA ke mata uang dong yang menjadi lebih murah, memberikan mereka pembiayaan infrastruktur hijau berbiaya marjinal rendah.

Indonesia menempatkan posisinya sebagai salah satu perekonomian paling tangguh, dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap solid di kisaran 4,9-5,7 persen pada tahun 2026.

Pembangunan MRT Jakarta Fase I dan rencana perluasannya yang didanai pinjaman pemerintah Jepang menikmati penurunan beban kewajiban pembayaran dalam jangka panjang, meminimalkan beban subsidi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Resiliensi sektor riil Indonesia ditopang oleh struktur ekspor ke Jepang yang didominasi oleh komoditas primer seperti gas alam cair (LNG) dan batu bara.

Karena kontrak komoditas energi tersebut dihargai dalam dolar AS, pendapatan ekspor sepenuhnya terisolasi dari kejatuhan yen.

Namun, situasi di Filipina menghadirkan paradoks yang cukup getir. Pada sisi positif, proyek transportasi raksasa seperti Metro Manila Subway Phase 1 menikmati pemotongan beban cicilan jangka panjang.

Sayangnya, keuntungan fiskal ini harus dibayar mahal oleh penurunan daya beli rumah tangga secara instan.

Akibat kejatuhan nilai yen, kiriman uang dari para pekerja migran (OFW) di Jepang merosot tajam saat dikonversi ke peso, memukul daya beli keluarga mereka di tengah tekanan inflasi domestik.

Relokasi Industri dan Ancaman Unwinding Carry Trade

Dari sisi investasi langsung asing (FDI), hambatan struktural akut di dalam negeri Jepang seperti penyusutan populasi dan kelangkaan tenaga kerja tetap memaksa korporasi Jepang merelokasi kapasitas produksi ke ASEAN.

Rasio produksi luar negeri mereka bahkan merangkak naik ke level 36,1 persen pada tahun fiskal 2024, membuktikan ASEAN tetap menjadi pusat gravitasi investasi jangka panjang bagi industri Jepang.

Sebaliknya, kejatuhan yen justru memicu pembalikan arus modal berupa lonjakan investasi asing masuk (inward FDI) ke Jepang.

Singapura, melalui lembaga investasi negaranya (GIC), bergerak agresif menyalurkan modal jangka panjang untuk mengakuisisi hotel premium dan pusat logistik di pusat kota Tokyo dan Osaka memanfaatkan kekuatan daya beli dolar Singapura yang berada di puncak sejarah.

Kendati kawasan Asia menikmati sejumlah keuntungan neto, otoritas moneter di seluruh kawasan wajib mempertahankan kewaspadaan tinggi terhadap satu risiko sistemik terbesar, yakni potensi pelepasan posisi transaksi lindung nilai berbasis utang yen (yen carry trade).

Risiko sistemik akan meledak apabila terjadi pengetatan moneter yang mengejutkan dari BOJ menuju target tingkat bunga netral di kisaran 2,0 persen, atau intervensi valuta asing skala masif dari Kementerian Keuangan Jepang yang memicu apresiasi cepat pada nilai tukar yen.

Kenaikan nilai yen secara mendadak akan memaksa para pelaku pasar global melakukan penutupan posisi secara paksa (forced short covering) guna menghindari kerugian nilai tukar.

Transmisi dari proses pembongkaran posisi carry trade (unwinding carry trade) ini berjalan melalui penjualan massal aset-aset berisiko di pasar global untuk memperoleh likuiditas yen guna membayar kembali pinjaman mereka.

Oleh karena itu, bank sentral di kawasan regional seperti Bank Indonesia harus memperkuat kerangka kerja makroprudensial dan memperkuat kerja sama pertukaran mata uang bilateral (Bilateral Swap Arrangement) di tingkat ASEAN+3 guna mengantisipasi badai pembalikan likuiditas lintas batas.

Purbaya Tegaskan Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen: Kalau Lebih, Saya Potong Belanjanya

Sabtu, 4 Juli 2026 09:30 WIB

Isna Rifka Sri Rahayu, Andika Aditia

<https://money.kompas.com/read/2026/07/04/093042526/purbaya-tegaskan-defisit-apbn-dijaga-di-bawah-3-persen-kalau-lebih-saya-potong>

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya di hadapan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026).

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau kondisi fiskal secara berkala, baik setiap pekan maupun setiap bulan, agar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah tetap sejalan dengan kemampuan keuangan negara.

Menurut Purbaya, disiplin tersebut menjadi alasan pemerintah optimistis defisit APBN tidak akan menembus batas 3 persen PDB, meski sebelumnya sempat muncul kekhawatiran dari pelaku pasar.

"Jadi kita monitor kondisi fiskal setiap minggu, setiap bulan. Dulu sempat ribut kan? Oh, akan lewat lewat. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Analis di pasar bilang, oh lewat 3 persen. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Apa hasilnya? Saya potong aja belanjanya, turun kan? Itulah disiplin fiskal. Dan kita strict, mengacu batas 3 persen defisit dari PDB," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan berbagai program prioritas nasional tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.

Bahkan, Purbaya mengatakan dirinya tidak akan segan memangkas anggaran apabila defisit APBN berpotensi melampaui batas tersebut.

"Jadi itu, perkembangan program prioritas tetap jalan tapi fiskalnya kita kendalikan terus. Kalau melebihi, ya saya potong," ucapnya.

Mengutip siaran pers Kemenkeu, APBN merupakan instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat investasi pada sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karenanya, pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," kata Purbaya dalam siaran pers, Jumat.

Untuk mendukung target tersebut, APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga memperkuat pembiayaan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemerintah juga mengarahkan beasiswa LPDP agar lebih fokus pada bidang-bidang prioritas seperti sains, teknologi, rekayasa, matematika (STEM), kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, dan industri strategis lainnya.

"Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan. Karena itu, investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN," tuturnya.

Purbaya menegaskan, menjaga disiplin fiskal menjadi prasyarat agar APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber, melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menyediakan ruang fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.

Prospek Ekspor RI Semester II 2026 Dibayangi Tarif AS dan Pelemahan Harga Komoditas

Sabtu, 4 Juli 2026 12:58 WIB

Andika Aditia

<https://money.kompas.com/read/2026/07/04/125827326/prospek-ekspor-ri-semester-ii-2026-dibayangi-tarif-as-dan-pelemahan-harga>

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai prospek ekspor Indonesia pada semester II 2026 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) hingga tekanan pada harga komoditas global.

Yusuf mengatakan dampak penuh kebijakan tarif impor AS diperkirakan baru akan terasa pada paruh kedua tahun 2026 karena penyesuaian pesanan importir umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan.

"Efek kebijakan tarif AS kemungkinan baru akan terlihat lebih nyata pada semester kedua tahun ini," kata Yusuf seperti dikutip Antara, Sabtu (4/7/2026).

Selain dampak tarif AS, menurut dia, Indonesia juga perlu mengantisipasi potensi pengalihan pesanan ekspor ke negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Meksiko yang dinilai memiliki daya saing lebih tinggi di pasar Amerika Serikat.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), masih menghadapi tekanan siklus.

Sementara itu, permintaan logam industri dari China belum sepenuhnya pulih karena stimulus ekonomi negara tersebut berjalan lebih lambat dari perkiraan.

Meski demikian, Yusuf menilai masih terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang kinerja ekspor Indonesia.

Ia mencatat ekspor nonmigas Indonesia ke China pada periode Januari hingga Mei 2026 masih tumbuh 17,7 persen secara tahunan, sehingga dapat menjadi penyangga terhadap pelemahan permintaan dari pasar lainnya.

Selain itu, selama permintaan terhadap produk turunan nikel tetap terjaga, peluang pertumbuhan ekspor Indonesia masih terbuka.

"Dengan kondisi tersebut, saya memperkirakan pertumbuhan ekspor pada semester kedua akan berada di kisaran nol hingga dua persen, dengan risiko yang cenderung mengarah ke bawah apabila negosiasi tarif dengan Washington tidak menghasilkan pelonggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat saat ini masih dikenakan tarif universal sebesar 10 persen yang berlaku selama 150 hari hingga 24 Juli 2026.

Tarif tersebut merupakan pengganti sementara kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung AS.

Setelah masa berlaku tarif universal berakhir, Pemerintah AS akan menetapkan kebijakan tarif baru yang berlaku bagi negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Budi, terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pemerintah AS guna memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk mendorong sejumlah komoditas agar mendapatkan tarif nol persen.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Mei 2026 mencapai 22,45 miliar dolar AS (Rp403,7 triliun asumsi kurs Rp17.960) atau mengalami kontraksi 4,5 persen secara tahunan.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi melemahnya ekspor kelompok logam mulia dan perhiasan, bijih logam, terak dan abu, serta besi dan baja.

Berdasarkan sektor usaha, ekspor nonmigas masih didominasi industri pengolahan dengan nilai mencapai 19,05 miliar dolar AS (Rp342,2 triliun), meskipun mengalami kontraksi 3,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 20,43 persen menjadi 500 juta dolar AS (Rp8,98 triliun), sedangkan ekspor sektor pertambangan dan lainnya menyusut 7,03 persen menjadi 2,89 miliar dolar AS (Rp51,9 triliun).

Kredit Produktif Jadi Andalan Perbankan di Tengah Perlambatan Kredit Konsumsi

Sabtu, 4 Juli 2026 06:01 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Handoyo

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-produktif-jadi-andalan-perbankan-di-tengah-perlambatan-kredit-konsumsi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan kredit produktif semakin menjadi penopang utama industri perbankan nasional di tengah melambatnya laju kredit konsumsi.

Peningkatan permintaan pembiayaan dari sektor korporasi, khususnya untuk investasi dan modal kerja, mencerminkan mulai pulihnya aktivitas dunia usaha meski daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya bangkit.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, kredit konsumsi per Mei 2026 hanya tumbuh 5,8% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.383,1 triliun. Capaian tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 6% pada April 2026.

Sebaliknya, kredit produktif menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan. Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 7,9% YoY menjadi Rp3.702,5 triliun pada Mei 2026, meningkat dari pertumbuhan 5,8% pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama ditopang oleh pembiayaan ke sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Sementara itu, kredit investasi (KI) menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi. Hingga Mei 2026, kredit investasi tumbuh 20,5% YoY menjadi Rp2.673,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 18,4% pada April 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh pembiayaan ke sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan, serta transportasi dan komunikasi.

Kredit Produktif Cerminkan Pemulihan Dunia Usaha

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai pergeseran pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan mulai pulihnya ekspansi dunia usaha. Di sisi lain, permintaan kredit konsumsi masih tertahan akibat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

"Pertumbuhan kredit produktif yang melampaui kredit konsumsi mencerminkan mulai pulihnya ekspansi sektor usaha, sementara daya beli masyarakat masih tertahan sehingga permintaan kredit konsumsi belum optimal," ujar Trioksa kepada Kontan.co.id, Kamis (2/7).

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong perbankan meningkatkan porsi penyaluran kredit produktif. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti perbankan mengabaikan segmen kredit konsumsi.

"Permintaan pembiayaan dari korporasi lebih kuat, nilai pembiayaannya lebih besar, dan risikonya relatif lebih terukur melalui analisis arus kas usaha," katanya.

Trioksa memperkirakan kredit produktif akan tetap menjadi mesin pertumbuhan industri perbankan hingga akhir 2026. Kredit investasi diproyeksikan masih mampu tumbuh dua digit, sementara secara keseluruhan kredit produktif berpotensi meningkat sekitar 9% hingga 12%, sejalan dengan target pertumbuhan kredit industri.

Sejumlah sektor dinilai masih memiliki prospek cerah sebagai tujuan penyaluran pembiayaan, antara lain hilirisasi industri, manufaktur, pangan dan pertanian, energi, infrastruktur, logistik, kesehatan, ekonomi digital, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi dalam rantai pasok industri.

"Untuk memanfaatkan momentum tersebut, bank perlu memperkuat pembiayaan berbasis ekosistem dan supply chain, memprioritaskan debitur dengan fundamental serta arus kas yang kuat, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, dan profitabilitas," ujarnya.

KB Bank Fokus Perbesar Kredit Produktif

Strategi memperbesar porsi kredit produktif juga diterapkan PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank). Presiden Direktur KB Bank, Kunardy Darma Lie, mengatakan perseroan akan lebih agresif menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau sektor produktif, tentu kami akan lebih fokus ke sana. Kami ingin mendukung perusahaan-perusahaan agar lebih produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia," ujar Kunardy.

Meski demikian, KB Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran kredit.

Menurut Kunardy, perseroan tetap menjalankan kebijakan kredit (credit policy) secara prudent, sembari membuka ruang pertumbuhan secara terukur pada segmen ritel.

"Kualitas aset tetap menjadi prioritas utama. Prinsip kami adalah quality first, then scale," katanya.

Ia menambahkan, pembiayaan akan diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki fundamental bisnis kuat dan mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi.

"Strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkelanjutan akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan industri perbankan ke depan," ujarnya.

Citi Indonesia: Permintaan Kredit Korporasi Masih Solid

Optimisme terhadap kredit produktif juga disampaikan Citibank N.A. Indonesia (Citi Indonesia). CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, mengatakan permintaan pembiayaan dari segmen korporasi masih menunjukkan tren yang solid.

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan korporasi, Citi Indonesia masih mencatat permintaan kredit yang relatif seimbang antara kebutuhan modal kerja (working capital) dan belanja modal (capital expenditure).

"Kami melayani empat segmen utama, yakni korporasi lokal, lembaga keuangan, sektor publik, dan perusahaan multinasional," ujar Batara.

Menurutnya, keseimbangan permintaan pembiayaan masih terlihat baik dari perusahaan multinasional maupun korporasi domestik.

"Kami masih melihat permintaan pembiayaan yang seimbang, baik untuk kebutuhan modal kerja guna mendukung operasional perusahaan maupun untuk belanja modal (capex)," kata Batara.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas investasi dan operasional dunia usaha masih terus berjalan, meskipun ketidakpastian ekonomi global belum sepenuhnya mereda.

Rupiah Diproyeksi Fluktuatif Pekan Depan, Ini Faktor Penggerak

Sabtu, 4 Juli 2026 15:34 WIB

Reporter: Alya Fathinah, Editor: Handoyo

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-diproyeksi-fluktuatif-pekan-depan-ini-faktor-penggerak>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp 17.900 per dolar AS. Meskipun berhasil menguat pada penutupan perdagangan akhir pekan, pergerakan mata uang Garuda masih dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik yang membuat volatilitas diperkirakan berlanjut.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,18% ke level Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (3/7), dibandingkan posisi sehari sebelumnya di Rp 17.995 per dolar AS. Sepanjang pekan ini, level Rp 17.995 per dolar AS yang tercatat pada Kamis (2/7/2026) menjadi titik pelemahan terdalam rupiah.

Penguatan rupiah juga tercermin pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia. Nilai tukar referensi tersebut naik 0,19% menjadi Rp 17.960 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.994 per dolar AS.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah pada akhir pekan lebih banyak didorong oleh perpaduan faktor global dan domestik.

Sentimen Global Masih Mendominasi Pergerakan Rupiah

"Pergerakan rupiah masih sangat dipengaruhi sentimen global, terutama arah kebijakan suku bunga The Fed dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah," ujar Ibrahim, Jumat (3/7/2026).

Dari sisi eksternal, perhatian pelaku pasar masih tertuju pada perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan optimistis bahwa Iran telah menyetujui hampir seluruh poin penting dalam perundingan.

Namun, laporan Wall Street Journal menyebut Teheran menolak usulan terkait Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencairan aset yang selama ini dibekukan.

Situasi tersebut membuat risiko geopolitik masih membayangi pasar keuangan global, meskipun kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dunia mulai berkurang. Investor kini menunggu perkembangan terbaru negosiasi AS-Iran sekaligus mencermati prospek permintaan minyak global.

Selain faktor geopolitik, pelemahan dolar AS juga dipicu oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi pasar.

Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (BLS) menunjukkan ekonomi AS hanya mampu menciptakan 57.000 lapangan kerja baru pada Juni, jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pasar sebesar 110.000. Sementara itu, data Mei juga direvisi turun menjadi 129.000 dari sebelumnya 172.000.

Di sisi lain, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 4,2% dari 4,3%. Adapun rata-rata upah per jam meningkat 0,3% secara bulanan dan 3,5% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Menurut Ibrahim, data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa ruang bagi Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga semakin terbatas.

Ibrahim menyebut berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada September turun menjadi 51% dari sebelumnya 63%.

Perlambatan Penerimaan Pajak Jadi Sorotan dari Dalam Negeri

Dari faktor domestik, Ibrahim juga menilai perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan berpotensi memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Mengacu pada laporan OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026, penerimaan pajak atas penghasilan, laba, dan keuntungan modal pada 2024 tercatat sebesar Rp 1.061,94 triliun. Angka tersebut hanya tumbuh 0,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 1.061,24 triliun.

Kenaikan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total penerimaan pajak nasional yang meningkat sekitar Rp 103 triliun menjadi Rp 2.620,67 triliun sepanjang 2024.

Perlambatan terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak penghasilan badan yang turun dari Rp 829,66 triliun pada 2023 menjadi Rp 818,30 triliun pada 2024. Sebaliknya, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih menunjukkan pertumbuhan, yakni dari Rp 231,59 triliun menjadi Rp 243,64 triliun.

"Meski mulai melambat, pajak penghasilan masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara," kata Ibrahim.

Proyeksi Rupiah Pekan Depan

Dengan berbagai sentimen yang masih berkembang, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada pekan depan akan tetap berfluktuasi.

Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp 17.850 hingga Rp 18.100 per dolar AS, seiring pelaku pasar terus mencermati perkembangan kebijakan moneter The Fed, dinamika geopolitik di Timur Tengah, serta kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

KEK Industropolis Batang Dorong SDM Lokal Siap Masuk Industri Global

Sabtu, 4 Juli 2026 08:31 WIB

Reporter: Dina Mirayanti Hutaeruk, Editor: Dina Hutaeruk

<https://industri.kontan.co.id/news/kek-industropolis-batang-dorong-sdm-lokal-siap-masuk-industri-global>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang terus berupaya memperkuat daya saing sebagai destinasi investasi berkelas dunia. Komitmen itu kembali ditunjukkan melalui penutupan Program Resiliensi untuk Industri Masa Depan (PRIMA) 2026.

Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja industri masa depan dengan menyiapkan SDM lokal yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga matang secara mental dan fisik sebelum memasuki lingkungan produksi.

Plt. Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Indri Septa Respati, menegaskan bahwa transformasi industri modern menuntut pendekatan baru dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, kesiapan tenaga kerja tidak cukup dibangun di ruang kelas, melainkan harus terintegrasi langsung dengan kebutuhan industri.

“Melalui PRIMA, kami menyusun kurikulum berbasis kebutuhan nyata industri, yang dipadukan dengan praktik kerja lapangan. Ini menjadi jaminan bagi tenant dan calon investor bahwa KEK Industropolis Batang memiliki ekosistem SDM yang siap pakai dan berkelanjutan,” ujar Indri dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Program PRIMA 2026 menjadi bagian dari strategi jangka panjang KEK Industropolis Batang dalam membangun ekosistem industri yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kebutuhan global, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap kesiapan kawasan sebagai pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia.

Selama lima hari, peserta PRIMA 2026 mendapat pembekalan langsung dari praktisi HR sejumlah perusahaan global yang beroperasi di KEK Industropolis Batang, seperti PT KCC Glass Indonesia, PT Wavin Manufacturing Indonesia, PT Unipack Plasindo, PT Yih Quan Footwear, PT Profinder Solusi Indonesia, dan PT Ace Medical Products.

Selain materi kelas, peserta juga melakukan kunjungan industri ke PT Unipack Plasindo, PT Trax Sumbiri, dan PT Wavin Manufacturing untuk melihat langsung standar kerja dan proses produksi berstandar global.

Program ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, menilai PRIMA bukan hanya membangun infrastruktur industri, tetapi juga membentuk SDM unggul. Ia menegaskan bahwa peserta merupakan aset daerah yang akan menjadi motor penggerak industri, sekaligus bukti kesiapan Batang dalam menyambut investasi berskala global.

Dari sisi pendidikan vokasi, Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Jawa Tengah, Agus Nowo Edy, menyebut PRIMA 2026 sebagai lompatan besar dalam konsep link and match. Tahun ini, program melibatkan 8 SMK dengan 160 peserta, termasuk keterlibatan guru dalam proses pelatihan

bersama HR perusahaan. Ia menilai model ini sebagai standar baru integrasi pendidikan vokasi dengan industri.

Dengan dukungan Tim Jasa Psikologi Universitas Diponegoro dan pelatih kedisiplinan TNI dari PT Bintara Mitra Andalan, PRIMA 2026 juga dinilai efektif membentuk kesiapan mental dan kedisiplinan peserta. Sejumlah tenant seperti PT Ace Medical Products dan PT Elecmental Longteng bahkan langsung menyerap ratusan lulusan SMK lokal pascaprogram, memperkuat posisi KEK Industropolis Batang sebagai kawasan industri yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi tenaga kerja lokal.

Purbaya Pastikan Defisit APBN di Bawah 3%, Ekonomi RI Masih Tetap Kuat

Sabtu, 4 Juli 2026 14:56 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-pastikan-defisit-apbn-di-bawah-3-ekonomi-ri-masih-tetap-kuat>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.

Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih sekitar 40% terhadap PDB.

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40% terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).

Purbaya mengatakan fundamental perekonomian Indonesia masih kuat dan tidak mengarah pada kondisi krisis. Menurutnya, pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Ia menilai berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan yang menjadi dasar optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," katanya.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga penyempurnaan dan pengawasan akan terus dilakukan. Pemerintah juga telah melakukan langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana guna memastikan penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

Selain itu, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.

Rasio Pajak Indonesia Terendah ke-3 di Asia Pasifik, Apa Dampaknya?

Sabtu, 4 Juli 2026 07:41 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-pajak-indonesia-terendah-ke-3-di-asia-pasifik-apa-dampaknya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja penerimaan pajak Indonesia kembali mendapat sorotan. Laporan terbaru OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 mencatat rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya mencapai 11,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tax ratio terendah ketiga di antara 38 negara dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang disurvei.

Dalam daftar tersebut, Indonesia hanya berada di atas Bangladesh yang memiliki tax ratio 6,7% dan Timor-Leste sebesar 10,0%.

Sementara itu, sejumlah negara tetangga mencatat rasio pajak yang jauh lebih tinggi, seperti Malaysia 13,0%, Singapura 13,4%, Thailand 17,1%, Vietnam 17,2%, Filipina 18,1%, hingga China 19,5%.

OECD juga mencatat rata-rata tax ratio di kawasan Asia-Pasifik mencapai 19,7% pada 2024. Artinya, capaian Indonesia masih tertinggal sekitar 7,9 poin persentase dibandingkan rata-rata kawasan.

Bahkan, rata-rata negara anggota OECD telah mencapai 34,1%, sedangkan rata-rata kawasan Amerika Latin dan Karibia berada di level 21,7%.

Untuk diketahui, tax ratio merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara total penerimaan pajak dengan ukuran perekonomian atau PDB.

Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pajak untuk membiayai belanja negara dan pembangunan.

"Penerimaan pajak sebagai persentase dari PDB di kawasan Asia-Pasifik meningkat selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2024, didukung oleh aktivitas ekonomi yang tangguh di tengah melemahnya permintaan global serta ketidakpastian geopolitik dan perdagangan," dikutip dari laporan tersebut, Jumat (3/7).

Laporan tersebut juga menunjukkan masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pajak konsumsi.

Pada 2024, pajak atas barang dan jasa menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan dengan porsi sekitar 43,1% dari total penerimaan pajak.

Sementara kontribusi pajak kekayaan maupun iuran jaminan sosial masih relatif kecil dibandingkan banyak negara lain di kawasan.

Ekonomi Jateng Tumbuh 5,89% di Semester I/2026, Purbaya: Masih Perlu Diperkuat

Sabtu, 4 Juli 2026 09:20 WIB

Penulis: Siti Nur Arifa, Editor: Esther Fin Harini

<https://validnews.id/ekonomi/2026/07/04/ekonomi-jateng-tumbuh-589-di-semester-i2026-purbaya-masih-perlu-diperkuat-092000784>

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyorot kinerja APBN di Jawa Tengah, yang hingga semester I/2026 menunjukkan kondisi tetap terjaga di tengah berbagai tantangan perekonomian.

Dia merinci, pendapatan negara di Jawa Tengah telah terealisasi sebesar 46,56% dari target yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,33% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06% dari target yang ditetapkan.

"Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," kata Purbaya dalam kunjungan kerja ke kantor vertikal Kemenkeu di Semarang, Jumat (3/7).

Menkeu juga menyorot pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 5,89% di Semester I/2026. Dia mengatakan, catatan tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

Purbaya menegaskan, perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah.

Kendati, dia tidak menampik bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu didorong dengan penguatan terhadap sejumlah indikator ekonomi.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," imbuhnya.

Andil MBG dan KDMP

Dalam kesempatan sama, Menkeu juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Misalnya, untuk program MBG, Purbaya menggarisbawahi laporan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, program ini telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.

"Program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat," kata Purbaya.

Sementara itu untuk KDMP, di Jawa Tengah hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan dengan total lebih dari 43.000 volume transaksi.

"Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif," tandas Purbaya.

MBG di Jawa Tengah Jangkau 9,16 Juta Orang, Purbaya Paparkan Capaian Program Prioritas

Sabtu, 4 Juli 2026, 06:23 WIB

Isna Rifka Sri Rahayu, Andika Aditia

<https://money.kompas.com/read/2026/07/04/062355026/mbg-di-jawa-tengah-jangkau-916-juta-orang-purbaya-paparkan-capaian-program>

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat capaian sejumlah program prioritas pemerintah di Jawa Tengah hingga Semester I 2026, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dirinya terus mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kemenkeu di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Khusus program MBG, hingga pertengahan 2026 telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya bilang, program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Tercatat, program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja.

Untuk itu, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan ikut mengawal pelaksanaan program prioritas, termasuk MBG.

"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Selain MBG, Purbaya mencermati perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan dengan total lebih dari 43.000 volume transaksi.

"Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif," ucapnya.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa.

Purbaya mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus dipercepat untuk mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Menurut dia, keberhasilan berbagai program prioritas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki dampak yang langsung dirasakan masyarakat.

Untuk itu, APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Hingga Semester I 2026, pendapatan negara di Jawa Tengah telah terealisasi 46,56 persen dari target dan tumbuh 13,33 persen secara tahunan. Sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target.

Seiring dengan itu, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,89 persen, ditopang aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," tuturnya.

Vietnam dan Filipina Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas Versi Bank Dunia

Minggu, 5 Juli 2026 06:42 WIB

Reporter: Noverius Laoli, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/vietnam-dan-filipina-jadi-negara-berpendapatan-menengah-atas-versi-bank-dunia>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income) setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan status ini dinilai dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi kedua negara.

Mengutip Straitstimes.com, Minggu (5/7/2026, dengan perubahan tersebut, seluruh lima ekonomi utama di Asia Tenggara kini berada pada kelompok negara berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi. Kelompok tersebut terdiri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Vietnam sebelumnya berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina menempati kelompok yang sama sejak akhir 1980-an.

Bank Dunia menilai keberhasilan Vietnam didorong oleh model pertumbuhan berbasis ekspor, sementara ekonomi Filipina tumbuh lebih merata di berbagai sektor. Pertumbuhan negara itu tidak hanya ditopang satu industri, melainkan mencerminkan transformasi ekonomi yang lebih luas.

Pada 2025, pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Vietnam mencapai US\$ 4.970, sedangkan Filipina sebesar US\$ 4.850. Keduanya telah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar US\$ 4.636 untuk masuk kategori negara berpendapatan menengah atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari upaya memperkuat fondasi ekonomi dan menjaga pertumbuhan yang inklusif di tengah berbagai gejolak global maupun domestik.

Sementara itu, Vietnam yang menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia menargetkan pertumbuhan dua digit pada 2026. Target tersebut akan ditopang oleh berbagai reformasi yang ramah terhadap dunia usaha serta investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.

Meski demikian, tantangan masih membayangi, terutama bagi Filipina. Pemerintah negara itu telah memangkas target pertumbuhan ekonomi periode 2026–2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Sementara Togo naik dari kelompok berpendapatan rendah menjadi berpendapatan menengah bawah. Bank Dunia mencatat porsi negara berpendapatan rendah di dunia telah menyusut menjadi 11% dari 30% sejak 1987.

Akses Pendanaan Berpotensi Berkurang

Di balik peningkatan status tersebut, terdapat konsekuensi berupa berkurangnya akses terhadap pembiayaan pembangunan dengan bunga rendah dari lembaga internasional.

Filipina selama ini memanfaatkan pinjaman bersuku bunga di bawah pasar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, serta berbagai program sosial.

Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion menilai kenaikan status menunjukkan suatu negara semakin mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan fiskalnya secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan pembangunan akan berkurang.

Meski sebagian bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) dengan syarat lunak diperkirakan akan menurun, Balisacan menegaskan manfaat dari fundamental ekonomi yang semakin kuat serta akses pasar yang lebih baik diyakini akan lebih besar dibandingkan dampak pengurangan fasilitas pembiayaan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa status baru tersebut tidak berarti seluruh persoalan ekonomi telah terselesaikan. Ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan dan sebagian masyarakat Filipina tetap menghadapi tekanan ekonomi.

The Fed Pangkas Suku Bunga Berpotensi Kerek Harga Emas

Minggu, 5 Juli 2026 22:29 WIB

Immanuel Christian

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8239676/the-fed-pangkas-suku-bunga-berpotensi-kerek-harga-emas>

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai, arah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/the Fed) berpotensi menjadi sentimen positif bagi harga emas dunia. Dia menuturkan, sejumlah indikator ekonomi terbaru menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda sehingga peluang kenaikan suku bunga semakin kecil.

"Data ekonomi Amerika Serikat, terutama dari sektor ketenagakerjaan dan pengangguran, menunjukkan kondisi yang lebih mendingin dari ekspektasi. Di sisi lain, harga minyak mentah juga terus mengalami penurunan," ujar Ibrahim di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan, penurunan harga minyak berpotensi menekan inflasi di Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat The Fed diperkirakan memilih mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat, bahkan membuka peluang untuk memangkasnya apabila inflasi terus bergerak menuju target 2%.

“Kalau inflasi terus mendekati 2%, kemungkinan besar The Fed bukan lagi menaikkan suku bunga, tetapi justru akan menurunkannya. Itu menjadi sentimen yang sangat positif bagi harga emas,” katanya.

Menurut Ibrahim, ekspektasi penurunan suku bunga menjadi salah satu faktor yang mendorong harga emas kembali menguat. Ia memperkirakan tren kenaikan masih akan berlanjut apabila harga minyak tetap melemah dan inflasi Amerika Serikat terus terkendali.

“Momentum ini membuat harga emas dunia kembali menguat. Bahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, harga emas berpotensi kembali menembus level di atas 5.000 hingga akhir tahun,” ucapnya.

Selain faktor kebijakan moneter, Ibrahim menambahkan pergerakan harga emas juga dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan global. Menurut dia, perkembangan kedua faktor tersebut akan tetap menjadi perhatian pelaku pasar dalam beberapa bulan ke depan.

Sebelumnya, harga emas dunia bersiap mencatat kenaikan mingguan pertama dalam satu bulan setelah investor mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed). Sentimen tersebut muncul menyusul rilis data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan pasar.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (4/7/2026), harga emas spot melonjak 1,4% menjadi US\$ 4.182,28 per ons. Dengan capaian tersebut, logam mulia diperkirakan membukukan kenaikan sekitar 2,3% sepanjang pekan, sekaligus mengakhiri tren penurunan yang berlangsung selama empat pekan berturut-turut.

Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman terdekat naik sekitar 1,5% pada perdagangan intraday.

Sepanjang 2026, harga emas dunia berada di bawah tekanan. Kenaikan inflasi, menguatnya dolar AS, serta sikap agresif sejumlah bank sentral setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran membuat minat investor terhadap aset safe haven berkurang.

Akibat tekanan tersebut, emas mencatat kinerja kuartalan terburuk dalam 13 tahun pada periode April hingga Juni. Hingga kini, harga emas masih diperdagangkan sekitar 22% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa yang sempat menyentuh lebih dari US\$ 5.300 per ons pada Januari lalu.

Ruang The Fed Menaikkan Suku Bunga

Pemulihan harga emas pekan ini dipicu oleh laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dirilis pada Kamis waktu setempat. Data nonfarm payrolls menunjukkan ekonomi AS hanya menambah 57.000 lapangan kerja pada Juni.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan revisi data Mei yang mencapai 129.000 pekerjaan maupun proyeksi ekonom yang dihimpun Dow Jones sebesar 115.000 pekerjaan.

Laporan itu membuat pelaku pasar menilai ruang bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga semakin terbatas.

Berdasarkan alat pemantau FedWatch milik CME Group, pasar kini memperkirakan peluang sebesar 53,5% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada pertemuan September, setelah mempertahankan suku bunga pada Juli.

Angka tersebut turun dibandingkan sebelum data ketenagakerjaan dirilis. Saat itu, probabilitas kenaikan suku bunga pada September masih berada di kisaran 65%.

Ekspektasi suku bunga yang lebih rendah biasanya menjadi sentimen positif bagi emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil, sehingga lebih menarik ketika suku bunga diperkirakan tidak lagi naik agresif.

Harga Logam Lainnya juga Naik

Kenaikan tidak hanya terjadi pada emas. Harga logam mulia lainnya juga menguat pada perdagangan Jumat.

Harga perak spot melonjak 2,9% menjadi US\$ 62,77 per ons dan berpeluang mencatat kenaikan mingguan sekitar 6,7%. Sementara itu, kontrak berjangka perak untuk pengiriman Agustus naik sekitar 3,5%.

Di sisi lain, harga platinum menguat sekitar 2,8% menjadi US\$ 1.660,10 per ons, sedangkan palladium naik sekitar 1% ke level US\$ 1.280,09 per ons.

Dalam riset yang diterbitkan pada Jumat, analis OCBC menyatakan mulai lebih optimistis terhadap prospek harga emas setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan.

"Data nonfarm payrolls yang lebih lemah dari perkiraan membantu mengurangi risiko sikap agresif (hawkish) The Fed. Dalam jangka pendek, kami mengubah pandangan dari berhati-hati menjadi optimistis secara terukur. Harga emas berpeluang melanjutkan pemulihan apabila data ekonomi Amerika Serikat berikutnya terus menekan imbal hasil riil dan dolar AS," tulis analis OCBC.

Meski demikian, OCBC mengingatkan investor agar tidak terlalu cepat bereuforia. Menurut mereka, tingkat pengangguran yang masih stabil, sikap The Fed yang tetap cenderung hawkish, serta risiko inflasi yang belum mereda membuat investor tetap perlu berhati-hati.

"Dengan tingkat pengangguran yang masih stabil, pernyataan pejabat The Fed yang tetap bernada hawkish, serta risiko inflasi yang masih tinggi, investor tetap perlu bersikap hati-hati dalam jangka pendek," lanjut OCBC.

OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak

Minggu, 5 Juli 2026, 20:49 WIB

Agustina Melani

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8239627/opec-sepakat-dongkrak-produksi-minyak>

Liputan6.com, Jakarta - OPEC+ menyetujui kenaikan produksi lebih lanjut terkait target produksi mulai Agustus 2026. OPEC+ menambah pasokan global pada saat harga minyak turun di tengah pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap untuk ekspor minyak.

Mengutip CNBC, Minggu (5/7/2026), kelompok produsen minyak itu menyetujui meningkatkan kuota sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus 2026, di atas peningkatan serupa untuk Juni dan Juli.

Tujuh anggota inti OPEC+, yang terdiri dari OPEC dan produsen sekutu termasuk Rusia, telah menaikkan kuota produksi dari April-Juli hampir 800.000 barel per hari.

Namun, peningkatan itu sebagian besar tetap di atas kertas karena perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, yang menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal tanker bagi beberapa anggota OPEC+ terpenting, termasuk Arab Saudi, Kuwait dan Irak.

Produksi Mulai Pulih

Produksi OPEC+ turun menjadi 33,13 juta barel per hari pada Mei, menurut data OPEC dari 42,77 juta barel per hari pada Februari.

Produksi mulai pulih pada Juni berkat upaya Amerika Serikat (AS) untuk membantu Uni Emirat Arab (UEA) dan negara-negara OPEC+ lainnya mengeksport lebih banyak minyak, tetapi masih di bawah level sebelum perang.

Meskipun gangguan pasokan terus berlanjut, harga minyak telah kembali ke level sebelum perang, tertekan oleh impor China yang lebih rendah, ekspor yang lebih tinggi dari produsen nonTimur Tengah, dan pelepasan stok strategis global yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional.

"Kelompok tujuh negara terus mengurangi pemotongan produksi mereka seperti yang diperkirakan secara luas," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

"Fokus jangka pendek akan tetap pada berapa banyak kapal tanker yang akan berhasil melewati Selat Hormuz dan seberapa cepat permintaan dan impor minyak mentah China pulih," ia menambahkan.

Pasokan Bakal Kembali Normal

Nota kesepahaman antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang juga telah membantu meyakinkan pelaku pasar, pasokan pada akhirnya akan kembali normal.

Harga minyak mentah Brent diperdagangkan mendekati US\$ 72 per barel pada Jumat, turun dari puncak baru-baru ini lebih dari US\$ 120 per barel dan kembali ke tingkat yang diperdagangkan tepat sebelum AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari.

Selain menyepakati target produksi, OPEC+ juga menghadapi tantangan lain setelah Uni Emirat Arab meninggalkan kelompok tersebut dan Irak memberi sinyal mereka menginginkan kuota yang lebih tinggi.

OPEC+ mencakup 21 anggota, termasuk Iran, tetapi dalam beberapa tahun terakhir hanya tujuh negara, dan UEA, yang terlibat dalam manajemen produksi bulanan.

Ketujuh produsen tersebut, Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman, meningkatkan produksi sebagai bagian dari pengurangan bertahap pasokan sebesar 1,65 juta barel per hari yang disepakati pada 2023, ketika kelompok tersebut masih termasuk UEA.

Langkah OPEC

UEA meninggalkan aliansi tersebut pada akhir April untuk menyelaraskan kapasitasnya lebih dekat dengan produksinya, bebas dari pembatasan produksi yang diberlakukan oleh kelompok tersebut.

Mulai Agustus, dengan mempertimbangkan keluarnya UEA pada 1 Mei, ketujuh anggota inti tersebut masih akan memiliki sekitar 379.000 barel per hari dari pengurangan awal untuk dikembalikan ke pasar, menurut perhitungan Reuters.

Dengan peningkatan pada Agustus yang telah diputuskan, OPEC akan sepenuhnya membatalkan pengurangan 2023 jika melakukan satu kenaikan lagi dengan jumlah yang hampir sama untuk September pada pertemuan mereka berikutnya pada 2 Agustus.

Ekonom Buka-bukaan Soal Kondisi Ekonomi Indonesia: Memburuk, Tapi Belum Krisis!

Minggu, 5 Juli 2026 16:14 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-buka-bukaan-soal-kondisi-ekonomi-indonesia-memburuk-tapi-belum-krisis>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perekonomian Indonesia dinilai tengah mengalami perlambatan yang semakin nyata.

Pelemahan aktivitas manufaktur, munculnya defisit neraca perdagangan, hingga tekanan di pasar keuangan menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi sedang memburuk.

Meski demikian, situasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai krisis karena fundamental ekonomi nasional masih relatif terjaga.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa salah satu indikator yang paling jelas terlihat adalah merosotnya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 46,9.

Angka tersebut menandakan sektor manufaktur masih berada di zona kontraksi karena aktivitas produksi melemah.

"Yang perlu diperhatikan bukan hanya angkanya yang berada di bawah 50, tetapi juga karena pesanan baru, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja ikut menurun," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (5/7).

Menurutnya, penurunan pesanan baru dan ekspor mencerminkan melemahnya permintaan, baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

Di sisi lain, pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga energi, sehingga tekanan terhadap dunia usaha semakin besar.

Selain sektor manufaktur, Yusuf juga menyoroti defisit neraca perdagangan yang terjadi setelah Indonesia selama enam tahun berturut-turut mencatat surplus.

Namun, ia menilai defisit tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai anjloknya daya saing ekspor nasional.

Menurutnya, penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor minyak dan gas (migas) akibat kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus.

"Jadi, ini bukan berarti daya saing ekspor Indonesia tiba-tiba runtuh, melainkan menunjukkan bahwa kita masih rentan terhadap gejolak harga energi global," katanya.

Tekanan tersebut, lanjut Yusuf, kemudian tercermin di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi, dan arus dana asing keluar dari pasar saham meningkat.

Ia menilai kondisi tersebut merupakan respons pasar terhadap kombinasi perlambatan ekonomi domestik, meningkatnya inflasi, defisit perdagangan, serta suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi sehingga dolar AS tetap menguat.

Meski mengakui kondisi ekonomi sedang melambat, Yusuf menegaskan Indonesia belum memasuki fase krisis struktural.

Fundamental ekonomi masih cukup kuat, namun kemampuan untuk meredam guncangan eksternal mulai menipis.

"Fundamental ekonomi masih relatif terjaga, hanya saja ruang bantalnya menjadi lebih tipis sehingga kita lebih sensitif terhadap guncangan dari luar," imbuh Yusuf.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, Yusuf menyarankan pemerintah memprioritaskan tiga langkah.

Pertama, mengurangi tekanan dari defisit migas dengan mempercepat upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Kedua, menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas industri agar permintaan domestik kembali menguat.

Selain itu, ia menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kepastian kebijakan juga menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia

Bebas Visa Kunjungan RI Dipangkas Jadi 7+1 Negara, Devisa Bisa Naik Rp 36 Triliun

Minggu, 5 Juli 2026 16:33 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bebas-visa-kunjungan-ri-dipangkas-jadi-71-negara-devisa-bisa-naik-rp-36-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mematangkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sebagai upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyelaraskan implementasi kebijakan tersebut bersama sejumlah kementerian dan lembaga dengan pendekatan bertahap.

Tenaga Ahli Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Imam Priyono, mengatakan pembahasan kebijakan BVK berjalan secara intensif dan adaptif terhadap dinamika global.

"Mengenai perkembangan pembahasan, saat ini prosesnya berjalan sangat positif, intensif, dan adaptif terhadap dinamika global. Kebijakan BVK ini merupakan langkah strategis untuk mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia melalui penciptaan seamless experience bagi wisatawan mancanegara," ujar Imam kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, Kemenpar terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Ia menjelaskan, fokus koordinasi tidak semata membahas kendala implementasi, melainkan menyelaraskan proyeksi manfaat ekonomi pariwisata dengan aspek kepatuhan, keamanan, serta asas timbal balik (reciprocity) antarnegara.

Dalam proses tersebut, pemerintah melakukan pemetaan terhadap negara penerima BVK berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat belanja (spending), dan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Imam mengungkapkan, semula pemerintah mengusulkan 20 negara sebagai penerima fasilitas BVK. Namun, usulan tersebut kini disesuaikan menjadi 7+1 negara prioritas.

"Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global, khususnya ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur penghubung penting bagi wisatawan asal Eropa dan Amerika, serta arahan agar implementasi dilakukan secara bertahap dan terukur," jelasnya.

Menurut Imam, pemerintah ingin memastikan aspek keamanan, kesiapan sistem pengawasan, serta pembagian manfaat ekonomi berjalan secara seimbang sebelum kebijakan diperluas ke negara lain.

Terkait target implementasi, Imam mengatakan pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan maupun penambahan negara penerima BVK. Saat ini, proses evaluasi masih mengacu pada data historis sejak 2016 serta indikator keterbukaan internasional (international openness) Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) World Economic Forum.

"Penentuan negara penerima dan lini masa implementasinya harus dipastikan matang agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi kreatif," ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Kemenpar memperkirakan kebijakan BVK berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara secara signifikan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap 20 negara yang semula diusulkan, kebijakan tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 32,4% dibandingkan basis realisasi 2018.

Dengan peningkatan tersebut, potensi tambahan devisa pariwisata diperkirakan mencapai Rp 15,61 triliun hingga Rp 36,13 triliun.

Imam menambahkan, saat ini jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masih lebih besar dibandingkan warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, kemudahan akses melalui kebijakan BVK diyakini akan mendorong peningkatan belanja wisatawan asing di dalam negeri.

"Ketika proses menuju Indonesia menjadi semudah memesan tiket, peningkatan kunjungan akan linear dengan belanja wisatawan di Tanah Air. Devisa tersebut akan menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membantu menekan arus modal keluar dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat," tutupnya.

Ekonomi Indonesia Hadapi Permacrisis, Risiko PHK Massal Meningkat

Minggu, 5 Juli 2026 15:08 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-hadapi-permacrisis-risiko-phk-massal-meningkat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi yang disebut sebagai "permacrisis", yakni krisis yang dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, tantangan tersebut berasal dari tekanan global maupun persoalan domestik yang saling memperkuat sehingga meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.

"Mulai dari faktor eksternal ada gejolak, fluktuasi harga energi, geopolitik, sampai dalam negerinya ada masalah keterbatasan ruang fiskal yang semakin menyempit," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).

Menurut Bhima, persoalan domestik semakin memperberat kondisi ekonomi. Hal tersebut tercermin dari menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah, melemahnya aktivitas industri manufaktur, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Ia menilai kombinasi berbagai tekanan tersebut menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat.

Bhima memperingatkan, apabila kondisi ini terus berlangsung, Indonesia berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar, terutama di sektor industri manufaktur. "Ini kalau terus berlangsung efeknya kita akan menghadapi bom waktu PHK massal," katanya.

Menurutnya, industri otomotif dan elektronik menjadi sektor yang paling rentan karena sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta tekanan biaya produksi yang terus meningkat.

Ia juga memperkirakan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia akan melakukan penyesuaian harga produk dalam tiga bulan mendatang sebagai dampak kenaikan biaya produksi.

Kenaikan harga tersebut, lanjut Bhima, berisiko menekan daya beli masyarakat. Jika konsumen tidak lagi mampu membeli produk elektronik maupun otomotif dengan harga yang lebih tinggi, perusahaan diperkirakan akan melakukan langkah efisiensi.

Salah satu langkah efisiensi yang bisa dilakukan adalah pengurangan sekitar 10% tenaga kerja.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Bhima meminta pemerintah segera memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi melalui perombakan tim ekonomi dan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada dunia usaha.

Ia menilai program pemerintah seharusnya tidak menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, melainkan memberikan dukungan kepada pelaku usaha, terutama melalui upaya menekan biaya produksi.

Selain itu, Bhima juga mendorong pemerintah memberikan stimulus khusus kepada kelompok masyarakat kelas menengah yang dinilai menjadi motor utama konsumsi domestik.

"Itu yang harusnya dilakukan dalam jangka pendek ini, karena kalau dibiarkan maka situasinya akan mengarah dari permacrisis menjadi gejolak sosial," pungkasnya.

Ekonom Menilai Perluasan Kawasan Tiga KEK Belum Cerminkan Minat Investasi Nasional

Minggu, 5 Juli 2026 14:25 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-menilai-perluasan-kawasan-tiga-kek-belum-cerminkan-minat-investasi-nasional>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengajukan perluasan area karena kapasitas kawasan telah terpakai seluruhnya.

Pemerintah menilai kondisi tersebut mencerminkan tingginya minat investasi, khususnya di KEK berbasis manufaktur.

Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pengajuan ekspansi lahan belum bisa langsung diartikan sebagai meningkatnya minat investasi secara nasional.

Menurut Rendy, perluasan kawasan hanya menunjukkan kebutuhan tambahan kapasitas di sejumlah KEK yang telah penuh, bukan mencerminkan realisasi investasi di seluruh kawasan ekonomi khusus.

"Memang ada sinyal bahwa minat investasi di beberapa KEK sangat kuat. Namun, pengajuan perluasan lahan tidak bisa langsung diartikan sebagai tingginya minat investasi secara nasional karena perluasan kawasan baru mencerminkan kebutuhan kapasitas, bukan realisasi investasi," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).

Ia mencatat, dari sekitar 25 KEK yang beroperasi di Indonesia, baru tiga kawasan yang benar-benar mencapai kapasitas maksimal. Hal tersebut menunjukkan minat investor masih terkonsentrasi pada kawasan yang memiliki daya saing tinggi, belum tersebar merata ke seluruh KEK.

Oleh karena itu, Yusuf menilai pemerintah perlu membedakan kebutuhan ekspansi dari perspektif kawasan dan nasional. Perluasan lahan memang diperlukan bagi KEK yang telah penuh agar peluang investasi tidak berpindah ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus mempercepat perbaikan infrastruktur, pasokan listrik, konektivitas logistik, serta kepastian perizinan di KEK yang tingkat keterisiannya masih rendah agar lebih menarik bagi investor.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Moegiarso mengatakan, rata-rata KEK yang mengajukan ekspansi meminta tambahan lahan hingga dua kali lipat.

"Dengan usul perluasan artinya apa? Kapasitasnya itu sudah utilize semuanya, sudah terpakai, sehingga pada saat akan ada investasi masuk yang baru, investor asing yang masuk, nah ini mereka mengajukan perluasan lahan, dan rata-rata dua kali lipat," kata Susi Wijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Susi Wijono, tiga KEK yang telah mengajukan perluasan yakni KEK Kendal di Jawa Tengah, KEK Gresik di Jawa Timur, dan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau.

KEK Kendal telah mencapai tingkat keterisian 100% dengan sekitar 140 industri yang bergerak di sektor elektronik, tekstil, peralatan rumah tangga, hingga rantai pasok industri baterai seperti anoda dan katoda di lahan seluas sekitar 1.000 hektare.

"Nah itu dengan luas KEK hanya sekitar 1.000 hektare, mereka sudah penuh dan mengajukan (tambahan area) lagi sekarang. Perluasan 1.000 hektare di sebelahnya," ujarnya.

Selain itu, KEK Galang Batang mengusulkan tambahan lahan seluas 2.700 hektare untuk mengakomodasi industri pengolahan bauksit, pengembangan alumina menjadi produk hilir hingga refinery.

Pemerintah juga melihat investasi pusat data (data center) akan menjadi salah satu motor pertumbuhan investasi di KEK. Saat ini terdapat sekitar 10 perusahaan data center di KEK Nongsa Digital Park, Batam, dan pemerintah mendorong investasi serupa masuk ke kawasan lain.

Kapasitas data center nasional yang baru sekitar 600 megawatt (MW) dinilai masih jauh dari kebutuhan, terutama dengan rencana investasi grup DAMAC asal Uni Emirat Arab yang mencapai sekitar 1,2 hingga 1,3 gigawatt (GW).

"Ada perkiraan kok, setiap 1 megawatt data center itu perlu beberapa juta USD. Nah kalau 1,2 gigawatt atau 1,3 gigawatt, kan berarti 1.300 kali jutaan USD, pasti miliar USD," ungkap Susiwijono.

Pertumbuhan Solid, Paket Stimulus Dikururkan Pemerintah Gaspol Ekonomi 8 Persen

Minggu, 5 Juli 2026 06:45 WIB

Reporter : Novalliandy, Editor : Fazry

<https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/316544/pertumbuhan-solid-paket-stimulus-dikururkan-pemerintah-gaspol-ekonomi-8-persen>

RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global.

Berbagai kebijakan fiskal, stimulus ekonomi, hingga perluasan investasi disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional dan berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Kinerja tersebut didukung inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif, serta cadangan devisa yang tinggi.

"Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun," kata Airlangga di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, paket stimulus tersebut meliputi bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional mulai Juli 2026, program vokasi, dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan.

Sementara itu, diplomasi perdagangan diperluas melalui berbagai perjanjian internasional, pembentukan financial center di Bali, serta pengembangan proyek energi hijau.

Airlangga menilai, kondisi global saat ini justru menjadi peluang bagi dunia usaha untuk memperluas investasi karena harga barang modal lebih kompetitif.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” ujarnya.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pemerintah juga memperkuat pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Termasuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah eksportir dengan bunga yang kompetitif.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” kata Purbaya.

Dia menegaskan laju pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan secara bertahap menuju kisaran 6 persen sebelum mencapai target 8 persen.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai, sejumlah sektor berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru apabila didorong secara konsisten.

“Beberapa sektor yang dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru antara lain, industri pengolahan melalui manufaktur dan hilirisasi, ekonomi hijau dan biru, ekonomi digital, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Esther kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Esther, industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan karena mampu menciptakan lapangan kerja formal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekspor melalui hilirisasi sumber daya alam.

Pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, serta pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai memiliki prospek besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Esther mengingatkan Pemerintah tetap perlu mewaspadaai tingginya ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga.

“Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah tetap harus mewaspadaai risiko perlambatan output, meningkatnya pengangguran, serta bertambahnya beban fiskal akibat gejolak harga minyak global,” ujarnya. NOV

Harga Daging Sapi dan Bawang Putih Kompak Naik

Minggu, 5 Juli 2026 18:00 WIB

Immanuel Christian

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8239502/harga-daging-sapi-dan-bawang-putih-kompak-naik>

Liputan6.com, Jakarta - Harga sejumlah komoditas pangan nasional masih menunjukkan tren kenaikan pada awal Juli 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per

3 Juli 2026, kenaikan terjadi pada beberapa jenis beras, bawang putih, dan daging sapi, meski sebagian komoditas lain seperti cabai dan bawang merah mulai mengalami koreksi harga.

Kenaikan harga paling menonjol terjadi pada bawang putih ukuran sedang. Komoditas ini naik 0,92% atau sekitar Rp 400 dibandingkan periode sebelumnya sehingga rata-rata dijual Rp 44.100 per kg.

Kenaikan tersebut menjadikan bawang putih sebagai salah satu bahan pangan yang masih mengalami tekanan harga di tengah tren pelemahan sejumlah komoditas hortikultura.

Pada kelompok beras, kenaikan masih terjadi meski relatif terbatas. Beras kualitas bawah I naik 0,34% menjadi Rp 14.700 per kg. Beras kualitas medium II juga meningkat 0,31% menjadi Rp 16.150 per kg, sedangkan beras kualitas super I naik 0,28% menjadi Rp 17.650 per kg.

Sementara itu, beras kualitas medium I dan super II tercatat stabil, sedangkan beras kualitas bawah II justru turun tipis menjadi Rp 14.500 per kg.

Meski rata-rata harga nasional masih terkendali, terdapat perbedaan harga antarwilayah. Untuk beras kualitas bawah I, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan harga terendah sebesar Rp 13.800 per kg. Harga di DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan masing-masing mencapai Rp 14.400 per kg, sementara Jawa Timur berada di level Rp 15.000 per kg. Sumatera Utara dan Jawa Barat mencatat harga Rp 15.150 per kg.

Tekanan harga juga terlihat pada komoditas daging sapi. Harga daging sapi kualitas I naik 0,17% menjadi Rp 150.250 per kg, sedangkan kualitas II meningkat lebih tinggi sebesar 0,32% menjadi Rp 141.500 per kg.

Harga Bawang Merah Turun

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas justru mengalami penurunan. Bawang merah ukuran sedang turun 6% menjadi Rp 47.800 per kg. Penurunan juga terjadi pada cabai merah besar sebesar 5,52% menjadi Rp 50.500 per kg, cabai merah keriting turun 4,14% menjadi Rp 50.900 per kg, cabai rawit hijau turun 3,96% menjadi Rp 49.750 per kg, dan cabai rawit merah turun 7,93% menjadi Rp 62.100 per kg.

Komoditas lain seperti daging ayam ras segar turun 1,21% menjadi Rp 36.600 per kg, gula pasir lokal turun 0,26% menjadi Rp 19.050 per kg, gula pasir premium turun 0,25% menjadi Rp 20.250 per kg, serta telur ayam ras segar turun 1,35% menjadi Rp 29.250 per kg. Adapun minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan tercatat tidak mengalami perubahan harga.

APBD Jateng Dipuji Kemenkeu, Ahmad Luthfi Beberkan Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 5 Juli 2026 11:19 WIB

Bambang H Irwanto, Wahyu Nurdyanto

<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/597538/apbd-jateng-dipuji-kemenkeu-ahmad-luthfi-beberkan-strategi-jaga-pertumbuhan-ekonomi>

Magelang – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Semester I 2026 mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ruang fiskal yang terbatas, APBD Jawa Tengah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi pemerintah provinsi yang memprioritaskan belanja daerah pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"APBD harus kita gunakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," ujar Ahmad Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sektor-sektor produktif. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh meski menghadapi tantangan ekonomi global.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp110,02 triliun, sedangkan pada triwulan I 2026 telah menembus sekitar Rp23 triliun.

Peningkatan investasi tersebut turut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada triwulan I 2026, sekitar 92 ribu tenaga kerja berhasil terserap, dengan investasi yang masih didominasi sektor padat karya.

Selain itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga menunjukkan tren penurunan, dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen.

"Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, perbankan, hingga sektor swasta," kata Luthfi.

Ia menambahkan, masyarakat dan media massa juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif menjadi bagian penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi terhadap kinerja APBD Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (3/7/2026).

Purbaya menjelaskan, realisasi pendapatan daerah hingga Semester I 2026 telah mencapai 46,56 persen dari target yang ditetapkan atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai 52,06 persen dari target.

"Hal itu menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," ujar Purbaya.

Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,89 persen mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang didukung oleh sektor industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut turut diperkuat oleh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah," ucapnya. (*)

Pemprov Jateng Ungkap Kelanjutan Proyek Wisata Terbesar di Asia Tenggara Ini

Minggu, 5 Juli 2026 16:31 WIB

Afif Khoirul Muttaqin, Anggara Wikan Prasetya

<https://travel.kompas.com/read/2026/07/05/163100827/pemprov-jateng-ungkap-kelanjutan-proyek-wisata-terbesar-di-asia-tenggara-ini?page=all#page2>

KOMPAS.com - Proyek Jateng Valley di Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, yang sempat mangkrak akan dihidupkan kembali.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan revitalisasi kawasan wisata seluas 371,88 hektare ini masuk agenda prioritas.

Sebelumnya, Jateng Valley digadang-gadang bakal jadi destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara.

Proyek ini sudah groundbreaking pada (15/8/2020) bertepatan HUT ke-70 Jawa Tengah. Namun hingga 2026, pembangunan fisik terhenti.

Dilansir dari Tribun Banyumas, Minggu (5/7/2026) kondisi terkini, skate park yang pengerjaannya diklaim 95 persen kini rusak dan tertutup ilalang liar.

Lahan seluas 371,88 hektare di Wana Wisata Penggaron, Ungaran Timur, itu terbengkalai.

Sekda Jateng Sumarno menyebut penyebab utama mangkraknya proyek adalah investor yang tidak mampu mengeksekusi pembangunan sesuai rencana.

“Kendalanya kemarin dari sisi investor yang terlambat untuk mengeksekusi,” kata Sumarno di Kantor Gubernur Jateng.

Pemprov kini mulai melakukan asesmen untuk menentukan langkah lanjutan pengembangan Jateng Valley.

“Kemarin saya sudah minta teman-teman untuk asesmen untuk melanjutkan itu seperti apa,” ujar Sumarno.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Pemprov akan melakukan asistensi dan revitalisasi kawasan tersebut sebagai bagian optimalisasi aset daerah.

“Kami lakukan asistensi dan revitalisasi terkait potensi ini... dari aset kami akan berjalan ke sana untuk melakukan revitalisasi,” ujar Luthfi usai menerima kunjungan DPR RI, Rabu (1/7/2026).

Luthfi menekankan pentingnya revitalisasi aset daerah agar potensi tiap kawasan maksimal dan memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemulihan Jateng Valley akan diselaraskan dengan kebutuhan pemanfaatan wilayah.

Skala Proyek, Rp 2 Triliun, 5 Zona Wisata

Jateng Valley dikembangkan lewat skema build operate transfer (BOT) antara Perhutani, PT Penggaron Sarana Semesta, dan PT Taman Wisata Jateng. Nilai investasi diproyeksikan sekitar Rp 2 triliun.

Konsep pembangunan dibagi 5 zona, Theme Park, Cultural Park, Eco Safari Park, Water Park, dan Zona Outdoor Activity.

Targetnya, menjadi destinasi berskala internasional dengan green certificate karena 2/3 wisatawan mancanegara lebih suka area wisata berwawasan lingkungan.

Menurut Jatengprov.go.id, Kamis (12/3/2020) proyek ini masuk RpJMD 2018-2023 dan Perpres 79/2019 sebagai objek strategis setara PSN. PT Taman Wisata Jateng akan mengelola selama 35 tahun.

Pengembang berharap terjadi multiplier effect lewat serapan tenaga kerja dan peningkatan usaha pendukung wisata warga sekitar. Perhutani juga berharap proyek ini memberi efek lanjutan lewat perekrutan warga setempat.

Meski sempat tertunda sejak 2010 dan kembali terhenti pasca-2020, Gubernur Ganjar Pranowo saat peletakan batu pertama tahun 2020, menyebut Jateng Valley bagian dari survival ekonomi di tengah pandemi.

“Potensi-potensi ekonomi kita gerakkan... Jateng Valley ini adalah salah satunya,” ujarnya.

Pemprov Jateng kini menyiapkan asesmen menyeluruh. Jika dilanjutkan, Jateng Valley diproyeksikan jadi ikon wisata baru yang membangkitkan ekonomi Jawa Tengah dan menyerap ribuan tenaga kerja.

Inflasi Thailand Melandai, Suku Bunga BOT Diproyeksi Tak Berubah

Senin, 6 Juli 2026 16:00 WIB

Suttinee Yuvejwattana dan Anuchit Nguyen

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114072/inflasi-thailand-melandai-suku-bunga-bot-diproyeksi-tak-berubah/2>

Bloomberg, Laju inflasi Thailand bergerak melambat selama dua bulan berturut-turut pada bulan Juni. Kendati tekanan harga di tingkat dasar terus merangkak naik, kondisi ini memperkuat pandangan bank sentral bahwa lonjakan harga baru-baru ini belum memerlukan kenaikan suku bunga acuan dalam waktu dekat.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan Thailand pada hari Senin (6/7), indeks harga konsumen (IHK) naik 2,42% secara tahunan (year-on-year) pada bulan Juni. Angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan posisi bulan Mei yang sempat menyentuh 2,79%. Realisasi tersebut juga berada di bawah nilai tengah (median) estimasi dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom yang memproyeksikan angka 2,7%.

Melandainya inflasi utama ini mengindikasikan bahwa dampak dari kenaikan harga minyak dunia tahun ini kemungkinan telah mencapai puncaknya pada bulan April lalu. Hal ini sekaligus meredakan kekhawatiran bahwa tingginya biaya energi akan bertahan lebih lama di Thailand, yang merupakan salah satu negara importir minyak terbesar di kawasan Asia Tenggara. Para ekonom juga memperkirakan inflasi di Filipina, yang akan merilis data Juni pada hari Selasa esok, bakal ikut melandai.

Bank Sentral Thailand (Bank of Thailand/BOT) secara konsisten meyakinkan pasar bahwa kenaikan inflasi ini bersifat sementara. Pihak bank sentral mengindikasikan kesediaannya untuk mengesampingkan tekanan harga jangka pendek demi memprioritaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, para pembuat kebijakan memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 1% selama dua pertemuan berturut-turut hingga bulan Juni, menjadikannya salah satu tingkat suku bunga terendah di dunia saat ini.

Gubernur Bank of Thailand Vitai Ratanakorn mengatakan setelah keputusan kebijakan pada 26 Juni bahwa saat ini belum ada alasan untuk menaikkan suku bunga. Menurutnya, bank sentral hanya akan

memperketat kebijakan moneter "jika memang diperlukan." Rapat kebijakan moneter berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus.

Secara bulanan, indeks harga konsumen turun 0,34% pada Juni setelah naik 0,17% pada Mei. Sementara itu, inflasi inti, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi, meningkat menjadi 1,23% dari sebelumnya 0,92% pada Mei.

Pesanan Industri Jerman Melejit: Pemicu Pemulihan Ekonomi Eropa?

Senin, 6 Juli 2026 18:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/pesanan-industri-jerman-melejit-pemicu-pemulihan-ekonomi-eropa>

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Tingkat pesanan industri Jerman meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Mei. Biro statistik Jerman Destatis mengumumkan, Senin (6/7/2026), pesanan industri naik 1,9% di Mei dibanding bulan sebelumnya.

Angka ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, di mana pesanan pabrik malah merosot 3,8%. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan konsensus proyeksi analis, yang memprediksi kenaikan 1,1%.

Industri Jerman mencatatkan peningkatan pesanan yang cukup besar. Bahkan nilai pesanan tetap besar kendati pesanan skala besar untuk pesawat terbang, kapal, kereta api, dan kendaraan militer dikecualikan. Jika pesanan skala besar dikecualikan, pesanan baru masih 1,0% lebih tinggi daripada bulan sebelumnya.

"Berdasarkan tren kenaikan pesanan ini, kami memperkirakan akan terjadi pemulihan di industri Jerman, meskipun kemungkinan akan moderat," kata Marco Wagner, Ekonom Senior Commerzbank, dikutip Reuters, Senin (6/7/2026).

Angka utama didorong oleh peningkatan 85% secara bulanan dalam kategori peralatan transportasi lainnya, yang mencakup pesawat terbang, kapal, kereta api, dan kendaraan militer.

"Meskipun ada kekhawatiran awal bahwa konflik di Timur Tengah akan memicu gangguan rantai pasokan baru, industri Jerman tampaknya hanya mengalami sedikit dampak negatif," kata Carsten Brzeski, Kepala Makro Global ING.

Brzeski juga mencatat bahwa konflik Timur Tengah telah memberikan dorongan bagi sebagian sektor manufaktur Jerman. Ia mengatakan dukungan awal datang dari penimbunan stok. Selain itu, baru-baru ini, perusahaan-perusahaan Jerman telah diuntungkan karena pesaing Asia lebih rentan terhadap gangguan yang memengaruhi perdagangan di Selat Hormuz.

Perbandingan periode kuartalan yang biasanya tidak terlalu fluktuatif menunjukkan bahwa pesanan baru pada periode Maret hingga Mei 0,2% lebih rendah daripada tiga bulan sebelumnya.

Setelah revisi data sementara, pesanan baru pada bulan April menurun 3,2% dibandingkan bulan Maret, lebih rendah dari penurunan 3,8% pada angka sementara.

Pesanan luar negeri naik 2,2% pada bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya. Pesanan dari zona euro meningkat 11,2% dan pesanan dari luar zona euro menurun 3,2%. Pesanan domestik naik 1,3% dibandingkan bulan sebelumnya.

Meskipun pemulihan tampaknya akan terjadi, Wagner mengatakan pemulihan tersebut akan moderat karena perusahaan-perusahaan Jerman masih menderita akibat terkikisnya daya saing negara tersebut. "Meskipun paket reformasi pemerintah federal telah membawa kemajuan pada beberapa poin, kemungkinan besar hal itu tidak akan mewakili terobosan yang menyeluruh," kata Wagner.

Bursa Asia Bergerak Lesu, Investor Menanti Laba Emiten AI dan Arah Suku Bunga The Fed

Senin, 6 Juli 2026 12:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/bursa-asia-bergerak-lesu-investor-menanti-laba-emiten-ai-dan-arrah-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pergerakan pasar saham Asia cenderung melemah pada perdagangan Senin (6/7/2026) seiring sikap hati-hati investor menjelang musim laporan keuangan emiten teknologi, khususnya perusahaan yang diuntungkan oleh booming kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di saat yang sama, harga minyak dunia kembali tertekan akibat prospek peningkatan pasokan global. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu meredakan tekanan inflasi sehingga mengurangi kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed).

Hingga kini belum ada perkembangan baru dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz tetap berlangsung normal, dengan sekitar 160 kapal dilaporkan melintas sepanjang Senin hingga Sabtu pekan lalu.

Di sisi lain, kelompok produsen minyak OPEC+ menyepakati tambahan kenaikan target produksi sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus. Kebijakan tersebut melanjutkan peningkatan produksi yang telah dilakukan pada Juni dan Juli.

Kenaikan pasokan minyak membuat harga minyak mentah Brent turun 0,2% ke level US\$ 71,95 per barel, mendekati level terendah dalam empat bulan terakhir. Sementara itu, harga minyak mentah AS (WTI) bergerak stabil di kisaran US\$ 68,72 per barel.

Penurunan harga energi, dikombinasikan dengan laporan ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan, mendorong pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat.

Kontrak berjangka kini mencerminkan peluang sebesar 78% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan 29 Juli mendatang.

Pelaku pasar kini menantikan risalah rapat terakhir The Fed yang akan dirilis pada Rabu (8/7). Dokumen tersebut diperkirakan memberikan gambaran mengenai sikap sebagian pejabat bank sentral yang cenderung lebih hawkish, meskipun pembahasan tersebut dilakukan sebelum harga minyak mengalami penurunan tajam.

"Bahkan jika sebelumnya Anda menganggap ada risiko The Fed akan segera menaikkan suku bunga, saya rasa setidaknya kita aman selama satu bulan ke depan," ujar Kepala Riset ANZ, Richard Yetsenga.

Ia menambahkan, "Secara keseluruhan, pandangan kami tetap bahwa The Fed tidak akan mengambil tindakan. Namun, inflasi berdasarkan ukuran yang paling diperhatikan The Fed sudah berada di atas target selama lima tahun terakhir. Ada risiko bahwa The Fed akhirnya kehilangan kesabaran."

Meski demikian, meredanya risiko kenaikan suku bunga pada bulan ini diperkirakan akan mengalihkan perhatian investor ke musim laporan keuangan kuartalan yang segera dimulai. Ledakan investasi di sektor AI diproyeksikan kembali mendorong lonjakan laba perusahaan-perusahaan teknologi.

Pekan ini, perhatian pasar akan tertuju pada laporan keuangan Delta Air Lines dan PepsiCo. Namun, sorotan terbesar diperkirakan datang dari Samsung Electronics yang dijadwalkan merilis panduan kinerja pada Selasa (7/7). Para analis memperkirakan laba perusahaan tersebut melonjak hingga 18 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Produsen Chip Diperkirakan Catat Lonjakan Laba

Samsung Electronics, produsen chip memori terbesar di dunia berdasarkan nilai penjualan, diperkirakan membukukan laba operasional sebesar 86 triliun won atau sekitar US\$ 56,35 miliar pada periode April–Juni, berdasarkan estimasi LSEG SmartEstimate.

Pasar saham Korea Selatan yang telah menguat tajam sepanjang tahun mulai mengalami koreksi ringan pekan lalu. Namun secara tahunan, indeks tersebut masih mencatat kenaikan sekitar 90%, didorong tingginya permintaan chip AI dan keterbatasan pasokan yang mengerek harga semikonduktor.

Pada perdagangan Senin, indeks saham Korea Selatan turun 0,8%, sementara indeks Nikkei Jepang melemah 0,4%.

Sementara itu, indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,2%, sedangkan indeks saham unggulan China bergerak relatif stabil.

Di Eropa, kontrak berjangka EURO STOXX 50 turun 0,1%, sedangkan futures DAX Jerman dan FTSE Inggris bergerak mendatar.

Sebaliknya, futures indeks S&P 500 naik 0,2% dan futures Nasdaq menguat 0,7%, melanjutkan kenaikan Nasdaq sebesar 2,1% pada pekan sebelumnya.

Investor Pantau Agenda Bank Sentral

Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menghadiri pertemuan NATO di Turki pekan ini. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk kembali mendorong upaya mengakhiri perang di Ukraina.

Dari sisi data ekonomi, perhatian pasar pada Senin tertuju pada survei sektor jasa Institute for Supply Management (ISM) AS. Konsensus memperkirakan indeks tersebut sedikit turun ke level 54,0 pada Juni, namun masih menunjukkan ekspansi yang sehat.

Selain itu, sejumlah pejabat bank sentral akan berbicara dalam konferensi Bank Sentral Eropa (ECB), termasuk Gubernur Dewan The Fed Christopher Waller serta Presiden ECB Christine Lagarde.

Presiden Federal Reserve New York John Williams juga dijadwalkan memberikan pidato pada Kamis, sebelum Ketua The Fed Kevin Warsh menyampaikan kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS pekan depan.

Di kawasan Asia Pasifik, bank sentral Selandia Baru dijadwalkan menggelar rapat kebijakan pada Rabu. Pasar memperkirakan suku bunga acuan sebesar 2,25% akan dinaikkan 25 basis poin, yang menjadi kenaikan pertama sejak pertengahan 2023.

Meski para pembuat kebijakan sebelumnya telah memberi sinyal pengetatan moneter, penurunan tajam harga minyak membuka peluang bank sentral mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga.

"Meskipun The Fed tetap menahan suku bunga, sektor manufaktur yang masih lemah, ancaman kenaikan harga pangan akibat El Niño, serta pelemahan mata uang domestik membuat para pembuat kebijakan moneter tetap bersikap waspada," kata Kepala Ekonom Asia HSBC, Frederic Neumann.

Menurutnya, Selandia Baru dan Korea Selatan berpeluang menaikkan suku bunga bulan ini. Indonesia juga dinilai memiliki peluang untuk mengambil langkah serupa.

Di pasar valuta asing, indeks dolar AS bergerak stabil di level 100,880 setelah sempat melemah menyusul laporan ketenagakerjaan AS yang mengecewakan pada Juni.

Euro diperdagangkan stabil di level US\$ 1,1434, sedikit di atas level terendah dalam 13 bulan terakhir di US\$ 1,1325.

Sementara itu, dolar AS menguat 0,3% terhadap yen Jepang menjadi 161,96 yen, mendekati level tertinggi dalam 40 tahun di 162,84 yen. Kondisi tersebut menunjukkan pelaku pasar terus menguji komitmen otoritas Jepang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Di pasar komoditas, harga emas sedikit melemah ke level US\$ 4.166 per ons setelah sebelumnya menguat sekitar 2% sepanjang pekan lalu.

Korea Selatan Buka Perdagangan Won 24 Jam, Upaya Tarik Investor Global

Senin, 6 Juli 2026 09:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/korea-selatan-buka-perdagangan-won-24-jam-upaya-tarik-investor-global>

KONTAN.CO.ID - Korea Selatan resmi memulai sistem perdagangan spot mata uang dolar AS-won selama 24 jam mulai Senin (6/7/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pasar valuta asing untuk meningkatkan konvertibilitas won sekaligus memperkuat peluang negara tersebut memperoleh status pasar maju dalam indeks global MSCI.

Mengutip Reuters, pasar spot domestik won-dolar mulai beroperasi pada pukul 06.00 waktu setempat pada Senin dan akan berlangsung tanpa henti hingga 06.00 pagi setiap Sabtu.

Penerapan perdagangan 24 jam ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah Korea Selatan memperluas akses investor global terhadap pasar keuangannya.

Menteri Keuangan Korea Selatan Koo Yun-cheol menyebut, kebijakan tersebut sebagai awal dari langkah besar bagi internasionalisasi mata uang won.

"Ini akan menjadi titik awal bagi lompatan global won," ujar Koo saat mengunjungi ruang transaksi valuta asing Hana Bank di Seoul, sebagaimana dikutip dari pernyataan Kementerian Keuangan Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan berharap reformasi pasar valuta asing ini dapat meningkatkan likuiditas, memperpanjang jam perdagangan agar selaras dengan pasar internasional, serta memenuhi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh peningkatan status menjadi pasar maju (developed market) dalam klasifikasi MSCI.

Status tersebut dinilai penting karena berpotensi meningkatkan arus investasi asing ke pasar keuangan Korea Selatan, mengingat banyak dana global menjadikan klasifikasi MSCI sebagai acuan dalam penempatan investasinya.

Dolar AS Bertahan Dekat Level Terendah Dua Pekan Senin (6/7), DXY Bertahan di 100,9

Senin, 6 Juli 2026 08:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-bertahan-dekat-level-terendah-dua-pekan-senin-67-idx-bertahan-di-1009>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) bergerak stabil di dekat level terendah dalam dua pekan pada perdagangan Senin (6/7/2026), setelah pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tahun ini.

Sementara itu, yen Jepang tetap berada di dekat level terlemah dalam 40 tahun terakhir, sehingga memicu spekulasi mengenai kemungkinan intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Mengutip Reuters, euro diperdagangkan di level US\$ 1,1435, tidak jauh dari posisi tertinggi dalam dua pekan terakhir.

Pound sterling berada di US\$ 1,3351, sedangkan indeks dolar AS (DXY), yang mengukur pergerakan dolar terhadap enam mata uang utama, bertahan di level 100,9.

Di sisi lain, yen berada di kisaran 161,57 per dolar AS, hanya sedikit lebih kuat dibandingkan level 162,84 yang disentuh pekan lalu, merupakan posisi terlemah sejak 1986.

Pelaku pasar masih mewaspadaai potensi intervensi pemerintah Jepang setelah lonjakan pembelian yen secara tiba-tiba sempat mengangkat nilai tukar mata uang tersebut pada Kamis lalu.

Sementara itu, won Korea Selatan menguat tipis ke 1.534 per dolar AS pada hari pertama implementasi perdagangan spot dolar-won domestik selama 24 jam.

Data tenaga kerja AS tekan dolar Dolar

AS mencatat penurunan mingguan terbesar sejak April setelah data ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja pada Juni melambat tajam.

Data tersebut mendorong pasar mengurangi ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Meski demikian, analis OCBC menilai tingkat pengangguran yang masih rendah menunjukkan pasar tenaga kerja AS tetap solid sehingga peluang kebijakan moneter ketat belum sepenuhnya hilang.

"Kami tetap mempertahankan pandangan bahwa dolar AS masih memiliki prospek yang konstruktif, dengan potensi penguatan sekitar 2% hingga 3% pada paruh kedua 2026," tulis analis OCBC.

Penurunan harga minyak juga membantu meredakan kekhawatiran terhadap inflasi sehingga perhatian investor kini tertuju pada risalah rapat The Fed bulan Juni yang akan dirilis pekan ini.

Analisis Commonwealth Bank of Australia (CBA) memperkirakan risalah tersebut kemungkinan tidak akan memberikan banyak petunjuk baru mengenai arah kebijakan suku bunga karena Ketua The Fed,

Kevin Warsh, sebelumnya menyatakan bank sentral telah memberikan terlalu banyak panduan kepada pasar.

Yen tetap dibayangi risiko intervensi

Yen masih menjadi perhatian utama pasar karena berada di dekat level terlemah dalam empat dekade.

Analisis menilai risiko intervensi pemerintah Jepang dapat memicu volatilitas jangka pendek, tetapi belum tentu mampu membalikkan tren pelemahan yen terhadap dolar AS.

Menurut OCBC, tanpa perubahan fundamental ekonomi yang signifikan, peringatan verbal maupun intervensi langsung dari pemerintah Jepang kemungkinan hanya akan memicu koreksi sementara.

Sementara itu, Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex Marc Chandler mengatakan, pelaku pasar menyadari risiko intervensi semakin besar.

Ia menambahkan, pasar opsi menunjukkan adanya peningkatan pembelian kontrak opsi jual (put option) dolar AS berjangka pendek sebagai langkah lindung nilai apabila pemerintah Jepang benar-benar melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Prospek Suku Bunga AS Melunak, Harga Emas Bertahan di Dekat Puncak Dua Pekan

Senin, 6 Juli 2026 08:31 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/prospek-suku-bunga-as-melunak-harga-emas-bertahan-di-dekat-puncak-dua-pekan>

KONTAN.CO.ID - Harga emas dunia bertahan di dekat level tertinggi dalam dua pekan pada perdagangan Senin (6/7/2026).

Logam mulia ini mendapat dukungan setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan meredam ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat.

Mengutip Reuters, hingga pukul 00.28 GMT, harga emas spot stabil di US\$ 4.175,02 per ons troy. Sebelumnya, harga emas mencatat kenaikan lebih dari 2% sepanjang pekan lalu, mengakhiri tren penurunan selama empat pekan berturut-turut.

Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Agustus naik 1,5% menjadi US\$ 4.186,80 per ons troy.

Sentimen positif bagi emas muncul setelah data pada Kamis lalu menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat melambat tajam pada Juni. Selain itu, data penciptaan lapangan kerja dua bulan sebelumnya juga direvisi lebih rendah.

Kondisi tersebut mengindikasikan pasar tenaga kerja mulai mendingin sehingga pelaku pasar mengurangi ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan September kini berada di kisaran 55%, turun dari lebih dari 60% sebelum data ketenagakerjaan dirilis.

Secara umum, prospek suku bunga yang lebih rendah cenderung menguntungkan harga emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset).

Investor menanti risalah rapat The Fed

Perhatian investor kini tertuju pada risalah rapat kebijakan moneter The Fed yang berlangsung pada 16–17 Juni, yang akan dirilis pada Rabu pekan ini.

Dokumen tersebut menjadi risalah pertama di bawah kepemimpinan Ketua The Fed, Kevin Warsh, dan diperkirakan memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya.

Di sisi lain, analis JPMorgan menilai permintaan emas dari sejumlah sektor utama kemungkinan tidak akan sekuat perkiraan sebelumnya.

Bank investasi tersebut memperkirakan harga emas akan mencapai sekitar US\$ 4.300 per ons pada kuartal III-2026 dan meningkat menjadi US\$ 4.500 per ons pada kuartal IV-2026.

Di pasar fisik, permintaan emas di India kembali melemah pada Jumat setelah sempat meningkat di awal pekan. Pelemahan terjadi seiring kenaikan harga emas dari level terendah dalam tiga bulan terakhir.

Sebaliknya, minat beli emas fisik di China menunjukkan sedikit perbaikan.

Untuk logam mulia lainnya, harga perak spot naik tipis 0,1% menjadi US\$ 62,48 per ons, memperpanjang reli menjadi lima hari berturut-turut dan sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 Juni.

Sementara itu, harga platinum menguat 0,4% menjadi US\$ 1.645,05 per ons, sedangkan palladium naik 0,1% ke US\$ 1.275,18 per ons. Keduanya berada di jalur kenaikan harian keempat secara berturut-turut.

Rupiah Ikut Melemah, Dolar Taiwan dan Baht Jadi Mata Uang Asia Tertekan

Senin, 6 Juli 2026 09:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-ikut-melemah-dolar-taiwan-dan-baht-jadi-mata-uang-asia-tertekan>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (6/7/2026).

Dolar Taiwan dan baht Thailand memimpin pelemahan di kawasan, sementara rupiah juga kembali tertekan mendekati level Rp 18.000 per dolar AS.

Mengutip Reuters hingga pukul 02.11 GMT, dolar Taiwan melemah 0,34% menjadi 32,040 per dolar AS, menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar di Asia pada perdagangan pagi.

Posisi berikutnya ditempati baht Thailand yang turun 0,30% ke 33,250 per dolar AS, disusul yen Jepang yang melemah 0,28% ke 161,820 per dolar AS.

Sementara itu, rupiah melemah 0,25% ke level Rp 17.990 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp 17.945 per dolar AS.

Mata uang Asia lainnya juga bergerak di zona merah. Won Korea Selatan turun 0,22%, peso Filipina melemah 0,22%, yuan China turun 0,14%, ringgit Malaysia melemah 0,10%, dan dolar Singapura turun tipis 0,08%.

Hanya rupee India yang relatif tidak berubah di level 95,210 per dolar AS.

Rupiah masih jadi yang paling tertekan sepanjang tahun

Secara kumulatif sejak awal 2026, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terdalam terhadap dolar AS.

Hingga perdagangan Senin, rupiah telah terdepresiasi sekitar 7,34% dibandingkan posisi akhir 2025.

Pelemahan terbesar berikutnya dialami won Korea Selatan yang turun 6,12%, diikuti rupee India (-5,61%), baht Thailand (-5,41%), peso Filipina (-4,41%), dan yen Jepang (-3,19%).

Di sisi lain, yuan China justru menjadi satu-satunya mata uang utama Asia yang masih menguat terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, dengan apresiasi sekitar 2,96%.

Ekonom Proyeksi Cadangan Devisa Juni Tertekan, Defisit NPI Berlanjut di Kuartal Kedua

Senin, 6 Juli 2026 19:27 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-proyeksi-cadangan-devisa-juni-tertekan-defisit-npi-berlanjut-di-kuartal-kedua>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah ekonom memproyeksikan posisi cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam tekanan. Pelemahan cadangan devisa diperkirakan sejalan dengan berlanjutnya defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2026 akibat arus modal keluar, menyusutnya surplus perdagangan, serta tingginya kebutuhan valuta asing.

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto memperkirakan, posisi cadangan devisa Indonesia turun menjadi sekitar US\$ 141,2 miliar pada Juni 2026, dari posisi Mei sebesar US\$ 144,9 miliar.

"Kita lihat bulan Juni ini turun ke sekitar US\$ 141,2 miliar. Sudah kelihatan dari mana dan kenapa-nya cadangan devisa kita turun," ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (6/7/2026).

Menurutnya, penurunan cadangan devisa dipicu oleh keluarnya modal asing (capital outflow), terutama dari pasar saham. Selain itu, defisit neraca perdagangan, meski tidak sedalam Mei, serta pembayaran dividen kepada investor asing turut mengurangi cadangan devisa.

Myrdal juga memperkirakan, NPI pada kuartal II-2026 masih mencatat defisit sekitar US\$ 4,3 miliar.

Ia menjelaskan, pelebaran defisit transaksi berjalan dipengaruhi oleh mengecilnya surplus perdagangan, tingginya pembayaran dividen dalam pos pendapatan primer (primary income), serta arus keluar pada pos investasi lainnya (other investment).

"Surplus dari remitansi pekerja migran dan investasi langsung (FDI) belum mampu menutupi keluarnya dana dari primary income maupun other investment yang outflow-nya cukup besar," katanya.

Menurut Myrdal, tekanan eksternal tersebut lebih banyak dipengaruhi kondisi global yang belum kondusif, termasuk penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia, dan perpindahan dana investor ke negara-negara maju yang menawarkan prospek pasar keuangan lebih menarik.

Kondisi tersebut, lanjutnya, turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta meningkatkan imported inflation.

Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, cadangan devisa Juni masih tertekan atau paling tidak stagnan karena belum ada indikasi pemulihan yang signifikan.

"Proyeksi cadangan devisa per Juni masih tertekan atau paling tidak stagnan, belum ada indikasi rebound signifikan," ujar David kepada Kontan, Senin (6/7/2026).

David bilang, tekanan berasal dari defisit neraca perdagangan yang diperkirakan masih berlanjut pada Juni, pelemahan rupiah, pembayaran utang luar negeri, serta kebutuhan intervensi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Selain itu, sentimen global yang masih bergejolak juga dinilai menahan arus modal asing masuk ke Indonesia.

Ia memperkirakan NPI kuartal II-2026 juga masih mencatat defisit. Defisit perdagangan yang semakin dalam diperkirakan memperlebar defisit transaksi berjalan, sementara investor asing masih cenderung bersikap wait and see di tengah ketidakpastian domestik dan kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Menurut David, kondisi tersebut juga mempersempit ruang gerak BI untuk melakukan intervensi di pasar valas.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memiliki proyeksi yang lebih moderat. Ia memperkirakan cadangan devisa Juni relatif stabil di kisaran US\$ 145 miliar.

Menurutnya, arus masuk modal asing sebesar sekitar US\$ 3,9 miliar hingga pertengahan Juni, terutama ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), membantu mengimbangi tekanan dari kebutuhan valas domestik, pembayaran utang luar negeri, dan defisit neraca perdagangan.

Meski demikian, Banjaran mengingatkan, ruang peningkatan cadangan devisa masih terbatas karena BI tetap harus melakukan intervensi di pasar valas melalui instrumen NDF offshore, pasar spot, dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk menjaga stabilitas rupiah.

Ia memperkirakan, NPI pada kuartal II-2026 masih defisit di kisaran US\$ 3 miliar hingga US\$ 5 miliar, namun lebih rendah dibandingkan defisit kuartal I-2026 yang mencapai US\$ 9,15 miliar. "

Perbaikan NPI lebih banyak ditopang oleh capital inflow dan respons kebijakan BI, bukan oleh penguatan transaksi berjalan. Karena itu kualitas perbaikannya masih perlu dicermati," ujar Banjaran.

Menurutnya, defisit transaksi berjalan masih menjadi tantangan utama akibat pelebaran defisit migas dan melemahnya surplus perdagangan. Karena itu, meskipun tekanan terhadap rupiah diperkirakan mereda, biaya stabilisasi nilai tukar masih akan tetap tinggi selama ketidakpastian global belum mereda.

Pemerintah Siapkan Pembebasan PPh bagi WNA di Financial Center

Senin, 6 Juli 2026 13:58 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-pembebasan-pph-bagi-wna-di-financial-center>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan pemberian insentif perpajakan yang besar bagi tenaga profesional asing yang bekerja di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Melalui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII, tenaga ahli berkewarganegaraan asing di sektor jasa keuangan diusulkan menikmati pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 100%.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema insentif fiskal yang disiapkan untuk meningkatkan daya saing PFII sebagai pusat keuangan internasional sekaligus menarik talenta global dan investasi.

Dalam Bab V draf RUU PFII dijelaskan bahwa pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut akan memperoleh beragam fasilitas perpajakan. Insentif itu mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga fasilitas di bidang kepabeanan.

Untuk fasilitas PPh, merujuk Pasal 35 draft tersebut, pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan.

Kemudahan tersebut antara lain pengurangan PPh badan, pengurangan PPh bagi tenaga ahli, pengecualian status sebagai subjek pajak dalam negeri, serta pembebasan atas pemotongan maupun pemungutan PPh untuk kondisi tertentu.

Ketentuan mengenai insentif bagi tenaga ahli tercantum dalam Pasal 37 draf RUU PFII.

Pasal tersebut mengatur bahwa warga negara asing yang bekerja pada pelaku usaha sektor jasa keuangan di kawasan PFII berhak memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100%.

"Fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan sebesar 100% bagi tenaga ahli pada sektor jasa keuangan di PFII yang berstatus warga negara asing dan bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII," demikian bunyi Pasal 37 ayat (1) draf RUU PFII, dikutip Senin (6/7).

Selain insentif tersebut, pemerintah juga mengusulkan perlakuan perpajakan khusus bagi pemegang golden visa di PFII.

Warga negara asing yang memperoleh fasilitas itu tidak akan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri selama masa berlaku golden visa.

Draf beleid tersebut juga mengatur bahwa penghasilan dari investasi di kawasan PFII yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dibebaskan dari pemotongan maupun pemungutan Pajak Penghasilan.

Tidak hanya tenaga ahli, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan PFII juga diusulkan memperoleh insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan hingga 100%.

Fasilitas tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha di sektor jasa keuangan, sektor pendukung jasa keuangan, maupun sektor usaha lainnya yang beroperasi di PFII, dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam kesepakatan dan konsensus perpajakan internasional.

"Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tetap memperhatikan kesepakatan atau konsensus perpajakan internasional," bunyi Pasal 36 ayat (2) draft RUU tersebut.

RI - Singapura Teken 26 Kerja Sama Baru, Ada Energi hingga Pertahanan

Senin, 6 Juli 2026 15:58 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/ri-singapura-teken-26-kerja-sama-baru-ada-energi-hingga-pertahanan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan Leaders's Retret bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2026).

Pertemuan itu menghasilkan 26 capaian konkret yang mencakup kerja sama antar pemerintah hingga antarpelaku usaha di berbagai sektor energi hingga pertahanan.

"Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, konkret di berbagai bidang. Delapan belas kesepakatan kerja sama antar pemerintah dan delapan kesepakatan antara business-to-business," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, berbagai kesepakatan tersebut menunjukkan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura semakin luas sekaligus semakin mendalam. Kerja sama ekonomi, menurutnya, tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara.

"Kerja sama ekonomi kita tetap jadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerja sama, perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor," katanya.

Prabowo menjelaskan, kedua negara juga mencatat kemajuan kerja sama di sektor energi, ekonomi digital, pengembangan ekosistem digital, hingga keamanan siber. Selain itu, Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok.

Di sektor pertahanan dan keamanan, kedua negara berkomitmen melanjutkan implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Prabowo, kemitraan yang kuat hanya dapat dibangun di atas kepercayaan antara pemerintah maupun masyarakat kedua negara.

Karena itu, ia menilai penguatan konektivitas masyarakat menjadi bagian penting dalam hubungan bilateral. Kerja sama di bidang pariwisata, pendidikan, serta pertukaran pemuda akan terus ditingkatkan untuk mempererat hubungan antar masyarakat.

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan global yang dinilai akan memengaruhi stabilitas kawasan.

Prabowo mengatakan, Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi.

"Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun depan Indonesia dan Singapura akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat kerja sama strategis kedua negara sekaligus menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.

Prabowo menegaskan, Leaders' Retreat menjadi bukti kematangan hubungan Indonesia dan Singapura yang dibangun atas dasar kepercayaan, persahabatan, dan kepentingan bersama.

Menurutnya, hubungan yang kuat antara kedua negara tidak hanya menguntungkan masyarakat Indonesia dan Singapura, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda tahunan kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus memperluas kerja sama strategis di berbagai sektor.

Rombongan PM Lawrence Wong tiba di kompleks Istana Merdeka sekitar pukul 11.00 WIB dengan mendapat pengawalan kehormatan dari pasukan yang telah disiapkan pemerintah Indonesia.

Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung PM Wong di pelataran istana. Kedua pemimpin kemudian berjabat tangan dan saling menyampaikan salam sebelum mengikuti rangkaian upacara penyambutan kenegaraan.

Prosesi penyambutan diawali dengan pertunjukan tarian tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia dan Singapura dikumandangkan dalam upacara resmi penyambutan.

Setelah itu, Presiden Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan yang diiringi dentuman meriam. Seusai inspeksi, Presiden memperkenalkan jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir kepada PM Lawrence Wong.

Pada kesempatan yang sama, PM Lawrence Wong juga memperkenalkan delegasi Singapura yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Indonesia.

Rupa-rupa Insentif Pusat Finansial RI: Diskon hingga Bebas Pajak

Senin, 6 Juli 2026 14:39 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/113652/rupa-rupa-insentif-pusat-finansial-ri-diskon-hingga-bebas-pajak/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI memberikan rentetan fasilitas gratis pajak, diskon pajak, serta fasilitas khusus lain kepada investor asing dalam kebijakan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Hal ini terangkum dalam draf Rancangan Undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII yang beredar saat Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU PPFI dengan sejumlah ahli dan akademisi hari ini, Senin (6/7/2026).

"Dalam rangka kemudahan berusaha, kegiatan usaha diberikan fasilitas perpajakan serta fasilitas khusus lainnya," demikian tercantum dalam draf RUU PFII.

Fasilitas perpajakan mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta kepabeanan.

Fasilitas PPh, yang menjadi objek PPh yaitu penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dikecualikan dari ketentuan, objek PPh bagi: Pelaku usaha, dan tenaga ahli pada sektor jasa keuangan di PFII, hanya yang bersumber dari Indonesia.

Fasilitas PPh diberikan dalam bentuk: pengurangan PPh Badan, pengurangan PPh bagi tenaga ahli, pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri, dan pembebasan pemotongan/pemungutan.

Fasilitas pengurangan PPh Badan

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di PFII, diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan 100%. Tak hanya itu, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang sektor keuangan di PFII juga diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan 100%.

"Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha non-sektor keuangan di PFII, diberikan fasilitas berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100%," demikian tercantum dalam draf beleid.

Pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan tetap memperhatikan kesepakatan atau konsensus perpajakan internasional.

Fasilitas pengurangan PPh Tenaga Ahli

Fasilitas pengurangan PPh sebesar 100% diberikan kepada tenaga ahli pada sektor jasa keuangan di PFII yang berstatus warga negara asing dan bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII. Fasilitas diberikan sejak tenaga ahli bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan.

Pengecualian Subjek Pajak Dalam Negeri

Fasilitas PPh berupa pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri diberikan kepada warga negara asing yang memperoleh fasilitas golden visa di PFII selama jangka waktu pemberian golden visa masih berlaku.

Penghasilan yang berasal dari investasi pada PFII yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Kemudahan PPN dan PPnBM berupa pajak PPN tidak dipungut dan pengecualian PPnBM

PPN tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Rupiah Ditutup Melemah, Tapi di Bawah Rp18.000/US\$

Senin, 6 Juli 2026 15:52 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114092/rupiah-ditutup-melemah-tapi-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Namun setidaknya mata uang Tanah Air finis di bawah Rp 18.000/US\$.

Pada Senin (6/7/2026), US\$ 1 setara dengan Rp 17.995 kala penutupan perdagangan pasar spot. Mata uang Ibu Pertiwi terdepresiasi 0,23% dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu.

Rupiah tidak sendiri, karena hampir seluruh mata uang utama Asia juga melemah. Hanya dolar Hong Kong yang mampu menguat, itu pun sangat terbatas di 0,01%.

Baht Thailand menjadi mata uang terlemah di Benua Kuning. Disusul oleh yen Jepang, dolar Taiwan, dan rupee India.

Mengutip riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia, salah satu beban bagi langkah rupiah adalah neraca perdagangan yang defisit US\$ 1,61 miliar pada Mei. Defisit tersebut memutus rentetan surplus yang terjadi selama 72 bulan berturut-turut.

“Ditambah dengan bantalan eksternal yang melemah, di mana transaksi berjalan mencatat defisit US\$ 4 miliar pada kuartal I-2026 dan cadangan devisa turun selama lima bulan beruntun,” lanjut catatan Mirae Asset.

Ke depan, tambah riset Mirae Asset, rupiah bergantung pada pemulihan permintaan global, harga komoditas, dan masuknya Devisa Hasil Ekspor (DHE). Jika belum membaik, maka tekanan terhadap rupiah kemungkinan bakal berlanjut.

Wee Khoon Choong, Strategist BNY, menilai rupiah masih menjadi salah satu mata uang paling rentan. Berdasarkan catatannya, seperti dikutip dari Bloomberg News, Wee melihat rupiah terbebani akibat arus modal keluar (outflow) yang persisten, tingginya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah jangka panjang, serta pelemahan rupiah di pasar forwards.

Akan tetapi, Citigroup memperkirakan tekanan terhadap rupiah mungkin akan mereda pada kuartal III-2026. Penyebabnya adalah perbaikan fundamental rupiah, dalam hal ini transaksi berjalan.

Citi memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal III-2026 akan menyempit ke sekitar 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian akan lebih rendah lagi menjadi di bawah 1% PDB pada kuartal berikutnya.

“Penyebabnya adalah penurunan harga minyak, kenaikan produksi pertambangan, dan moderasi impor,” sebut Helmi Arman, Ekonom Citi, dalam catatannya, sebagaimana dinukil dari Bloomberg News.

Citi pun memperkirakan Bank Indonesia (BI) sudah selesai dalam menaikkan suku bunga acuan. Citi juga menilai pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap program-program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi anggaran sekitar Rp 200 triliun sampai akhir tahun dari pagu Rp 335 triliun.

“Indonesia juga mungkin akan menurunkan jumlah penerbitan surat utang tahun ini, dengan lebih banyak memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB,” demikian Helmi.

Jepang Minati Pekerja Muda Asal Jateng, Program Magang Pemprov Diserbu Peserta

Senin, 6 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jepang-minati-pekerja-muda-asal-jateng-program-magang-pemprov-diserbu-peserta/>

SEMARANG – Minat Jepang terhadap tenaga kerja muda asal Jawa Tengah terus meningkat. Selain dinilai memiliki kemampuan bekerja yang baik, generasi muda dari provinsi ini juga dikenal memiliki semangat tinggi, dan mudah dibentuk menjadi tenaga kerja berdaya saing global.

Wakil Direktur International Manpower Development Organization, (IM Japan) Yamauchi Takeshi, mengaku terkesan dengan antusiasme peserta seleksi program pemagangan asal Jawa Tengah. IM Japan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja berperan menyalurkan peserta magang Indonesia ke berbagai perusahaan di Jepang sebagai mitra pelaksana pemagangan.

“Anak-anak Jawa Tengah memiliki semangat dan energi yang luar biasa. Yang terpenting adalah selalu berpikir positif, jujur, disiplin, bekerja keras, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Nilai-nilai itu menjadi bekal penting untuk sukses bekerja di Jepang,” ujar Yamauchi, saat Pembukaan Seleksi Magang Jepang di kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jateng, Kota Semarang, Senin (6/7/2026).

Menurut dia, sikap dan karakter menjadi faktor yang sama pentingnya dengan keterampilan teknis ketika bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang. Karena itu, peserta diminta terus menjaga integritas, kedisiplinan, serta menghormati sesama selama mengikuti program pemagangan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kepercayaan yang diberikan Jepang kepada tenaga kerja Indonesia, khususnya dari Jawa Tengah, merupakan modal besar yang harus dijaga bersama.

“Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu bahwa sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja di Indonesia sangat diminati di Jepang,” kata Luthfi.

Ditambahkan, minat Jepang terhadap tenaga kerja Indonesia, adalah bentuk suatu kerja sama dan kepercayaan, yang harus dijunjung tinggi. Yang mana, tenaga kerja Indonesia tidak kalah dengan tenaga kerja negara-negara lain.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz mengatakan, minat masyarakat mengikuti program pemagangan Jepang terus meningkat. Setiap tahun sekitar 7.000 hingga 8.000 warga Jawa Tengah diberangkatkan ke Jepang, melalui fasilitasi pemerintah serta lembaga pelatihan kerja pengirim atau LPK Sending Organization (SO).

Pada seleksi tahun ini tercatat ada 508 orang mendaftar, namun hanya 401 peserta yang mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi, sebelum melanjutkan proses seleksi nasional bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan IM Japan. Mereka berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, DKI, Kalimantan Utara, Lampung, dan NTB.

“Harapannya, anak-anak ini ketika di Jepang itu belajar kaitannya dengan etos kerja, kedisiplinannya, kemandiriannya, kompetensi baik, ya skill maupun soft skill-nya. Nanti setelah tiga tahun selesai magang itu tidak boleh lagi berangkat ke sana, tapi mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di Jepang itu, dan menjadi virus positif di lingkungannya,” ujar Aziz.

Ketua DPW III Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Aris Sutikno menambahkan, Jawa Tengah hingga kini masih menjadi daerah dengan jumlah peminat program magang ke Jepang terbesar di Indonesia.

“Jawa Tengah ini luar biasa, Jawa Tengah ini termasuk yang paling banyak untuk peminatan ke Jepang. Di seluruh Indonesia ini, terutama Jawa Tengah. Baik dari Jepang juga ada daya tarik sendiri, dan dari anak-anak sendiri juga luar biasa untuk minat ke Jepang,” ungkapnya.

Peserta asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Ardiansyah mengatakan, dia mengikuti seleksi Jawa Tengah, karena banyak informasi pendaftaran program magang melalui IM Japan.

“Motivasi saya, ingin belajar betul bagaimana bekerjanya orang Jepang. Karena saya tahunya mereka itu maju. Saya ingin belajar di sana, sehingga bisa mengaplikasikannya di Indonesia,” tutur Andi, saat dipanggil Gubernur Ahmad Luthfi. (Ak/UL, Diskomdigi Jateng)

Hasil Rekayasa Teknologi, Tambak Udang Milik Pemprov Jateng Sukses Panen di Tengah Kawasan Industri

Senin, 6 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/hasil-rekayasa-teknologi-tambak-udang-milik-pemprov-jateng-sukses-panen-di-tengah-kawasan-industri/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses melakukan panen raya udang vaname, di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Kota Semarang, Senin (6/7/2026).

Panen di lahan yang dikelola oleh Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan (PBI) Tugu Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah itu, ditinjau Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Melalui rekayasa teknologi, tambak seluas 1.561 meter persegi tersebut tidak hanya berhasil memproduksi udang berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi model percontohan revitalisasi tambak modern di Pantura.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Efendi, mengatakan panen dilakukan di Petak B3 Loka PBI Tugu. Dari budidaya selama sekitar 82 hari, produksi udang vaname ditargetkan mencapai 1,3 ton, dengan ukuran sekitar 60 ekor per kilogram.

Endi menjelaskan, tambak tersebut menerapkan sistem tertutup (closed system), karena berada di kawasan industri, sehingga penggunaan air dibuat seminimal mungkin.

“Kita menggunakan sedikit air dari luar, kemudian kita treatment dengan dolomit, kaporit, dan aerasi, sebelum digunakan untuk budidaya,” ujarnya.

Endi menambahkan, hasil panen kali ini dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dengan harga sekitar Rp60 ribu per kilogram. Selain itu, Loka PBI Tugu juga terus menunjukkan kinerja positif dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), yang hingga Semester I 2026 telah mencapai sekitar 72 persen dari target tahunan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan, agar menggenjot sentra pembibitan ikan dan udang.

Menurutnya, pembibitan lebih bermanfaat bagi masyarakat karena biaya produksinya lebih murah, perputaran usaha lebih cepat, serta mampu menopang ketahanan pangan.

Gubernur menyampaikan, keberadaan balai perikanan milik pemerintah harus menjadi pusat pembibitan unggul, yang dapat dimanfaatkan para pembudidaya di berbagai daerah. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh benih berkualitas.

Dia juga meminta seluruh tenaga ahli dan penyuluh di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan lebih aktif mendampingi masyarakat, mulai dari penyediaan benih, pembinaan budidaya, hingga pemasaran hasil panen.

“Sehingga masyarakat tidak akan mencari ke mana-mana. Dengan begitu, dinas kita benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Luthfi mengatakan, sektor perikanan merupakan bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Jawa Tengah memiliki garis pantai yang membentang di 17 kabupaten/kota, namun sebagian besar kawasan tambaknya masih dikelola secara tradisional, sehingga perlu direvitalisasi.

Dia mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait rencana revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa Tengah, yang luasnya mencapai sekitar 72 ribu hektare.

“Dalam waktu dekat Pak Menteri KKP akan backup penuh untuk wilayah Pantai Utara kita. Prinsipnya, nanti segera dikawal agar tambak-tambak yang tidak berfungsi bisa segera kita fungsikan,” tandasnya. (Humas Jateng)*ul

Jateng Fair Dikunjungi 125 Ribu Orang, Transaksinya Capai Rp5 Miliar

Senin, 6 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-fair-dikunjungi-125-ribu-orang-transaksinya-capai-rp5-miliar/>

SEMARANG – Gelaran Jateng Fair 2026 di area PRPP Kota Semarang resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Minggu (5/7/2026) malam. Selama 10 hari pelaksanaan, gelaran itu dikunjungi oleh sekitar 125 ribu orang, dengan total transaksi mencapai Rp5 miliar.

Direktur Utama Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, Shafigh Pahlevi Lontoh mengatakan, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu yang mencatat sekitar 100 ribu pengunjung.

Perhitungan jumlah pengunjung dilakukan berdasarkan beberapa indikator, di antaranya jumlah kendaraan di area parkir, penjualan tiket masuk, hingga data transaksi. Namun demikian, tidak semua pengunjung dapat terdata melalui indikator tersebut.

“Karena ada juga pengunjung yang datang menggunakan taksi online, sehingga tidak masuk dalam data parkir. Selain itu, ada sejumlah kegiatan yang dapat diakses secara gratis,” jelasnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi penyelenggaraan Jateng Fair 2026. Perjuangan pemerintah, stakeholder, dan direksi PRPP, telah membuat kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke PRPP.

Dia menilai, penyelenggaraan Jateng Fair memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Satu kata untuk Jateng Fair, luar biasa perputaran uangnya,” ucap Taj Yasin.

Menurut wagub, kawasan PRPP memang perlu dilakukan penataan kembali, agar menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh pengunjung. Dia berharap pada 2027 nanti, proses penataan kawasan tersebut sudah bisa dimulai, sehingga pembangunannya segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami ingin PRPP kembali menjadi ikon kebanggaan Jawa Tengah,” tutur Gus Yasin, sapaannya.

Wagub mengungkapkan, PRPP merupakan tempat wisata idaman masa kecilnya, yang memiliki potensi keindahan luar biasa. Revitalisasi dirasa krusial, karena Jawa Tengah sedang membidik target besar di tahun depan.

“Gong kita pada 2027 adalah pariwisata berkelanjutan. Maka saya berharap revitalisasi ini bisa berlanjut, sehingga menumbuhkan pariwisata-pariwisata yang ada di Jawa Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, pengunjung Jateng Fair 2026, Zavin mengatakan tertarik untuk mengunjungi pameran itu, karena hiburan yang ditampilkan panitia dinilai menarik. Genre musik yang ditampilkan juga bervariasi.

“Jateng Fair 2026 gokil, satu hari satu artis yang berbeda. Jadi bisa untuk semua penikmat musik,” ucap Zafin, yang datang bersama dengan rekan-rekannya ini.

Pada acara penutupan Jateng Fair 2026, juga diberikan penghargaan kepada peserta terbaik dari berbagai kategori. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota peserta pameran, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, BUMN, swasta, dan lainnya.

Selain menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, Jateng Fair 2026 juga berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah, menampilkan berbagai inovasi hasil karya pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya. (Humas Jateng)*ul

Rupiah Borobudur Playon 2026, Upaya BI Dorong "Sport Tourism" dan Berdayakan Ekonomi Daerah

Senin, 6 Juli 2026 20:56 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/637532/rupiah-borobudur-playon-2026-upaya-bi-dorong-sport-tourism-dan-berdayakan-ekonomi-daerah>

Kabupaten Magelang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jateng menyelenggarakan Rupiah Borobudur Playon (RBP) 2026 pada 4 - 5 Juli 2026 di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.

Kegiatan RBP 2026 merupakan rangkaian kegiatan, antara lain lomba lari 5K dan 10K, Expo UMKM, edukasi kebanksentralan, Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, perlindungan konsumen, kegiatan terkait pengendalian inflasi, berbagai aktivitas interaktif yaitu aplikasi Jasirah untuk mendukung pariwisata, library in motion dari perpustakaan BI Jateng dan cheering point di sepanjang rute lari.

Tema "Lari untuk Berbagi" mengandung makna bahwa selain menjadi ajang olahraga, RBP 2026 juga menjadi media untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia mendukung pengembangan "sport tourism" yang mengintegrasikan olahraga, pemberdayaan ekonomi, edukasi kebanksentralan, dan kepedulian sosial.

Semangat berbagi diwujudkan melalui penyaluran donasi dan penyediaan fasilitas Wakaf Digital, sementara pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan literasi, penguatan kapasitas UMKM, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kegiatan lomba lari 5K dan 10K yang merupakan kegiatan utama RBP 2026 yang diikuti oleh lebih dari 4.000 pelari dari berbagai daerah di Jateng maupun dari luar Jateng, termasuk Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jateng M Noor Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan RBP 2026.

Bank Indonesia berharap RBP dapat terus berkembang sebagai media komunikasi kebijakan yang inovatif melalui pendekatan sport tourism, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah.

Berlari untuk Berbagi

Sejalan dengan semangat "Lari untuk Berbagi", kegiatan tersebut diharapkan juga mampu menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat Jateng.

Dari pendaftaran peserta lari 5K dan 10K pada RBP 2026, diperoleh penerimaan sebesar Rp633.365.000 yang akan disumbangkan kepada masyarakat di Kecamatan Borobudur dalam bentuk dukungan program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah desa di sekitar kawasan Borobudur.

Aspek "Berbagi" juga diwujudkan dalam bentuk penguatan kepedulian sosial masyarakat melalui Program Wakaf Digital, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk wakaf secara nontunai dalam berbagai pilihan wakaf untuk sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Rupiah Borobudur Playon 2026, diharapkan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Jawa Tengah melalui meningkatnya kunjungan wisata, length of stay wisatawan, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sekaligus, menumbuhkan daya saing UMKM, meningkatnya literasi masyarakat, serta penguatan dukungan terhadap pengendalian inflasi dan budaya hidup sehat.

Dengan sinergi yang terus terjalin antara BI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, RBP diharapkan terus berkembang sebagai agenda unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Berdayakan Ekonomi Daerah

Dari kegiatan RBP 2026 diperkirakan menarik lebih dari 10.000 pengunjung sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil kajian dampak ekonomi RBP 2025, penyelenggaraan kegiatan ini menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari Rp10 miliar dan memberikan "multiplier effect" pada sektor akomodasi, penyediaan makan dan minum, perdagangan, transportasi, serta jasa lainnya.

Dampak positif tersebut diharapkan dapat terus terjaga dan semakin diperkuat melalui penyelenggaraan RBP 2026.

Melalui RBP 2026, Bank Indonesia memanfaatkan "sport tourism" sebagai media strategis untuk memperluas komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan komunikasi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah.

Kegiatan Expo UMKM diikuti oleh 54 UMKM binaan BI Provinsi Jateng dan Pemerintah Kabupaten yang menawarkan berbagai produk kuliner, fesyen, kriya, hingga produk olahraga.

Kehadiran Expo UMKM diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan transaksi, dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Tengah kepada masyarakat maupun wisatawan.

Mengacu pada capaian penyelenggaraan tahun 2025, peningkatan jumlah tenant pada tahun ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi RBP dalam mendorong aktivitas ekonomi dan daya saing UMKM daerah.

Peningkatan Literasi dan Dukungan pada GPIPS

Pada kesempatan tersebut, BI juga melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Literasi Rupiah bersama tujuh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jateng.

Kesepakatan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi CBP Rupiah hingga ke tingkat daerah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara semakin kuat.

Dalam hal edukasi dan peningkatan literasi masyarakat, BI juga menghadirkan program edukasi CBP Rupiah, sistem pembayaran digital dan perlindungan konsumen.

Pada kesempatan itu, peserta lomba lari diajak memahami pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, termasuk melalui "cheering point" di sepanjang rute lari.

Pojok Edukasi Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen juga hadir menyediakan berbagai kuis dan permainan interaktif guna mendorong pemanfaatan sistem pembayaran digital serta meningkatkan pemahaman masyarakat untuk bertransaksi secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Selanjutnya, melalui Library in Motion, Perpustakaan BI Jateng menghadirkan layanan literasi kebanksentralan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat tugas dan peran BI melalui koleksi buku, kuis edukatif dan berbagai aktivitas literasi yang menarik.

Rangkaian RPB 2026 juga menghadirkan kegiatan yang mendukung Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Strategis (GPIPS) melalui talkshow pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, demonstrasi memasak pangan lokal, serta kampanye diversifikasi pangan.

Pada kesempatan itu juga diberikan healthy snack berbahan dasar mocaf kepada 100 pengambil racepack pertama sebagai bentuk edukasi pemanfaatan produk diversifikasi olahan yang mendukung pengendalian inflasi, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta pemberdayaan petani di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jateng Dr. Ir. Ar Hanung Triyono, M.Si menegaskan bahwa RBP 2026 bukan sekadar ajang lari, melainkan mesin penggerak ekonomi, pariwisata, dan kepedulian sosial.

Kehadiran ribuan pelari dan pengunjung mampu menggerakkan berbagai sektor perekonomian, sebab setiap peserta diajak tidak hanya mengejar garis finish, tetapi juga membawa semangat hidup sehat, mencintai Rupiah, mendukung UMKM lokal, serta ikut menggerakkan perekonomian Jateng.

Pemkab Batang catat realisasi PAD selama semester I 2026 mencapai Rp108 miliar

Senin, 6 Juli 2026 15:01 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637476/pemkab-batang-catat-realisasi-pad-selama-semester-i-2026-mencapai-rp108-miliar>

Batang, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama semester pertama 2026 mencapai Rp108 miliar atau sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan Rp240,69 miliar.

"Pencapaian ini masih berada di jalur yang aman meski belum menyentuh separuh dari target PAD yang ditetapkan Rp240,69 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih di Batang, Jateng, Senin.

Menurut dia, pemerintah daerah kini tengah bersiap memanfaatkan sisa waktu enam bulan ke depan untuk menutup celah dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp240,691 miliar.

Sedangkan, penerimaan kas daerah yang masih menjadi andalan PAD Pemkab Batang, kata dia, berasal dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"Sebagian besar jenis pajak daerah sebenarnya sudah tampil impresif dengan melampaui realisasi 50 persen," katanya.

Ia mengatakan penerimaan pendapatan asli daerah yang masih perlu ditingkatkan adalah pajak bumi dan bangunan yang kini baru mencapai 22 persen serta opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 39 persen.

"Dua sektor ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan karena capaiannya yang masih tertinggal," katanya.

Ia, yang didampingi Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anisah, mengatakan masih rendahnya realisasi pajak bumi dan bangunan di paruh pertama dinilai sebagai hal yang lumrah, karena surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) untuk sektor perusahaan baru didistribusikan sekitar April hingga Mei 2026.

"Terlebih lagi, korporasi biasanya baru akan melunasi kewajiban mereka mendekati batas akhir. Jatuh tempo pembayaran PBB perusahaan berlangsung pada Agustus 2026 dan mereka memilih melunasi kewajibannya menjelang batas akhir pembayaran," katanya.

Gubernur Jateng: APBD tetap terjaga meski tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal

Senin, 6 Juli 2026 08:21 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637424/gubernur-jateng-apbd-tetap-terjaga-meski-tekanan-ekonomi-global-dan-keterbatasan-fiskal>

Magelang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada semester I-2026 tetap terjaga meski dihadapkan pada tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal.

Luthfi di Magelang, Minggu, menyampaikan kondisi tersebut dapat dicapai karena pemerintah memfokuskan belanja daerah pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan menanggapi apresiasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global dan keterbatasan fiskal.

Ia mengatakan, belanja daerah difokuskan pada infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor produktif, sehingga tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"APBD harus kita gunakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," katanya usai kegiatan Rupiah Borobudur Playon di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.

Dengan cara itu, katanya, ekonomi Jateng terus tumbuh. Buktinya, perekonomian di Jawa Tengah masih dapat tumbuh 5,89 persen atau di atas rata-rata nasional. Dengan realisasi investasi pada 2025 sebesar Rp110,02 triliun dan pada triwulan I-2026 sudah mencapai Rp23 triliun. Tak ayal, juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen.

"Serapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 92 ribu pada triwulan I-2026. Investasi di Jawa Tengah didominasi oleh padat karya," ucap dia.

Capaian-capaian itu, lanjut dia, tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, perguruan tinggi, perbankan, hingga perusahaan swasta.

Tak hanya itu, peran masyarakat dan media massa juga penting dalam memberikan kritik dan saran terkait pembangunan di Jawa Tengah.

Kritik konstruktif sangat penting untuk mengoreksi apabila ada kekurangan dalam kinerja pemerintah daerah.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah masih tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global.

Berdalih Isu Kerja Paksa, AS Racik Rencana Tarif Impor Baru

Selasa, 7 Juli 2026 18:30 WIB

Laura Curtis dan Alicia Diaz

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114213/berdalih-isu-kerja-paksa-as-racik-rencana-tarif-impor-baru/2>

Bloomberg, Sidang dengar pendapat (hearing) selama tiga hari terkait rencana terbaru Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) untuk memberlakukan tarif impor baru terhadap sejumlah mitra dagang utama resmi dimulai di Washington pada hari Selasa (7/7).

Langkah ini menyusul investigasi yang diluncurkan AS pada Maret lalu terhadap kebijakan larangan kerja paksa di 60 negara. AS menggunakan landasan undang-undang yang mengizinkan pengenaan tarif terhadap negara-negara yang dinilai secara tidak adil membebani perdagangan AS. Landasan hukum kali ini dinilai lebih kuat dibanding wewenang darurat yang digunakan Donald Trump tahun lalu, di mana tarif tersebut akhirnya dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS pada Februari.

Pada awal Juni, USTR memutuskan bahwa setiap negara yang diinvestigasi telah gagal untuk "menerapkan dan menegakkan larangan impor komoditas hasil kerja paksa secara efektif." Atas dasar itu, USTR merekomendasikan agar barang-barang yang masuk ke AS dari negara-negara tersebut dikenakan bea masuk tambahan sebesar 10% hingga 12,5%.

Sebagai bagian dari proses, puluhan pihak terkait akan memaparkan argumen mereka—baik yang mendukung maupun menolak bea masuk ini—di hadapan pejabat perdagangan AS. Pejabat Gedung Putih secara terbuka menyatakan rencana mereka memanfaatkan investigasi kerja paksa ini demi mengembalikan tarif pajak impor ke level yang sama saat Trump menerapkan kebijakan tarif darurat terdahulu.

Sementara proses sidang berjalan, pemerintah AS saat ini masih memberlakukan tarif global sementara sebesar 10% yang dijadwalkan akan berakhir pada akhir bulan ini.

Di tempat terpisah, USTR minggu ini juga menggelar sidang khusus mengenai kebijakan dan praktik dagang Brasil. Flávio Bolsonaro, senator Brasil sekaligus putra dari mantan Presiden Jair Bolsonaro, dijadwalkan memberikan kesaksian pada hari Selasa ini. Ia diperkirakan akan mendesak pemerintahan Trump untuk tidak menjatuhkan tarif baru pada ekspor Brasil sebelum pemilu Oktober mendatang, serta meminta agar sistem pembayaran instan populer di Brasil, Pix, tidak dijadikan sasaran hambatan dagang.

"Tarif yang diusulkan ini justru akan menguntungkan pihak pelanggar yang seharusnya dihukum," tulis Bolsonaro dalam berkasnya ke USTR. Ia berargumen bahwa langkah AS ini justru akan mendongkrak popularitas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang elektabilitasnya sempat naik setelah membingkai tekanan AS sebelumnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Brasil.

Agenda Sidang Hari Selasa

Pada sesi pertama mengenai isu kerja paksa, USTR akan mendengarkan paparan dari panel pejabat pemerintah, termasuk Ernesto Acevedo Fernández dari Meksiko, mengenai "bagaimana Mekanisme Kerja Paksa USMCA milik Meksiko secara efektif menegakkan larangan impor berbasis kerja paksa." Diplomat dan pejabat perdagangan dari Chile, Ekuador, Guatemala, Guyana, Honduras, dan Peru juga dijadwalkan memberikan pemaparan.

Panel kedua pada hari Selasa akan diisi oleh American Line Pipe Producers Association dan Steel Manufacturers Association. Asosiasi tersebut akan bersaksi mendukung pengenaan tarif demi

membendung apa yang mereka sebut sebagai banjir impor produk baja, yang dinilai dipicu oleh standar upah buruh yang rendah serta absennya larangan impor atas barang hasil kerja paksa di negara asal.

Sebaliknya, American Petroleum Institute (API) akan meminta USTR untuk membatalkan rencana tarif pada input industri yang dinilai sangat krusial bagi sektor minyak dan gas. Sektor lobi tersebut menegaskan bahan baku ini tidak memiliki kaitan dengan kerja paksa. Komoditas tersebut "sama sekali tidak dapat dipasok dari dalam negeri, atau jumlahnya tidak mencukupi bagi industri yang bertanggung jawab untuk memenuhi target Pemerintahan Trump dalam mencapai dominasi energi AS."

Sesi berikutnya akan diisi oleh mantan pejabat USTR yang menilai investigasi ini telah menyalahgunakan tujuan asli dari Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 (Section 301 of the Trade Act of 1974), berdasarkan naskah kesaksian yang diterima Bloomberg News.

"Pejabat senior pemerintah menggambarkan tujuan kebijakan ini bukan untuk mengatasi 'tindakan, kebijakan, dan praktik' tidak wajar yang membebani perdagangan AS, melainkan murni untuk menghidupkan kembali besaran tarif yang diatur dalam dekret 'IEEPA' yang ilegal tahun lalu," ujar Ed Gresser, yang kini menjabat Wakil Presiden dan Direktur Perdagangan serta Pasar Global di Progressive Policy Institute.

Gresser siap berargumen bahwa laporan USTR gagal membuktikan bahwa negara-negara dalam daftar tersebut benar-benar membeli barang hasil kerja paksa, atau membebani perdagangan Amerika. "Oleh karena itu, tarif yang direkomendasikan—yang setara dengan beban biaya baru sekitar US\$100 miliar (sekitar Rp1.500 triliun) per tahun bagi warga Amerika—adalah langkah yang tidak tepat dan tidak boleh dipertahankan," tegas Gresser.

Agenda Sidang Hari Rabu

Pada hari Rabu, Coalition for Fair Trade in Seafood akan menuntut pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk komoditas alut dari Vietnam, khususnya di industri pengolahan, yang menurut mereka sangat rentan terhadap praktik kerja paksa dan mempekerjakan anak di bawah umur. Perwakilan dari India, Yordania, dan Pakistan juga dijadwalkan berbicara pada hari yang sama.

Perwakilan Pakistan diprediksi akan berargumen bahwa rekomendasi USTR "tidak proporsional karena tidak adanya bukti nyata terkait kerja paksa pada barang ekspor Pakistan, ditambah fakta bahwa Pakistan telah memberlakukan undang-undang larangan impor atas produk sejenis."

Kelompok hak asasi manusia termasuk China Labor Watch juga dijadwalkan bersaksi. Mereka akan menegaskan bahwa "setiap perlakuan tarif khusus, termasuk mekanisme tekstil yang diusulkan atau mekanisme serupa di sektor tertentu, hanya boleh diterapkan pada produk yang dapat diverifikasi secara kredibel dan independen bebas dari kerja paksa."

Agenda Sidang Hari Kamis

Rangkaian sidang akan ditutup dengan pemaparan dari Footwear Distributors & Retailers of America serta National Council of Textile Organizations, yang bergabung dalam satu panel dengan American Cotton Producers.

Perwakilan pemerintah dari Korea Selatan, Sri Lanka, dan Afrika Selatan juga akan berbicara, termasuk utusan dari Vietnam yang akan menyanggah temuan USTR bahwa negaranya "telah gagal menerapkan dan menegakkan langkah-langkah penanganan terhadap barang yang berkaitan dengan kerja paksa."

Pada sesi terakhir, para pejabat perdagangan AS akan mendengarkan kesaksian dari berbagai lintas sektor ekonomi AS, termasuk American Trailer Manufacturers Coalition, merek alat masak premium Le Creuset, Cigar Association of America, serta sejumlah perusahaan perangkat medis.

Le Creuset dalam berkasnya ke USTR menunjukkan bahwa perusahaan mereka mempekerjakan hampir 800 orang di AS, meskipun produk alat masak mereka tidak diproduksi di dalam negeri. Produk alat masak besi cor berlapis enamel mereka "tidak menimbulkan risiko bagi manufaktur Amerika karena fakta bahwa tidak ada produksi dalam negeri yang sebanding untuk memenuhi permintaan produk premium tersebut," tulis pihak perusahaan.

Ekspansi Sektor Jasa AS Berlanjut, Perekrutan Karyawan Naik

Selasa, 7 Juli 2026 06:22 WIB

Reade Pickert

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114129/ekspansi-sektor-jasa-as-berlanjut-perekrutan-karyawan-naik/2>

Bloomberg, Sektor jasa di Amerika Serikat (AS) terpantau terus mengalami ekspansi pada bulan Juni, meskipun dengan ritme yang sedikit melambat. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan mulai kembali meningkatkan jumlah perekrutan karyawan seiring dengan mulai meredanya tekanan beban biaya operasional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM) pada hari Senin (6/7/2026), indeks sektor jasa ISM turun tipis 0,5 poin ke level 54. Angka di atas 50 mengindikasikan adanya pertumbuhan, dan realisasi bulan Juni ini terpantau sejalan dengan ekspektasi para ekonom.

Meskipun indikator aktivitas bisnis dan pesanan baru menunjukkan perlambatan, kedua instrumen tersebut tetap mengonfirmasi adanya tingkat permintaan pasar yang solid. Sementara itu, indeks ketenagakerjaan ISM justru melonjak tajam dengan kenaikan tertinggi sejak tahun 2024, yang menandai peningkatan jumlah karyawan untuk pertama kalinya sejak bulan Februari lalu.

Dari sisi inflasi produsen, tren kenaikan harga terpantau masih berlanjut namun dalam ritme yang jauh lebih tenang. Indeks harga yang dirilis kelompok tersebut merosot ke level terendah dalam empat bulan terakhir di posisi 67,7.

Kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran menjadi faktor utama yang mendorong jatuhnya harga minyak mentah dan bensin dalam beberapa pekan terakhir, setelah sempat meroket akibat pecahnya perang. Meskipun dunia usaha masih harus menghadapi tekanan biaya di sektor lain, pelonggaran harga energi ini—ditambah dengan daya beli konsumen yang tangguh—memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk melanjutkan rencana ekspansi tenaga kerja mereka.

Steve Miller, Ketua Komite Survei Bisnis Jasa ISM, dalam konferensi pers bersama awak media menyebutkan bahwa masifnya perekrutan tenaga kerja terkait penyelenggaraan Piala Dunia kemungkinan besar turut menjadi penyumbang utama di balik melonjaknya indeks ketenagakerjaan tersebut.

Di lain pihak, data resmi pemerintah yang dirilis pekan lalu justru menunjukkan potret ketenagakerjaan yang sedikit berbeda. Data non-farm payrolls (NFP) AS dilaporkan tumbuh melambat pada bulan Juni, setelah sempat mencatatkan kenaikan yang kuat dalam tiga bulan berturut-turut sebelumnya.

Laporan ISM bulan Juni mencatat ada 14 sektor industri yang sukses membukukan pertumbuhan, dipimpin oleh sektor seni dan hiburan, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan layanan makanan. Sebaliknya, empat sektor industri tercatat mengalami kontraksi, dengan penurunan terdalam terjadi pada sektor pertanian serta jasa pendidikan.

Komentar dari sejumlah sektor industri

"Kami masih menghadapi kenaikan harga akibat konflik di Teluk Persia melalui meningkatnya biaya bahan bakar diesel dan kenaikan harga bahan baku kemasan berbasis resin. Dampak terbesar baru akan terasa pada kuartal ketiga 2026, tetapi kami sudah mulai merasakannya sekarang. Para pemasok secara agresif berupaya meneruskan kenaikan harga kepada pelanggan." — Akomodasi & Jasa Makanan

"Selain persoalan yang sudah diketahui terkait manufaktur semikonduktor, kini muncul kekhawatiran mengenai ketersediaan memori yang secara signifikan memengaruhi pola pembelian produsen peralatan asli (OEM). Hal itu berdampak pada ketersediaan barang dan memengaruhi keputusan pembelian perusahaan kami, termasuk berapa lama kami mempertahankan aset yang ada, seberapa sering kami melakukan pembaruan, dan bagaimana kami menyusun kontrak pemeliharaan." — Keuangan & Asuransi

"Meski menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi yang masih tinggi, jumlah pasien dan aktivitas bisnis secara keseluruhan tetap kuat, terutama tercermin dari kinerja pendapatan yang sangat baik... Kondisi tenaga kerja stabil karena kami terus merekrut pegawai tetap dan prospek ke depan masih positif. Seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah, kami mulai mendengar adanya potensi kenaikan harga barang, meski dampaknya belum terlihat. Kenaikan biaya akan menjadi perhatian utama pada kuartal berikutnya." — Layanan Kesehatan & Bantuan Sosial

"Permintaan tetap kuat untuk proyek infrastruktur, lingkungan, dan ketahanan. Namun, proses pengadaan masih menghadapi tekanan akibat inflasi biaya tenaga kerja, keterbatasan kapasitas pemasok, serta kompleksitas regulasi, khususnya di California dan wilayah lain dengan biaya tinggi." — Jasa Profesional, Ilmiah & Teknis

"Bisnis berjalan sangat baik pada periode yang biasanya kurang ramai. Harga stabil, tingkat tenaga kerja sesuai harapan, dan rantai pasok berjalan lancar tanpa kendala." — Perdagangan Ritel

Indikator persediaan barang, yang melonjak pada Mei, turun tajam pada Juni. Miller mengatakan penurunan tersebut menunjukkan perusahaan tidak lagi menimbun barang untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok akibat perang. Di sisi lain, indikator pesanan yang belum terselesaikan justru meningkat.

Miller juga menyebut responden semakin jarang menyinggung harga produk minyak bumi. Namun, tarif impor masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan. Ia juga mencatat adanya peningkatan jumlah komoditas yang dilaporkan mengalami kelangkaan sepanjang Juni.

"Seluruh komoditas yang mengalami kelangkaan pada Juni merupakan bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pusat data (data center)," ujar Miller.

Defisit Dagang AS Melonjak 42,2%: Investasi AI Picu Rekor Impor Barang Modal

Selasa, 7 Juli 2026 20:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-dagang-as-melonjak-422-investasi-ai-picu-rekor-impor-barang-modal>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) melebar tajam pada bulan Mei 2026 karena lonjakan investasi kecerdasan buatan membantu mendorong impor barang

modal ke rekor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tetap menjadi penghambat produk domestik bruto pada kuartal II-2026.

Selasa (7/7/2026), Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan AS melaporkan, defisit perdagangan AS melonjak 42,2% menjadi \$77,6 miliar per Mei 2026. Defisit tersebut lebih rendah dari proyeksi para ekonom yang disurvei oleh Reuters dengan perkiraan defisit sebesar US\$ 78,5 miliar.

Impor AS meningkat 3,3% menjadi US\$ 395,3 miliar, dengan impor barang modal melonjak ke rekor tertinggi US\$ 128,0 miliar.

Perusahaan-perusahaan banyak berinvestasi pada AI, yang perkembangannya sangat bergantung pada impor.

Sementara itu, ekspor AS turun 3,2% menjadi US\$ 317,7 miliar, meskipun pengiriman minyak bumi mencapai rekor tertinggi di tengah konflik Timur Tengah. AS adalah pengeksport minyak bersih.

Perdagangan telah mengurangi PDB selama dua kuartal berturut-turut. Model Federal Reserve Atlanta saat ini memperkirakan PDB akan meningkat pada tingkat tahunan 1,2% pada kuartal II-2025.

Di mana, ekonomi AS tumbuh dengan laju 2,1% pada periode Januari-Maret 2026.

Inflasi Filipina Melambat Jadi 6,4% pada Juni, di Bawah Ekspektasi Pasar

Selasa, 7 Juli 2026 08:44 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-filipina-melambat-jadi-64-pada-juni-di-bawah-ekspektasi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Laju inflasi tahunan Filipina melambat pada Juni 2026. Penurunan ini didorong oleh perlambatan kenaikan biaya transportasi, meski inflasi inti (core inflation) justru menunjukkan peningkatan.

Mengutip Reuters, Selasa (7/7/2026), badan statistik Filipina melaporkan inflasi tahunan berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) mencapai 6,4% pada Juni, lebih rendah dibandingkan 6,8% pada Mei.

Realisasi tersebut juga berada di bawah median proyeksi ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan inflasi sebesar 6,6%.

Angka itu masih berada dalam kisaran proyeksi Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) sebesar 6,0% hingga 7,0% untuk Juni.

Dengan capaian tersebut, rata-rata inflasi Filipina sepanjang semester pertama 2026 tercatat 4,8%.

Meski inflasi utama melambat, inflasi inti (core inflation) yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan energi yang bergejolak—justru meningkat menjadi 4,4% pada Juni, dari 4,1% pada Mei.

Kenaikan inflasi inti mengindikasikan tekanan harga yang mendasari di perekonomian masih bertahan.

Sebelumnya, pada Juni lalu, Bank Sentral Filipina menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sebagai upaya menahan laju inflasi.

Selanjutnya, pasar akan mencermati rapat kebijakan moneter BSP yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 untuk melihat arah kebijakan suku bunga berikutnya.

Yen Kembali Dekati Level Terendah 40 Tahun, Pasar Uji Kesabaran Jepang

Selasa, 7 Juli 2026 08:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-kembali-dekati-level-terendah-40-tahun-pasar-uji-kesabaran-jepang>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/7/2026), mendekati level terendah dalam 40 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pelaku pasar semakin berani menekan yen karena hingga kini belum terlihat adanya intervensi dari otoritas Jepang untuk menopang mata uang tersebut.

Meski demikian, risiko intervensi mendadak dari pemerintah Jepang membuat pelemahan yen masih relatif terbatas.

Pada awal perdagangan Asia, yen bergerak di kisaran lebih lemah dari 162 per dolar AS.

Mata uang Jepang itu juga berada di dekat level terendah terhadap poundsterling sejak 2007, yakni 217,09 yen per pound, setelah sempat mencetak level terendah baru pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, euro diperdagangkan di level 185,47 yen setelah menguat 0,5% pada sesi sebelumnya.

Analisis Senior Valuta Asing MUFG Lee Hardman mengatakan pada akhir pekan lalu sempat muncul spekulasi bahwa pemerintah Jepang akan melakukan intervensi saat pasar AS libur sehingga likuiditas lebih tipis. Namun, hingga kini langkah tersebut belum dilakukan.

"Spekulasi sempat muncul bahwa Jepang akan kembali melakukan intervensi untuk mendukung yen saat pasar AS libur. Namun karena tidak ada tindakan yang dilakukan, yen kembali kehilangan sebagian penguatannya," ujarnya.

Pekan lalu, yen sempat menguat karena pelaku pasar mewaspadai kemungkinan perubahan strategi intervensi pemerintah Jepang.

Namun, mereka menilai lonjakan nilai tukar pada Kamis lalu bukan merupakan indikasi adanya intervensi resmi.

Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed memudar

Di pasar global, dolar AS bergerak cenderung melemah setelah investor kembali memangkas ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve tahun ini menyusul data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan.

Euro naik tipis ke level US\$ 1,1442, melanjutkan penguatan pada sesi sebelumnya. Sementara itu, poundsterling menguat ke US\$ 1,34005, tertinggi dalam lebih dari dua pekan.

Indeks dolar AS terhadap sekeraanjang mata uang utama berada di level 100,86.

Pelaku pasar kini memperkirakan total kenaikan suku bunga The Fed hingga Desember hanya sekitar 29 basis poin, turun dibandingkan sekitar 38 basis poin sepekan lalu.

Strategis mata uang Commonwealth Bank of Australia Carol Kong menilai, ekspektasi pasar saat ini masih terlalu rendah.

"Saya melihat ekspektasi pasar saat ini sedikit terlalu rendah. Kami masih memperkirakan FOMC akan mulai menaikkan suku bunga pada Desember. Pasar memperkirakan siklus kenaikan dimulai lebih cepat, tetapi besaran kenaikannya masih lebih kecil dari proyeksi kami," katanya.

Perhatian investor kini tertuju pada risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Juni yang akan dirilis Rabu (8/7).

Dokumen tersebut diharapkan memberi petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga AS.

Menurut Kong, risalah rapat kali ini kemungkinan tidak akan memberikan banyak informasi baru karena Ketua The Fed Kevin Warsh diketahui tidak menyukai pemberian panduan (forward guidance) mengenai arah kebijakan moneter.

Di pasar mata uang lainnya, dolar Australia stabil di US\$ 0,6955, sedangkan dolar Selandia Baru naik tipis 0,02% menjadi US\$ 0,5702.

Won Korea Selatan Memimpin Penguatan Mata Uang Asia, Rupiah Masih Tertahan

Selasa, 7 Juli 2026 09:42 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-memimpin-penguatan-mata-uang-asia-rupiah-masih-tertahan>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (7/7/2026).

Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan, sementara baht Thailand mencatat pelemahan terdalam.

Berdasarkan data Reuters hingga pukul 02.03 GMT, won Korea Selatan menguat 0,28% ke level 1.525,80 per dolar AS.

Yen Jepang juga terapresiasi 0,17% ke 161,81 per dolar AS, diikuti ringgit Malaysia yang naik 0,15%, dolar Singapura menguat 0,10%, peso Filipina bertambah 0,09%, serta yuan China menguat 0,08%.

Di sisi lain, baht Thailand melemah 0,23% menjadi 33,305 per dolar AS, sedangkan dolar Taiwan turun 0,14%.

Sementara itu, rupiah diperdagangkan stabil di level Rp 17.985 per dolar AS atau tidak berubah dibandingkan penutupan sebelumnya. Rupee India juga bergerak datar di level 95,395 per dolar AS.

Secara year to date (YTD), rupiah masih menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terdalam terhadap dolar AS.

Sejak akhir 2025, rupiah telah terdepresiasi sekitar 7,31%, dari Rp 16.670 menjadi Rp 17.985 per dolar AS.

Selain rupiah, won Korea Selatan melemah 5,66% sepanjang tahun berjalan, baht Thailand turun 5,57%, rupee India terdepresiasi 5,79%, peso Filipina melemah 4,23%, yen Jepang turun 3,19%, dolar Taiwan terkoreksi 1,97%, ringgit Malaysia melemah 0,49%, dan dolar Singapura turun 0,40%.

Berbeda dengan mayoritas mata uang Asia, yuan China justru masih mencatat penguatan sekitar 2,96% terhadap dolar AS sepanjang 2026.

Purbaya Perkirakan Defisit APBN 2026 Mencapai 2,85% PDB

Selasa, 7 Juli 2026 19:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114220/purbaya-perkiraan-defisit-apbn-2026-mencapai-2-85-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Kenaikan defisit tahun ini terjadi seiring meningkatnya proyeksi belanja negara yang melampaui pagu anggaran. Dalam outlook APBN 2026 yang dipaparkan, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.

Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pembiayaan anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi Rp734,3 triliun untuk menutup defisit yang melebar.

"Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah," ungkap Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Kenaikan belanja negara ini didorong oleh kebutuhan mendukung berbagai program prioritas. Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) diproyeksikan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9% dari pagu APBN.

Sementara itu, belanja non KL diperkirakan mencapai Rp1.615,1 triliun atau 98,5% dari pagu APBN. Transfer ke daerah (TKD) juga diproyeksikan mencapai Rp696,9 triliun atau 100,6% dari pagu APBN.

Selain itu, pemerintah mengusulkan tambahan belanja sebesar Rp132 triliun yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah, terutama pembayaran subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Sementara dari sisi penerimaan perpajakan diproyeksikan hanya mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7% dari target, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau 98% dari target dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp320,6 triliun atau 95,4% dari target.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan menjadi penopang utama pendapatan negara dengan outlook mencapai Rp 575,1 triliun atau 125,2% dari target APBN.

Purbaya Ungkap Defisit APBN Semester I-2026 Hanya 0,76% PDB

Selasa, 7 Juli 2026 19:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114218/purbaya-ungkap-defisit-apbn-semester-i-2026-hanya-0-76-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I-2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut meningkat dari posisi defisit Mei 2026 yang sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap PDB.

Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang signifikan meningkat.

Purbaya menuturkan pendapatan negara hingga Semester I-2026 sebesar Rp1.459,4 triliun, atau setara 46,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan negara ini mengalami pertumbuhan sebesar 21,4% year on year (yoy).

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak bea dan cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau setara 43,1% dari target pagu APBN. Realisasi ini juga naik 17,8% yoy.

Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp452 triliun atau sudah 65,6% dari target APBN 2026.

Penerimaan Pajak Semester I-2026 Naik 24% Jadi Rp1.035 T

Selasa, 7 Juli 2026 18:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114217/penerimaan-pajak-semester-i-2026-naik-24-jadi-rp1-035-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak hingga Semester I-2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi tersebut telah mencapai 43,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan menjadi pembalikan dari tren kontraksi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya.

Purbaya mengungkapkan lonjakan penerimaan pajak ditopang oleh kondisi ekonomi domestik yang tetap terjaga, implementasi sistem Coretax yang semakin efektif, serta penguatan berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

"Ini tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang saya bilang tadi negatif," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Meskipun sistem Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan, kata dia, sistem tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara. Dia berjanji akan memperbaiki Coretax ke depannya.

"Jadi walaupun Coretax ada cacatnya, tapi dampaknya cukup signifikan juga untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Kita akan perbaiki terus kelemahan-kelemahan di Coretax supaya ke depan masyarakat semakin gampang menggunakan Coretax sehingga pajak naik lagi," ujarnya.

Dari sisi jenis pajak, hampir seluruh kelompok penerimaan mencatatkan pertumbuhan positif. PPh Badan beserta setoran deposit mencapai Rp196,1 triliun atau meningkat 28,6% dibandingkan tahun sebelumnya seiring membaiknya profitabilitas dunia usaha.

Sementara itu, penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan deposit terealisasi sebesar Rp146 triliun atau tumbuh 13,6% secara tahunan. Adapun PPh Final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26 mencapai Rp159,9 triliun atau meningkat 1,4%.

Di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM mencatat pertumbuhan paling tinggi. Hingga akhir Juni 2026, penerimaannya mencapai Rp380 triliun atau melonjak 42,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, tingginya pertumbuhan PPN menunjukkan konsumsi domestik masih cukup kuat dan aktivitas ekonomi terus membaik. Dia menyebut pemerintah akan terus memperkuat pengawasan kepatuhan berbasis risiko, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta menyempurnakan administrasi perpajakan untuk menjaga momentum penerimaan hingga akhir tahun.

Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh hampir seluruh sektor utama ekonomi. Kontributor terbesar berasal dari sektor perdagangan dengan porsi 25,6%, diikuti industri pengolahan sebesar 22,8%.

Dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 45,9%, disusul sektor pertambangan sebesar 22,8% dan industri pengolahan yang tumbuh 19,9%.

Purbaya menjelaskan, tingginya penerimaan dari sektor perdagangan didorong oleh meningkatnya harga berbagai komoditas serta berkembangnya aktivitas perdagangan digital.

Sementara itu, industri pengolahan memperoleh manfaat dari membaiknya harga dan profitabilitas, terutama pada subsektor industri minyak kelapa sawit.

Dia menjelaskan sektor pertambangan tetap memberikan kontribusi positif, khususnya dari subsektor migas. Selain itu, sektor pengangkutan, konstruksi, real estate, dan jasa perusahaan juga menunjukkan kinerja yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas ekonomi domestik.

"Pertumbuhan yang lebih merata ini menjadi indikasi bahwa basis penerimaan negara semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada sektor tertentu," tutur dia.

Respons BI Soal Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp18.000/US\$

Selasa, 7 Juli 2026 17:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114207/respons-bi-soal-rupiah-kembali-melemah-ke-level-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di level Rp18.000/US\$ terjadi karena sinyal hawkish yang disampaikan pejabat Federal Reserve (The Fed) hingga indeks dolar AS yang melemah di posisi 101.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pernyataan pejabat The Fed mengindikasikan Fed Funds Rate (FFR) di masa yang akan datang atau hingga akhir tahun akan terus menguat. Kondisi tersebut mengakibatkan indeks dolar (DXY) bereaksi sehingga pada akhir Juni berada di level 101.

“Bahwa angka 101 adalah angka tertinggi dalam satu tahun terakhir untuk DXY. Jadi kombinasi signal hawkish pejabat The Fed dan juga diikuti dengan naiknya DXY pada level tertinggi dalam satu tahun terakhir inilah yang membuat nilai tukar sejumlah negara itu melemah terhadap dolar AS,” kata Denny ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2026).

Denny menjelaskan berdasarkan data yang telah dihimpun, mata uang sejumlah negara lain juga melemah. Dia mengungkapkan mata uang Rusia bahkan paling lemah dibandingkan emerging market lainnya, yakni melemah 5,5%. Kemudian mata uang Chili melemah sekitar 4%, mata uang Thailand yakni Baht melemah 2,3%.

Kemudian rupiah juga melemah 1,4%, Won dan Peso masing-masing melemah 1%. Lalu Rupee juga melemah sekitar 0,7% serta Renminbi melemah 0,5%.

Dia menegaskan BI tidak akan tinggal diam karena bank sentral akan menjaga stabilitas rupiah karena akan berada di pasar selama 24 jam.

“Bank Indonesia seperti biasa akan all out. Kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri dengan transaksi di pasar spot, di pasar NDF, di pasar DNDF dan juga melakukan komunikasi intens dengan pelaku pasar,” jelas Denny.

Bagaimanapun, kata dia, perkembangan rupiah hingga saat ini relatif masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lain di emerging market. Dia berharap ke depannya rupiah akan mulai menguat terhadap dolar AS dan stabil.

“Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap dolar AS,” imbuhnya.

Rupiah membuka sesi perdagangan Selasa (7/7/2026) dengan pelemahan 0,03% ke Rp18.000/US\$. Namun lama berselang rupiah menguat terbatas 0,04% ke posisi Rp17.988/US\$ pada 09:05 WIB. Lalu, rupiah melanjutkan penguatan terbatas ke posisi Rp17.980/US\$ pada 09:23 WIB.

Pergerakan rupiah cukup liar di awal pekan ini, dan sempat tercatat melemah Rp18.006/US\$ pada sesi intraday pukul 14:15 WIB kemarin.

Pendapatan Negara Naik 21% Jadi Rp1.459 Triliun Semester I-2026

Selasa, 7 Juli 2026 15:14 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114197/pendapatan-negara-naik-21-jadi-rp1-459-triliun-semester-i-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.459 triliun atau naik 21,4% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding realisasi penerimaan negara pada periode yang sama tahun lalu.

Dia menjelaskan pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun atau naik 21,4% dengan didominasi oleh penerimaan pajak Rp1.035,7 atau tumbuh 24,6%. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun.

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 21,6% atau Rp271 triliun yoy. Sementara penerimaan hibah sebanyak 0,7 triliun atau tumbuh 10,2%.

Dari sisi belanja negara, realisasi telah mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8% (yoy). Belanja ini berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp1.298 triliun, serta transfer ke daerah Rp357,4 triliun.

Dengan kondisi tersebut, APBN mengalami defisit 0,76% pada Juni 2026.

“Kita pastikan anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3%,” kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (7/7/2026).

Banggar DPR: Estimasi Anggaran MBG 2027 Turun 35% Jadi Rp174 T

Selasa, 7 Juli 2026 12:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114171/banggar-dpr-estimasi-anggaran-mbg-2027-turun-35-jadi-rp174-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) memproyeksikan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 bakal turun sekitar 35% atau menjadi sekitar Rp174 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan dengan pagu tahun ini yang mencapai Rp268 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah memastikan alokasi pendanaan untuk program prioritas pemerintah tersebut akan dirasionalisasi pada tahun depan. Estimasi tersebut diperoleh setelah Banggar melakukan serangkaian kalkulasi ulang terhadap sejumlah komponen dan target sasaran program.

"Kalau [anggaran] MBG pasti turun [di 2027]," kata Said saat dikonfirmasi awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/7/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan proyeksi efisiensi anggaran tersebut salah satunya merujuk pada optimalisasi titik Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Said mencatat, dari ketersediaan 27.000 titik SPPG saat ini, kebutuhan riil di lapangan diestimasikan hanya membutuhkan sekitar 21.000 titik.

Di samping itu, angka proyeksi Rp174 triliun tersebut telah dihitung berdasarkan kapasitas untuk melayani sekitar 84 juta siswa sebagai penerima manfaat.

"Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," jelas Said.

Meskipun postur anggaran MBG 2027 dipangkas, Said mengeklaim efisiensi pendanaan ini tidak akan mengurangi standar gizi yang diberikan, melainkan justru menitikberatkan pada tata kelola yang lebih baik.

Adapun terkait dengan legalisasi pagu anggaran tersebut, Said menyebut kepastian angka final baru akan ditetapkan pada akhir kuartal ketiga tahun ini dalam pembahasan RUU APBN 2027. Pengesahan tersebut harus melalui tahapan pembahasan komprehensif bersama pihak eksekutif.

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuh Said.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran untuk program MBG terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir Mei 2026, total dana yang terserap mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53% dibandingkan posisi bulan April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Kemenkeu memerinci dari total 63,13 juta penerima manfaat tersebut, sebanyak 48,9 juta adalah kelompok siswa, sementara 14,3 juta sisanya adalah kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Uang Primer (M0) Tumbuh Melambat di Juni

Selasa, 7 Juli 2026 10:40 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114166/uang-primer-m0-tumbuh-melambat-di-juni/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan perkembangan jumlah uang primer atau M0 per akhir Juni. Terjadi pertumbuhan belasan persen, meski agak melambat.

Pada Selasa (7/7/2026), BI mengumumkan jumlah M0 adjusted pada akhir Juni berada di Rp 2.228 triliun. Naik 13,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Walau masih tumbuh tinggi, sejatinya kenaikan M0 sedikit melambat. Pasalnya, pertumbuhan pada Mei mencapai 14,2% yoy.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 14% yoy dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 12,7% yoy. Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted)," sebut laporan BI.

M0 adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas. Mulai Januari 2025, BI melakukan penyesuaian perhitungan M0 adjusted untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh dari kebijakan likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral.

Cadangan Devisa RI Akhirnya Naik Usai Turun 5 Bulan Beruntun

Selasa, 7 Juli 2026 10:08 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114159/cadangan-devisa-ri-akhirnya-naik-usai-turun-5-bulan-beruntun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa per akhir Juni. Terjadi peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa.

Pada Selasa (7/7/2026), BI mengumumkan cadangan devisa Indonesia untuk posisi akhir Juni berada di US\$ 145,6 miliar. Bertambah US\$ 0,7 miliar dari bulan sebelumnya.

Ini menjadi kenaikan cadangan devisa bulanan perdana sepanjang 2026. Sebelumnya, cadangan devisa selalu turun selama lima bulan berturut-turut.

"Perkembangan posisi cadangan devisa Juni 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," sebut laporan BI.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni, lanjut laporan BI, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Capaian tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang laporan BI.

PM Singapura Bawa Komitmen Investasi Baru, Daya Tarik Indonesia Masih Kuat?

Selasa, 7 Juli 2026 19:26 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/pm-singapura-bawa-komitmen-investasi-baru-daya-tarik-indonesia-masih-kuat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke Indonesia menghasilkan sejumlah komitmen investasi baru yang berpotensi memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

Wong menyampaikan bahwa peluang penanaman modal Singapura di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Salah satu peluang investasi yang menjadi perhatian adalah rencana perluasan Kawasan Industri Kendal hingga mencapai 1.000 hektare.

Menurut Wong, perluasan kawasan industri tersebut diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

"Perluasan ini akan mendorong lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan Indonesia secara berkelanjutan," terang Wong dalam joint pers statement di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2026).

Selain Kawasan Industri Kendal, Wong juga menyebut minat investor Singapura terhadap kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) masih tetap tinggi. Kawasan tersebut dinilai terus berkembang menjadi pusat ekonomi digital yang mampu menarik berbagai perusahaan global.

Menanggapi peluang investasi tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai komitmen investasi baru dari Singapura memiliki potensi besar untuk direalisasikan.

Menurutnya, peluang tersebut cukup kredibel mengingat Singapura selama ini masih menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia dengan rekam jejak berbagai proyek investasi yang telah berjalan.

"Karena itu peluangnya lebih kredibel dibandingkan dengan komitmen yang belum pernah memiliki proyek nyata," kata Yusuf pada Kontan, Selasa (7/7/2026).

Meski demikian, Yusuf menilai masuknya investasi baru dari Singapura belum tentu langsung memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, sebagian besar investasi yang masuk diperkirakan berada di sektor padat modal.

"Kebutuhan tenaga kerja yang paling besar akan terjadi saat pembangunan. Setelah beroperasi, jumlah pekerjaanya relatif sedikit karena sebagian besar membutuhkan keterampilan tinggi," tegas Yusuf.

Oleh karena itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi dan nilai tambah besar.

Selain pengembangan SDM, pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi tetap kompetitif melalui kemudahan berusaha serta kepastian hukum. Langkah tersebut dinilai penting agar komitmen investasi tidak berhenti sebatas rencana, tetapi dapat masuk ke tahap realisasi.

"Karena yang paling penting bukan nilai komitmennya tapi seberapa besar komitmen itu bisa terkonversi menjadi groundbreaking dan masuk tahap produksi hingga beroperasi," ungkap Yusuf.

Purbaya Optimistis Penempatan SAL Rp400 Triliun di Himbara Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 7 Juli 2026 18:41 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-optimistis-penempatan-sal-rp400-triliun-di-himbara-dorong-pertumbuhan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 400 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan, suntikan likuiditas ke Himbara tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi setelah terjadi perlambatan pada akhir Mei hingga Juni 2026.

"Uang yang kita taruh (di Himbara) Rp 400 triliun ke perekonomian, dan Bank Indonesia juga membantu, harusnya pertumbuhan kita akan lebih cepat lagi. Jadi kalau ada sedikit gangguan di akhir Mei sampai Juni, itu akan hilang. Ekonomi akan lari ke depannya," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Menurut Purbaya, dampak kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat membuat kondisi fiskal membaik dan berpotensi menekan defisit APBN 2026 lebih rendah dari proyeksi saat ini.

Pemerintah saat ini memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, angka tersebut masih berpotensi turun apabila sejumlah faktor berjalan sesuai harapan.

"Defisitnya 2,85% dengan kondisi seperti sekarang. Tapi kalau harga minyak turun sedikit, kemudian kami berhasil memperbaiki pajak dan cukai, serta ekonomi membaik sesuai prediksi, ada kemungkinan pendapatan pajak meningkat," katanya.

Selain perbaikan penerimaan negara, Purbaya juga menyebut pemerintah masih memiliki ruang efisiensi belanja. Salah satunya berasal dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski hingga kini belum masuk dalam perhitungan outlook defisit.

Dengan kombinasi penguatan penerimaan, efisiensi belanja, serta dorongan likuiditas dari penempatan SAL di Himbara, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat kembali menguat dan menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman.

BI Catat Arus Modal Asing Masuk US\$ 7,98 Miliar ke Pasar RI pada Kuartal II-2026

Selasa, 7 Juli 2026 16:44 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-arus-modal-asing-masuk-us-798-miliar-ke-pasar-ri-pada-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik mencapai US\$ 7,98 miliar pada kuartal II-2026, berbalik dari kuartal sebelumnya yang masih mengalami arus keluar (outflow) sebesar US\$ 1,47 miliar.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, inflow tersebut terutama ditopang oleh masuknya dana asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar US\$ 8,48 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$ 1,78 miliar. Sementara itu, pasar saham masih mencatat outflow sebesar US\$ 2,3 miliar.

"Tapi di triwulan II ini sudah kembali inflow US\$ 7,98 miliar, SRBI inflow US\$ 8,48 miliar, SBN inflow US\$ 1,78 miliar dan sahamnya masih outflow US\$ 2,3 miliar," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Menurut Perry, kembalinya arus modal asing tersebut berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat stabilitas sistem keuangan, sekaligus membantu pembiayaan fiskal pemerintah.

Untuk menjaga aliran modal asing tetap masuk, BI menilai imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) perlu tetap kompetitif. Konsekuensinya, suku bunga SBN harus meningkat sehingga beban bunga pemerintah ikut bertambah.

Sebagai kompensasi, BI akan menaikkan remunerasi atau bunga atas saldo rekening pemerintah yang ditempatkan di bank sentral.

"Yang selama ini kami kasih remunerasi 80% dari BI Rate akan kami tingkatkan menjadi BI Rate plus sekian untuk mengompensasi berapa kenaikan beban bunga karena suku bunga SBN harus naik," kata Perry.

Ia menegaskan skema tersebut merupakan win-win solution karena di satu sisi Indonesia tetap menarik arus modal asing dan menjaga stabilitas rupiah, sementara di sisi lain tambahan beban bunga pemerintah akan dikompensasi melalui peningkatan remunerasi dari BI.

"Inflow-nya masih masuk, rupiahnya stabil, beban bunganya akan kami kembalikan sehingga tidak lagi jadi break event point bagi pemerintah," tegas Perry.

Ngebut! Realisasi Belanja Terserap 43,1% di Semester I-2026, Tembus Rp 1.656 Triliun

Selasa, 7 Juli 2026 15:16 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/ngebut-realisisi-belanja-terserap-431-di-semester-i-2026-tembus-rp-1656-triliun>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp 1.656 triliun hingga semester I-2026. Realisasi tersebut mencapai 43,1% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun dan tumbuh 17,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, percepatan realisasi belanja dilakukan agar stimulus fiskal dapat menggerakkan perekonomian lebih merata sepanjang tahun sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

"Kalau kita lihat belanja negara tahun lalu dalam perjalanan yang sama hanya tumbuh 38,8%, sekarang penyerapannya sudah 43,1%. Ini merupakan hasil dari upaya kita untuk memastikan belanja negara lebih terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Purbaya merinci, realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.298,6 triliun atau 41,2% dari pagu APBN, naik 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.003,6 triliun.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 397,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN. Secara persentase, penyaluran TKD pada semester I-2026 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp 658,9 triliun. Belanja ini terutama digunakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial seperti bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp 639,7 triliun direalisasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi tahun berjalan (sampai semester I-2026) maupun kekurangan pembayaran tahun 2025.

RI Kebanjiran Minat Investasi, Enam KEK Baru Tinggal Menunggu Restu Prabowo

Selasa, 7 Juli 2026 12:33 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/ri-kebanjiran-minat-investasi-enam-kek-baru-tinggal-menunggu-restu-prabowo>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih memproses pembentukan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang saat ini menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar hukum operasionalnya.

Di tengah proses tersebut, minat investor untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus disebut masih terus mengalir.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono Moegiarso mengatakan setiap KEK harus memiliki satu PP tersendiri sehingga pembentukan enam kawasan baru tersebut masih menunggu penyelesaian regulasi.

"Ada enam KEK yang masih menunggu persetujuan PP-nya, karena satu KEK harus satu PP," ujar Susiwiwono kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/7/2026).

Di sisi lain, Susiwiwono mengungkapkan permohonan pembentukan KEK baru maupun investasi di kawasan yang sudah beroperasi terus berdatangan.

Bahkan, pada hari yang sama pemerintah kembali menerima pengajuan dari salah satu kelompok usaha besar.

"Hari ini juga ada satu grup besar yang mengajukan permohonan. Artinya memang sebenarnya investasi di Indonesia masih sangat menarik sekali," katanya.

Ia menilai tingginya animo tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi tujuan investasi, terutama bagi investor asing yang menanamkan modal langsung (foreign direct investment/FDI) di sektor manufaktur.

Hingga kuartal I-2026, realisasi investasi di seluruh KEK tercatat mencapai Rp353,5 triliun. Investasi tersebut turut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 266 ribu orang.

Selain pembentukan KEK baru, pemerintah juga menerima usulan perluasan kawasan dari sejumlah KEK yang telah beroperasi. Menurut Susiwiwono, terdapat tiga KEK industri yang mengajukan ekspansi lahan hingga rata-rata dua kali lipat dari luas kawasan saat ini.

Ketiga kawasan tersebut adalah KEK Gresik, KEK Kendal, dan KEK Galang Batang. Perluasan itu dilakukan untuk mengakomodasi masuknya investasi baru yang terus meningkat.

Pemerintah memperkirakan pengembangan tiga kawasan tersebut berpotensi mendatangkan tambahan investasi hingga Rp 846 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

Susiwijono mengatakan besarnya potensi investasi tersebut menjadi indikator bahwa daya tarik Indonesia bagi investor asing, khususnya di sektor industri manufaktur, masih terjaga.

"Iklim investasi di Indonesia masih sangat kondusif dan masih sangat menarik bagi FDI, khususnya di industri manufaktur," ujarnya.

Potensi Investasi Ekspor Listrik ke Singapura Diproyeksi Tembus Rp 300 Triliun

Selasa, 7 Juli 2026 13:57 WIB

Reporter: Arif Ferdianto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-investasi-ekspor-listrik-ke-singapura-diproyeksi-tembus-rp-300-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kerja sama perdagangan listrik lintas batas (Cross Border Electricity Trade/CBET) antara Indonesia dan Singapura melalui Danantara membuka peluang investasi hijau dalam skala jumbo.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) memproyeksikan total kebutuhan dana untuk merealisasikan komitmen pasokan setrum ramah lingkungan tersebut bernilai sangat besar.

Manager Program Seknas FITRA, Badiul Hadi menjabarkan, pengerjaan infrastruktur dari hulu hingga ke hilir akan mengerek kebutuhan modal secara signifikan.

Menurut perhitungannya, nilai investasi tidak hanya terpaku pada pembangunan pembangkit EBT, melainkan juga fasilitas pendukung transmisi.

"Ekspor listrik hijau 3,4 GW diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US\$ 9 miliar - US\$ 14 miliar atau Rp 153 triliun - Rp 238 triliun (kurs Rp 17.000/US\$). Kalau mencakup penyimpanan energi, transmisi, dan kabel laut, nilainya berpotensi mendekati Rp 300 triliun," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (7/7/2026).

Kendati potensi modal yang masuk sangat besar, Badiul mengingatkan pemerintah agar cermat dalam menyusun skema kerja sama operasional dengan pihak asing.

Ia menekankan agar penguasaan aset strategis dan pemanfaatan industri lokal harus menjadi prioritas utama demi kepentingan ekonomi nasional.

"Saya melihat besarnya investasi sangat penting dilihat, tetapi tidak kalah penting adalah struktur kepemilikan aset, tingkat kandungan dalam negeri, transfer teknologi, dan nilai tambah nasional. Indonesia jangan hanya menjadi lokasi produksi, sementara keuntungan terbesar mengalir ke luar negeri," tegasnya.

Di sisi lain, proyek komersial internasional yang ditargetkan berjalan pada tahun 2035 ini wajib mengutamakan pemenuhan bauran energi di dalam negeri terlebih dahulu.

Pemerintah pun diminta untuk memperketat regulasi pengawasan serta menerapkan instrumen pembatasan kuota demi mencegah terjadinya kelangkaan pasokan setrum domestik.

"Ekspor tidak boleh mengorbankan kebutuhan energi nasional. Pemerintah harus memastikan seluruh pasokan ekspor berasal dari kapasitas pembangkit baru, bukan mengalihkan listrik yang dibutuhkan masyarakat maupun industri dalam negeri," kata Badiul.

Lebih lanjut, Badiul menambahkan, kapasitas ekspor sebesar 3,4 GW tersebut diperkirakan setara dengan 2% hingga 3% dari total proyeksi kapasitas pembangkit nasional pada 2035 mendatang. Untuk itu, FITRA mendesak adanya aturan tegas yang mengikat para pengembang agar tidak merugikan ketahanan energi di dalam negeri.

"Karena itu diperlukan prinsip domestic first obligation, evaluasi pasokan berkala, serta pembatasan ekspor apabila kebutuhan domestik meningkat," tambahnya.

Terkait dampak ke makroekonomi, Badiul menyebutkan, dengan asumsi produksi sekitar 8,9 TWh per tahun, nilai ekspor diperkirakan mencapai US\$ 700 juta–US\$ 1,1 miliar, setara Rp 12–Rp 19 triliun per tahun.

Angka tersebut berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatkan devisa, namun manfaat ekonomi tidak boleh berhenti pada nilai ekspor.

"Pemerintah harus memastikan proyek ini menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan TKDN (ketersediaan komponen dalam negeri), dan menghasilkan transfer teknologi yang nyata," pungkasnya.

Belanja APBN 2026 Diproyeksi Membengkak Rp 99,7 Triliun dari Pagu Awal, Ini Sebabnya

Selasa, 7 Juli 2026 16:20 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-apbn-2026-diproyeksi-membengkak-rp-997-triliun-dari-pagu-awal-ini-sebabnya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan anggaran belanja negara pada APBN 2026 membengkak sebesar Rp 99,7 triliun dibandingkan pagu awal. Kenaikan tersebut dipicu oleh kebutuhan berbagai pendanaan program prioritas pemerintah terutama pada pos belanja Kementerian/Lembaga serta anggaran Transfer Ke Daerah (TKD)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, outlook belanja negara tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, belanja negara diperkirakan bertambah Rp 99,7 triliun atau sekitar 2,6% dari pagu awal. Secara tahunan, outlook belanja tersebut tumbuh 14,8% (year on year/yoy).

Purbaya menjelaskan, outlook belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang naik jadi Rp 3.245,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan, dari pagu awal Rp 3.149,7 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi Rp 1.630,4 triliun dari pagu awal Rp 1.510,5 triliun.

Kenaikan juga terjadi pada dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 696,9 triliun atau mencapai 100,6% dari pagu awal APBN sebesar Rp 693 triliun.

"Outlook belanja ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otonomi khusus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Ia menambahkan, proyeksi belanja tersebut juga telah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp 132 triliun untuk memenuhi kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengusulkan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) maupun sebaliknya. Pergeseran tersebut dilakukan untuk memperkuat pembiayaan jaminan sosial, sektor kesehatan, serta meningkatkan kapasitas kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Purbaya menegaskan, APBN 2026 tetap dirancang sebagai instrumen utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian nasional.

"Kita buktikan saat harga minyak dunia tinggi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi bagi pemerintah langkah itu penting untuk menjaga stabilitas sehingga ekonomi tetap bisa tumbuh," katanya.

Ia menambahkan, APBN juga akan terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari target awal 2,68%. Meski demikian, Purbaya optimistis realisasi defisit masih dapat ditekan sehingga tetap berada dalam batas aman dan menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.

"APBN 2026 tetap dijaga sehat dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang efisien serta defisit yang terkendali. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan," tutupnya.

Di Balik APBN 2026 yang Tampak Membaik, Ekonom Temukan Alarm Fiskal

Selasa, 7 Juli 2026 18:40 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/di-balik-apbn-2026-yang-tampak-membaik-ekonom-temukan-alarm-fiskal>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Outlook APBN 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan awal tahun ini.

Defisit anggaran pada semester I-2026 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mulai kembali tumbuh positif.

Namun, di balik indikator tersebut, ekonom melihat masih ada alarm yang perlu diwaspadai, terutama dari memburuknya keseimbangan primer dan kualitas penerimaan negara.

Dalam outlook APBN 2026, Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Namun, penerimaan perpajakan hanya diproyeksikan sebesar Rp 2.631,4 triliun atau 97,7% dari target.

Secara rinci, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 2.310,8 triliun atau 98% dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun atau 95,4%.

Di sisi lain, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Sementara itu, keseimbangan primer diperkirakan mencatat defisit Rp 152,1 triliun, jauh lebih dalam dibanding target APBN sebesar Rp 89,7 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, indikator yang paling mencerminkan kualitas fiskal bukanlah besarnya defisit APBN, melainkan posisi keseimbangan primer.

"Menurut saya, indikator yang paling mencerminkan kualitas fiskal bukan semata besarnya defisit APBN, melainkan keseimbangan primer. Ketika keseimbangan primer kembali mengalami defisit yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, itu memberi sinyal bahwa penerimaan negara bahkan belum cukup untuk membiayai belanja pokok sebelum bunga utang diperhitungkan," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah mulai mengandalkan pembiayaan utang bukan hanya untuk memenuhi pembayaran bunga, tetapi juga untuk menopang pengeluaran dasar negara.

"Artinya, pemerintah tidak hanya berutang untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga, tetapi juga mulai mengandalkan pembiayaan utang untuk menopang pengeluaran dasar," katanya.

Dalam jangka pendek, kata Yusuf, kondisi tersebut masih dapat dikelola. Namun, jika berlangsung terus maka ruang fiskal akan semakin terbatas karena sebagian anggaran masa depan akan terserap untuk membayar kewajiban yang terus bertambah.

Yusuf juga mengingatkan persoalan mendasar lainnya berada pada kualitas penerimaan negara. Menurutnya, pada 2025 penerimaan pajak gagal mencapai target, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target sehingga mampu menahan pelebaran defisit.

Sekilas kondisi tersebut terlihat positif. Namun, menurut Yusuf, hal itu menunjukkan APBN masih sangat bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat siklikal seperti harga komoditas dan dividen.

"Ketika penerimaan yang berkelanjutan belum menjadi motor utama, maka perbaikan fiskal menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal. Oleh karena itu, postur APBN dapat terlihat lebih baik daripada fundamental penerimaannya," imbuh Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengakui terdapat tanda-tanda perbaikan pada 2026. Ia mencatat defisit APBN semester pertama lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu dan penerimaan perpajakan mulai pulih.

Menurutnya, sebagian tekanan fiskal pada awal tahun juga merupakan konsekuensi dari strategi percepatan realisasi belanja pemerintah sehingga defisit terlihat lebih besar sebelum penerimaan negara meningkat.

"Saya memandang perkembangan ini sebagai sinyal bahwa tekanan fiskal mulai mereda, tetapi belum cukup kuat untuk menyatakan persoalan telah selesai," kata Yusuf.

Pandangan yang lebih optimistis disampaikan Ekonom Makro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto.

Menurutnya, posisi fiskal hingga semester I-2026 masih berada dalam kondisi yang terkelola dengan baik.

Ia menilai penerimaan negara tetap mampu tumbuh berkat membaiknya kinerja perpajakan, normalisasi restitusi pajak, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang didukung pemberantasan rokok ilegal.

Di sisi belanja, pemerintah juga dinilai mampu menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi belanja prioritas pembangunan maupun program perlindungan sosial.

"Sejauh ini posisi fiskal kita masih terkelola dengan baik. Defisit fiskal tahun ini maksimal masih di level sekitar 2,89% terhadap PDB," katanya.

Myrdal berharap momentum semester II dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, selama tidak muncul guncangan baru dari lonjakan harga minyak dunia maupun eskalasi geopolitik global.

Ia juga menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Jadi kalau kemarin suku bunga dinaikia, nanti kalau rupiahnya menguat lagi ya tidak ada salahnya juga suku bunga BI Rate diturunkan lagi," imbuh Myrdal.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kudus capai Rp167,1 miliar

Selasa, 7 Juli 2026 14:44 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637599/realisasi-penerimaan-pajak-daerah-di-kudus-capai-rp1671-miliar>

Kudus (ANTARA) - Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga semester pertama tahun 2026 sebesar Rp167,1 miliar atau 49,78 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp335,6 miliar.

"Kami optimistis, hingga akhir tahun 2026 bisa mencapai target. Karena pengalaman sebelumnya bisa memenuhi target yang ditetapkan," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan dari sejumlah pos penerimaan pajak daerah, tercatat ada beberapa pos penerimaan yang realisasinya cukup besar.

Di antaranya, kata dia, dari pos mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dari target Rp20 juta realisasinya sebesar Rp86 juta atau 430 persen.

Pos penerimaan lain yang persentasenya cukup tinggi, yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa kesenian dan hiburan terealisasi Rp725,82 juta atau 90,73 persen dari target Rp800 juta. Sedangkan pos penerimaan lainnya bervariasi.

Ia mengungkapkan target penerimaan pajak tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp326,43 miliar, sedangkan tahun ini targetnya sebesar Rp335,6 miliar.

Dari sembilan pos penerimaan, tercatat hanya satu pos yang realisasinya sangat rendah, yakni pajak sarang burung walet hingga semester pertama terealisasi 19 persen atau Rp965 ribu dari target Rp5 juta.

Adapun upaya yang selama ini ditempuh, yakni adanya optimalisasi sektor penerimaan dan melakukan penagihan wajib pajak yang menunggak.

Upaya lainnya, yakni optimalisasi "tapping box" atau alat pemantau transaksi di sejumlah tempat usaha sebagai upaya mendorong penerimaan daerah.

Kemendes-Bank Dunia menjajaki Program Sehati di Banyumas

Selasa, 7 Juli 2026 13:19 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637580/kemendes-bank-dunia-menjajaki-program-sehati-di-banyumas>

Purwokerto (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Bank Dunia menjajaki pelaksanaan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati) di Kabupaten Banyumas melalui audiensi dengan pemerintah daerah dan kunjungan lapangan ke sejumlah desa.

Ditemui usai menerima audiensi tim dari Kemendes PDT dan Bank Dunia di Ruang Joko Kahiman, kompleks Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan program tersebut nantinya memberikan pendampingan kepada desa-desa terpilih.

“Maksimal sekitar 20 desa bisa menerima stimulan hingga sekitar Rp500 juta per desa per tahun, disertai pelatihan dan dukungan sarana sesuai kebutuhan desa,” katanya.

Ia mengatakan Program Sehati merupakan program prioritas Kemendes PDT bersama Bank Dunia untuk memperkuat ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut dia, bantuan yang diberikan tidak seluruhnya berbentuk dana tunai, juga pengadaan barang sesuai kebutuhan desa.

“Banyumas saat ini baru memiliki empat desa yang menjadi lokasi penjajakan awal. Namun, pemerintah kabupaten akan mengupayakan agar jumlah desa penerima manfaat dapat bertambah hingga sekitar 20 desa,” katanya menegaskan.

Ia mengharapkan program tersebut diharapkan mampu memperkuat badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok swadaya masyarakat, serta pembangunan infrastruktur produktif yang dibutuhkan masyarakat.

Bupati mengatakan proses seleksi desa akan dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Kemendes PDT.

Sementara dalam audiensi, Kepala Dinpermades Kabupaten Banyumas Hirawan Danan Putra mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari kunjungan tim Kemendes PDT dan Bank Dunia untuk memperkenalkan sekaligus meninjau pelaksanaan Program Sehati di Banyumas.

“Hari ini (7/7) tim dijadwalkan mengunjungi Desa Wlahar Kulon di Kecamatan Patikraja dan Desa Tumiyang di Kecamatan Kebasen, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu (8/7) ke Desa Pengadegan di Kecamatan Wangon serta Desa Karanganyar di Kecamatan Jatilawang untuk mengidentifikasi potensi penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kemendes PDT Rio Pongpadati mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan implementasi Program Sehati yang direncanakan berlangsung pada 2027-2031.

Menurut dia, tim melakukan pengumpulan data mengenai kelembagaan desa, tata kelola keuangan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagai dasar pelaksanaan program.

“Program yang didukung pendanaan sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat itu juga akan menentukan desa penerima manfaat berdasarkan kualitas kelembagaan, tata kelola keuangan, dan kesiapan menjalankan program,” katanya.

Koordinator Tim Program Sehati Bank Dunia Nur Hidayat mengatakan Program Sehati disusun untuk mendukung prioritas pemerintah dalam membangun dari desa melalui penguatan ekonomi berkelanjutan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Menurut dia, Bank Dunia bersama Kemendes PDT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas menyusun program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Program Sehati ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2027 setelah tahap perencanaan selesai pada akhir 2026,” katanya.

Pada tahap awal, kata dia, program akan menyasar sekitar 7.000 desa berstatus berkembang dan maju melalui mekanisme seleksi berbasis proposal.

Audiensi tersebut juga diisi paparan yang disampaikan oleh Tim Kerja Program Sehati kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa Program Sehati menggunakan pendekatan end-to-end, yakni mengintegrasikan pembangunan infrastruktur produktif, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Komponen investasi infrastruktur direncanakan disalurkan melalui mekanisme transfer ke desa, sedangkan dukungan peralatan dan sarana diberikan melalui bantuan pemerintah sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Magelang Fair 2026 di Alun-alun Besok, Pemkot Targetkan Perputaran Uang Rp 2,5 Miliar

Selasa, 7 Juli 2026 17:56 WIB

Egadia Birru, Aloysius Gonsaga AE

<https://regional.kompas.com/read/2026/07/07/175621178/magelang-fair-2026-di-alun-alun-besok-pemkot-targetkan-perputaran-uang-rp>

MAGELANG, KOMPAS.com – Pameran produk ekonomi, Magelang Fair, akan dilaksanakan di Alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Rabu (8/7/2026) hingga Minggu (12/7/2026).

Pemerintah Kota Magelang menargetkan perputaran uang menyentuh Rp 2,5 miliar dalam acara tahunan tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah mengatakan sedikitnya 150 peserta, baik individual maupun kelompok, berpartisipasi dalam Magelang Fair yang memamerkan barang dan jasa.

“Kami juga kolaborasi dengan Imigrasi dan instansi pemerintahan lain untuk memberikan sosialisasi program mereka,” ucapnya kepada Kompas.com di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan akun Instagram resmi Magelang Fair 2026, pembukaan pameran dijadwalkan besok.

Malam pembukaan bakal dimeriahkan dengan penampilan Eskla Music dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Unit pop dangdut koplo asal Magelang, Fanada juga akan mengisi Magelang Fair 2026 pada acara penutupan pada Minggu (12/7) malam.

Seluruh rangkaian acara bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

Menurut Syaifullah, target perputaran uang dalam Magelang Fair kali ini sama dengan target tahun lalu yang sebesar Rp 2,5 miliar.

“Memang, itu enggak ringan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono optimistis perputaran uang Magelang Fair 2026 melampaui capaian tahun lalu, meski tidak menyebutkan nominal spesifik.

“Minimal sama dengan (Magelang Fair) yang kemarin,” ucapnya di rumah jabatan Wali Kota Magelang, Selasa.

Damar mengaku ingin mengembangkan Magelang Fair agar tak terbatas menampilkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah, melainkan juga perangkat teknologi mutakhir.

“Sehingga, ini (Magelang Fair) jadi wadah industri kreatif (untuk promosi),” cetus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

APBD Jateng Dipuji Kemenkeu

Selasa, 7 Juli 2026

Budi Aris

<https://radioidola.com/2026/apbd-jateng-dipuji-kemenkeu/>

Semarang, Idola 92,6 FM-Kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah pada semester I 2026 tetap terjaga, meski dihadapkan pada tekanan ekonomi global dan keterbatasan fiskal.

Kondisi tersebut dapat dicapai, karena pemerintah memfokuskan belanja daerah pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Bahkan, APBD Jateng mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan belanja daerah difokuskan pada infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor produktif, sehingga tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Hal itu dikatakan saat ditemui di Semarang, kemarin.

“APBD harus kita gunakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Ekonomi Jateng terus tumbuh, buktinya, perekonomian di Jawa Tengah masih dapat tumbuh 5,89 persen atau di atas rata-rata nasional. Realisasi investasi pada 2025 sebesar Rp110,02 triliun dan pada triwulan I-2026 sudah mencapai Rp23 triliun,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, capaian-capaian itu tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, perguruan tinggi, perbankan, hingga perusahaan swasta.

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kunjungan kerjanya ke Semarang menyatakan, kinerja APBD Jateng masih tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global. (Bud)

Bank Sentral Selandia Baru Naikkan Suku Bunga 25 Bps, Sinyalkan Pengetatan Berlanjut

Rabu, 8 Juli 2026 09:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-selandia-baru-naikkan-suku-bunga-25-bps-sinyalkan-pengetatan-berlanjut>

KONTAN.CO.ID - Bank Sentral Selandia Baru (Reserve Bank of New Zealand/RBNZ) menaikkan suku bunga acuan (Official Cash Rate/OCR) sebesar 25 basis poin menjadi 2,50% pada Rabu (8/7/2026).

Otoritas moneter juga mengisyaratkan masih diperlukan kenaikan suku bunga lanjutan untuk mengembalikan inflasi ke target, meskipun pemulihan ekonomi masih berlangsung secara bertahap.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas ekonom. Sebanyak 22 dari 28 ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Sebelumnya, sejak Agustus 2024, RBNZ memangkas suku bunga hingga total 325 basis poin untuk menopang perekonomian yang melemah seiring meredanya inflasi.

Namun, lonjakan harga minyak akibat konflik Iran diperkirakan kembali mendorong inflasi melampaui target bank sentral sebesar 1%–3%, sehingga memaksa otoritas mempercepat normalisasi kebijakan moneter.

Dalam pernyataan Monetary Policy Review, RBNZ menyebutkan bahwa inflasi masih berada di atas target dan aktivitas ekonomi diperkirakan terus membaik.

"Dengan inflasi yang masih berada di atas target dan aktivitas ekonomi yang diperkirakan menguat, pengurangan stimulus moneter lebih lanjut kemungkinan masih diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke titik tengah target 2%," tulis RBNZ.

Usai pengumuman tersebut, dolar Selandia Baru (kiwi) menguat sekitar 0,4% menjadi US\$ 0,57, sementara suku bunga swap tenor dua tahun naik 5 basis poin menjadi 3,3801%.

Pelaku pasar kini hampir sepenuhnya memperkirakan akan ada kenaikan suku bunga kembali pada Oktober mendatang.

Meski demikian, RBNZ menegaskan bahwa keputusan selanjutnya akan bergantung pada perkembangan data ekonomi, perilaku penetapan harga, serta kekuatan aktivitas ekonomi yang memengaruhi tekanan inflasi jangka menengah.

RBNZ memperkirakan, inflasi tahunan mencapai puncaknya di 3,9% pada kuartal II 2026 sebelum melambat menjadi 3,3% pada kuartal III 2026. Inflasi diproyeksikan kembali mendekati target 2% pada 2027.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan RBNZ pada Mei lalu yang memperkirakan inflasi akan mencapai 4,3% pada kuartal III 2026 sebelum kembali ke target pada pertengahan 2027.

Menurut RBNZ, revisi proyeksi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga minyak yang mengurangi dampak langsung terhadap harga-harga konsumen serta membatasi efek rambat (pass-through) ke inflasi yang lebih luas.

Risalah rapat kebijakan juga menunjukkan seluruh anggota komite sepakat bahwa kenaikan OCR lebih lanjut kemungkinan masih diperlukan dalam beberapa pertemuan mendatang. Namun, waktu pelaksanaannya masih bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi.

Ekonomi Selandia Baru mulai kembali tumbuh pada paruh kedua 2025. Akan tetapi, momentumnya sempat tertahan akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.

Dengan mulai meredanya harga minyak, pembuat kebijakan berharap tekanan terhadap rumah tangga dan dunia usaha berkurang sehingga mampu menopang pertumbuhan sekaligus membantu menurunkan inflasi.

Langkah RBNZ memperketat kebijakan moneter sejalan dengan tren global. Sejumlah bank sentral utama, termasuk Bank Sentral Eropa (ECB) dan Reserve Bank of Australia (RBA), juga telah menaikkan suku bunga, sementara Federal Reserve Amerika Serikat mengadopsi sikap yang lebih hawkish untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Mayoritas Mata Uang Asia Melemah terhadap Dolar AS Rabu (8/7), Won Jadi Pengecualian

Rabu, 8 Juli 2026 09:49 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mayoritas-mata-uang-asia-melemah-terhadap-dolar-as-rabu-87-won-jadi-pengecualian>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (8/7/2026), dengan ringgit Malaysia dan peso Filipina mencatat pelemahan terdalam.

Di sisi lain, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang masih mampu menguat.

Melansir Reuters berdasarkan data hingga pukul 02.05 GMT, ringgit Malaysia melemah 0,32% terhadap dolar AS, menjadi penurunan harian terbesar di kawasan.

Peso Filipina menyusul dengan pelemahan 0,22%, diikuti baht Thailand yang turun 0,18%, yen Jepang melemah 0,16%, rupiah Indonesia terkoreksi 0,11%, yuan China turun 0,10%, dan dolar Singapura melemah 0,08%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 0,25% terhadap dolar AS. Sementara rupee India relatif tidak berubah dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya.

Secara kumulatif sejak awal 2026, hampir seluruh mata uang Asia masih mencatat pelemahan terhadap dolar AS.

Rupiah menjadi mata uang dengan penurunan terdalam, yakni sekitar 7,34% dibandingkan posisi akhir 2025.

Selanjutnya baht Thailand melemah 5,78%, rupee India turun 5,37%, won Korea Selatan terkoreksi 4,79%, peso Filipina melemah 4,47%, yen Jepang turun 3,51%, dolar Taiwan melemah 2,23%, sedangkan dolar Singapura dan ringgit Malaysia masing-masing turun 0,60% dan 0,59%.

Berbeda dengan mata uang lainnya, yuan China justru menguat sekitar 2,74% terhadap dolar AS sejak awal tahun ini.

Pergerakan mata uang Asia terjadi di tengah penguatan dolar AS, yang didorong meningkatnya permintaan aset safe haven setelah memanasnya kembali ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pasar juga mencermati prospek kebijakan suku bunga bank sentral AS (Federal Reserve) yang diperkirakan akan tetap ketat di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Dolar AS Sentuh Level Tertinggi Sepekan Rabu (8/7), Setelah AS Kembali Serang Iran

Rabu, 8 Juli 2026 08:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-sentuh-level-tertinggi-sepekan-rabu-87-setelah-as-kembali-serang-iran>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) bertahan di level tertinggi dalam sepekan terhadap sebagian besar mata uang utama pada awal perdagangan Asia, Rabu (8/7/2026).

Penguatan mata uang Negeri Paman Sam didorong meningkatnya permintaan aset aman (safe haven) setelah AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran, sehingga memicu kembali ketegangan geopolitik dan mendorong kenaikan harga minyak.

Melansir Reuters, Indeks dolar AS (U.S. Dollar Index), yang mengukur kekuatan dolar terhadap sekerajang enam mata uang utama, berada di level 101,18. Posisi tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2 Juli.

Sentimen safe haven menguat setelah militer AS meluncurkan gelombang serangan baru ke Iran pada Selasa (7/7).

Di saat yang sama, pemerintah AS juga mencabut lisensi yang sebelumnya mengizinkan penjualan minyak mentah Iran, menyusul serangan terhadap tiga kapal tanker komersial di Selat Hormuz.

Analisis Westpac dalam risetnya menyebutkan bahwa kekhawatiran terhadap stabilitas kesepakatan damai kembali mencuat setelah Iran menyerang kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

"Kekhawatiran terhadap prospek inflasi kembali menjadi perhatian pasar sehingga mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di berbagai negara," tulis analisis Westpac.

Harga minyak ikut melonjak seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pada awal perdagangan Asia, harga minyak mentah Brent naik 2,6% menjadi US\$ 76,12 per barel, melanjutkan reli yang telah berlangsung selama dua hari.

Di pasar mata uang, dolar Selandia Baru (kiwi) menguat 0,1% menjadi US\$ 0,5681 menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Selandia Baru (Reserve Bank of New Zealand/RBNZ).

Pelaku pasar memperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.

Sementara itu, dolar AS menguat 0,1% terhadap yen Jepang menjadi 162,28 yen.

Di Jepang, anggota Dewan Gubernur Bank of Japan (BOJ), Toichiro Asada, yang menjadi satu-satunya anggota yang menolak keputusan kenaikan suku bunga pada Juni lalu, mengatakan kepada Reuters

bahwa ia masih membutuhkan bukti inflasi yang didorong oleh permintaan domestik sebelum mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Di sisi lain, euro melemah 0,1% ke level US\$ 1,1405, sedangkan poundsterling Inggris turun 0,1% menjadi US\$ 1,3353. Adapun dolar Australia bergerak relatif stabil di level US\$ 0,6926.

Di pasar aset kripto, bitcoin turun 0,2% ke level US\$ 63.518,35, sementara ether terkoreksi 0,5% menjadi US\$ 1.774,45.

Defisit Dagang AS Melonjak, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tertekan

Rabu, 8 Juli 2026 16:31 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-dagang-as-melonjak-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-tertekan>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Mei 2026 di tengah lonjakan impor barang modal yang mencapai rekor tertinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan masih akan menjadi penekan pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal II-2026, meski aktivitas investasi dan konsumsi domestik tetap menunjukkan daya tahan.

Berdasarkan data Departemen Perdagangan AS, defisit perdagangan meningkat 42,2% menjadi US\$ 77,6 miliar pada Mei, level tertinggi sejak Maret 2025. Angka tersebut lebih besar dibandingkan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebesar US\$ 78,5 miliar.

Pelebaran defisit dipicu kenaikan impor sebesar 3,3% menjadi US\$ 395,3 miliar, tertinggi dalam 14 bulan. Sementara itu, ekspor justru turun 3,2% menjadi US\$ 317,7 miliar akibat penguatan dolar AS yang membuat produk-produk AS semakin mahal di pasar internasional.

Kenaikan impor tidak hanya dipengaruhi oleh kuatnya permintaan domestik, tetapi juga langkah perusahaan yang mempercepat pembelian untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan potensi kenaikan harga akibat konflik di Timur Tengah serta kemungkinan penerapan tarif baru oleh pemerintah AS.

Selain itu, perang AS-Israel dengan Iran turut mendorong ekspor minyak mentah dan produk minyak bumi hingga mencapai rekor tertinggi. Konflik tersebut juga sempat mengganggu aktivitas di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia, sehingga meningkatkan risiko geopolitik di pasar energi.

Permintaan domestik tinggi

Ekonom Pasar Keuangan Nationwide Oren Klachkin menilai, ingginya impor justru mencerminkan permintaan domestik AS yang masih kuat.

"Impor menunjukkan permintaan domestik AS tetap solid, meski penumpukan persediaan kemungkinan turut berkontribusi. Investasi kecerdasan buatan (AI) juga masih berada pada jalur yang sangat kuat," ujarnya dalam laporan Reuters (7/7).

Lonjakan impor terutama berasal dari barang modal yang naik US\$ 1,1 miliar menjadi rekor US\$ 128 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya impor aksesoris komputer, semikonduktor, pesawat sipil, generator, serta mesin industri.

Besarnya impor barang modal mencerminkan derasnya investasi perusahaan di sektor AI yang masih bergantung pada komponen impor. Namun, setelah disesuaikan dengan inflasi, nilai impor barang modal justru turun menjadi US\$ 108,7 miliar dari US\$ 110,5 miliar pada April.

Ekonom Citigroup Veronica Clark menilai, investasi AI masih akan menopang aktivitas ekonomi, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan kemungkinan tidak sebesar beberapa kuartal sebelumnya.

"Impor komputer dan peralatan terkait mulai melambat pada data kuartal II sehingga dorongan AI terhadap pertumbuhan PDB kemungkinan lebih kecil dibandingkan beberapa kuartal terakhir," katanya.

Selain barang modal, impor barang konsumsi juga meningkat US\$ 3,5 miliar, terutama untuk produk farmasi, telepon seluler, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Impor kendaraan bermotor beserta suku cadangnya juga naik US\$ 2,2 miliar.

Di sisi lain, penurunan ekspor terjadi hampir di seluruh kelompok barang. Ekspor barang modal turun US\$ 3,5 miliar akibat melemahnya pengiriman komputer dan aksesoris komputer. Ekspor barang konsumsi juga menurun seiring berkurangnya pengiriman produk farmasi.

Meski demikian, ekspor minyak mentah meningkat US\$ 2 miliar sehingga ekspor produk minyak bumi mencapai rekor US\$ 38,4 miliar. AS sendiri masih berstatus sebagai eksportir bersih minyak.

Pelebaran defisit perdagangan diperkirakan kembali menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi AS. Model proyeksi Federal Reserve Atlanta memperkirakan ekonomi AS hanya tumbuh 1,4% secara tahunan pada kuartal II-2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,1% pada kuartal pertama.

Chief Economic Advisor Brean Capital John Ryding memperkirakan pelebaran defisit perdagangan akan memangkas sekitar 1,7 poin persentase terhadap pertumbuhan riil PDB AS pada kuartal II.

Di tengah kebijakan tarif Presiden Donald Trump, AS masih mencatat defisit perdagangan barang dengan sejumlah mitra dagang utama, seperti Vietnam, Meksiko, Taiwan, China, Kanada, Jerman, Korea Selatan, India, dan Irlandia. Sebaliknya, surplus perdagangan barang tercatat dengan Belanda, Hong Kong, Australia, Inggris, dan Brasil.

Sementara itu, neraca perdagangan jasa masih mencatat surplus yang meningkat menjadi US\$ 28,9 miliar dari US\$ 28,3 miliar pada April. Kenaikan tersebut ditopang oleh rekor ekspor jasa sebesar US\$ 107,1 miliar, terutama dari sektor perjalanan.

Harga Emas Naik, Pasar Menanti Risalah Rapat The Fed

Rabu, 8 Juli 2026 14:12 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-emas-naik-pasar-menanti-risalah-rapat-the-fed>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Harga emas sedikit naik dari level terendah hampir satu minggu pada Rabu (8/7/2026), karena investor menantikan risalah rapat Federal Reserve bulan Juni. Kekhawatiran inflasi akibat serangan AS-Iran yang membatasi kenaikan logam mulia tersebut.

Mengutip Reuters, Rabu (8/7/2026), Garda Revolusi Iran mengatakan mereka menargetkan situs militer AS di Bahrain dan Kuwait pada hari Rabu setelah AS melancarkan gelombang serangan terhadap Iran dan mencabut izin yang memungkinkan negara itu untuk menjual minyak setelah tiga kapal tanker terkena proyektil di Selat Hormuz.

Harga emas spot naik 0,6% menjadi US\$ 4.128,28 per ons pada pukul 05.44 GMT, setelah turun ke level terendah sejak 2 Juli sebelumnya pada hari itu. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Agustus turun 0,4% menjadi US\$ 4.138,80.

"Dalam 24 jam terakhir, terjadi sedikit kekhawatiran lagi terkait inflasi. Jadi, obligasi turun, dolar sedikit menguat, emas mundur, dan sekarang tampaknya mulai stabil setelah koreksi tersebut," kata Ilya Spivak, kepala makro global di TastyLive.

"Pada titik ini, kami telah mengamati upaya emas untuk membentuk 'titik terendah'."

Harga minyak melonjak lebih dari 3%, imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat, sementara dolar sedikit naik ke level tertinggi dalam seminggu.

Pasar telah meningkatkan taruhan mereka untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan September menjadi lebih dari 63%, naik dari sekitar 57% pada hari Selasa, menurut alat CME FedWatch.

Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tanggal 16 hingga 17 Juni, yang akan dirilis hari ini, ditunggu untuk mendapatkan petunjuk tentang arah suku bunga di bawah kepemimpinan Ketua Fed Kevin Warsh.

"Risalah FOMC ini akan sangat menarik. Mereka tampak agresif, tetapi kita akan melihat apakah pembicaraan tersebut tentang guncangan minyak atau risiko siklus bisnis yang sudah mulai terlihat," kata Spivak.

Meskipun emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi dan biasanya naik di saat ketidakpastian geopolitik, suku bunga tinggi cenderung membebani aset yang tidak menghasilkan imbal hasil ini.

Purbaya: TKD di Semester I Capai Rp 357 T, 51,6% Pagu APBN

Rabu, 8 Juli 2026 17:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114325/purbaya-tkd-di-semester-i-capai-rp-357-t-51-6-pagu-apbn/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di sepanjang semester I-2026 sudah mencapai Rp357,4 Triliun. Angka tersebut sudah mencapai 51,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh APBN yakni sebesar Rp693 triliun.

Purbaya mengatakan presentase penyaluran tersebut merupakan capaian penyaluran tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Perlu kami sampaikan bahwa realisasi TKD yang tinggi di semester 1 tahun 2026 ditentukan oleh andil kinerja pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target tersebut," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Purbaya menyebut realisasi penyaluran TKD dari pemerintahan pusat sudah on track dan berjalan lebih cepat. Ia juga berjanji akan mengawal terus realisasi penyeluruhan TKD di semester kedua.

Dalam paparan Purbaya disebutkan bahwa realisasi TKD pada semester I 2026 ini dipengaruhi oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan presentase yang lebih tinggi meski lebih rendah secara

nominal, Realisasi Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi, realisasi Dana Alokasi Khusus yang tinggi, realisasi dana desa dan realisasi transfer lainnya.

Penyesuaian Pagu Anggaran

Dalam presentasinya, Purbaya juga menyebut bahwa terdapat penyesuaian pagu TKD pada APBN 2026 sebesar Rp 13,3 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp 693 triliun.

“Terdapat kenaikan pagu TKD sebesar Rp13,3 triliun dari pagu APBN sebesar Rp693 triliun naik jadinya menjadi Rp706,3 triliun ini termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatera dan tambahan dana otonomi khusus Papua,” kata Purbaya.

Hingga akhir tahun pemerintah menargetkan jumlah belanja negara yang mencapai 3.942,4 triliun atau mencapai 102,6% dibandingkan pagu APBN yang ditetapkan dan tumbuh 14,8%.

Rinciannya sebesar 1.630 triliun ditujukan untuk belanja kementerian/lembaga (k/l), kemudian belanja non K/L sebesar Rp1.615 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp696,9 triliun.

Ini Respons Menkeu Soal Pajak Dana Jaminan Hari Tua

Rabu, 8 Juli 2026 18:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114372/ini-respons-menkeu-soal-pajak-dana-jaminan-hari-tua/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mempelajari usulan terkait evaluasi pengenaan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) secara komprehensif.

Hal ini disampaikan usai menerima kunjungan dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, Rabu (8/7/2026), untuk membahas sejumlah masukan terkait kebijakan perpajakan atas manfaat JHT dan Jaminan Pensiun.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan sejumlah usulan, antara lain evaluasi atas pengenaan pajak JHT, dan peninjauan kembali mekanisme pajak progresif bagi pekerja yang beberapa kali mencairkan JHT akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penyesuaian batas nilai manfaat JHT yang dikenai pajak, serta usulan terkait perlakuan perpajakan atas manfaat pensiun, tunjangan hari raya (THR), dan pesangon.

"Saya akan pelajari. Kami akan melihat kembali dasar kalibrasi yang digunakan saat ketentuan tersebut diterapkan, termasuk menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi saat ini, seperti inflasi maupun perubahan nilai riil," kata Purbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Menurut Bendahara Negara, evaluasi akan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk dampak fiskal, sasaran penerima manfaat, serta kesesuaian dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini.

"Kami tidak ingin membuat masyarakat semakin sulit, yang sudah berjalan akan kita jaga, tetapi kita juga harus berhati-hati menghitung dampak kebijakannya terhadap penerimaan negara dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Salah satu masukan yang akan dikaji lebih lanjut adalah mekanisme pengenaan pajak progresif bagi pekerja yang mengalami PHK lebih dari satu kali, sehingga melakukan pencairan JHT secara berulang.

"Terkait pajak progresif ini akan kami pelajari. Kami ingin melihat apakah mekanisme yang ada saat ini masih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan sekarang, termasuk bagi pekerja yang beberapa kali berpindah pekerjaan karena PHK," kata Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menelaah kemungkinan penyesuaian terhadap ketentuan yang saat ini masih mengacu pada regulasi lama agar selaras dengan perkembangan sistem jaminan sosial dan dinamika pasar kerja.

Menkeu menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja, kepastian hukum, keberlanjutan program jaminan sosial, serta kesehatan fiskal negara. Pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Bos BI Beber Varian Koordinasi Fiskal & Moneter Semester I-2026

Rabu, 8 Juli 2026 16:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114321/bos-bi-beber-varian-koordinasi-fiskal-moneter-semester-i-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengklaim bank sentral telah koordinasi dengan pemerintah terkait moneter dan fiskal melalui lima langkah strategis sepanjang semester I-2026.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2026 dan prognosis 2026.

"Terdapat lima langkah koordinasi fiskal dan moneter sepanjang semester I-2026 dan akan berlanjut seterusnya," ujar Perry, dikutip Rabu (8/7/2026).

Dia menyebutkan, langkah pertama, pada Januari 2026, Bank Indonesia (BI) koordinasi dengan pemerintah terkait rencana tahunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan program moneter.

"Kami juga sudah menyepakati penerbitan SBN dalam dan luar negeri, sinkron dengan program moneter kami," tutur Perry.

Kemudian, langkah kedua, menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan yang diklaim lebih dari cukup. Kedua pihak sepakat bahwa pertumbuhan uang primer M0 sudah membaik, dengan data sudah memasuki level double digit.

Langkah ketiga, BI dan pemerintah juga sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena hal itu juga berpengaruh penting terhadap kesehatan fiskal. Kedua otoritas sepakat menaikkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), dan hasilnya dianggap positif.

Berdasarkan data BI, pada kuartal I 2-26 masih terjadi aliran modal keluar atau outflow senilai total US\$1,47 miliar, dengan outflow di pasar saham US\$1,76 miliar, outflow di pasar SBN US\$1,46 miliar, meski SRBI masih mengalami aliran modal masuk atau inflow US\$1,78 miliar.

Pada kuartal II, pasar keuangan tercatat sudah mengalami inflow senilai total US\$7,98 miliar. Dengan rincian, SRBI inflow US\$8,48 miliar, SBN inflow US\$1,78, meski pasar saham masih outflow US\$2,3 miliar.

Langkah keempat, untuk menarik inflow, suku bunga SBN terpaksa akan naik. Dengan demikian, bank sentral berjanji akan menaikkan tambahan remunerasi terhadap setiap saldo rekening pemerintah di BI.

"Selama ini kami kasih remunerasi (kepada pemerintah) 80% dari BI Rate, kami akan meningkatkan BI Rate plus sekian untuk mengkompensasi kenaikan beban bunga karena suku bunga SBN akan naik. Kami akan tanggung, jadi ini win-win solution," papar Perry.

Artinya, lanjut dia, aliran modal asing akan masuk, rupiah berpotensi stabil, sementara beban kenaikan bunga utang pemerintah akan ditanggung oleh bank sentral. "Jadi kami pastikan pemerintah BEP (break even point atau balik modal)," tegasnya.

Langkah terakhir, bank sentral berkoordinasi pusat dan daerah menjaga inflasi karena harga komoditas global naik.

Rupiah Sukses Finis di Bawah Rp18.000/US\$

Rabu, 8 Juli 2026 15:49 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114359/rupee-sukses-finis-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup sesi perdagangan Rabu (8/7/2026) dengan pelemahan terbatas 0,09% di posisi Rp17.999/US\$, setelah sempat menyentuh Rp18.002/US\$ pada sesi perdagangan siang tadi.

Pelemahan rupiah dipicu oleh pasar saham yang berada di bawah tekanan setelah S&P Dow Jones Indices memperkirakan berpotensi menurunkan kasta bursa saham Tanah Air menjadi frontier market pada 2027.

Peringatan dari S&P DJI menambah daftar panjang peringatan yang diterima oleh pasar keuangan Ibu Pertiwi sejak awal semester pertama tahun ini, di tengah prospek pertumbuhan ekonomi yang terbebani oleh defisit transaksi berjalan dan neraca dagang, serta defisit fiskal.

Di sisi lain, pasar Surat Utang Negara (SUN) juga ikut terdampak dan mengalami aksi jual yang ditandai dengan kenaikan imbal hasil (yield) di hampir semua tenor. Tenor acuan seperti 5 dan 10 tahun mengalami kenaikan yield masing-masing 6,5 basis poin (bps) ke 7,19%, dan 4,8 bps ke level 7,23%. UBS dalam catatannya menilai valuasi obligasi Indonesia sebenarnya belum dapat dikatakan mahal. Imbal hasil riil saat ini berada di sekitar persentil ke-25 dibandingkan sejarah 15 tahun terakhir.

Selain itu, selisih yield nominal obligasi Indonesia-AS tenor 10 tahun maupun selisih yield Indonesia terhadap negara emerging markets berimbal hasil tinggi (high yield EM) juga masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata historis.

"Analisis kami juga menunjukkan bahwa premi risiko valuta asing cenderung meningkat ketika defisit basic balance membesar," sebut UBS dalam catatannya.

UBS menambahkan, meski imbal hasil riil cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi sedang melemah, UBS menyebut pelaku pasar sebaiknya menunggu imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik ke kisaran 7,5%, atau lebih sebelum menambah eksposur terhadap obligasi RI.

Sedangkan dari kawasan, pergerakan mata uang Asia cukup beragam dengan kecenderungan melemah. Pelemahan hari ini dipimpin oleh rupee India yang cukup tajam 0,55%, disusul baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina, ringgit Malaysia, rupiah, dolar Singapura dan yuan China.

Sebaliknya, won Korea Selatan tercatat paling moncer dan menguat 0,49% ke KRW1.511/US\$. Penguatan won dipicu oleh pernyataan pemerintah yang berjanji memperkuat pemantauan terhadap pergerakan mata uang domestik.

Begitu juga dengan dolar Taiwan yang menguat untuk kali pertama dalam enam sesi perdagangan dan sempat turun ke TWD31.963/US\$, seiring munculnya tanda-tanda pemulihan arus dana asing (foreign inflows).

Sebagai catatan, indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama bertahan dengan penguatan 0,14% di level 101,16, sebelum terpankas dan menyisakan penguatan 0,06% di posisi 101,08.

Pajak & Bea Cukai Diproyeksi Tak Bisa Penuhi Target APBN 2026

Rabu, 8 Juli 2026 15:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/114295/pajak-bea-cukai-diproyeksi-tak-bisa-penuhi-target-apbn-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan memproyeksikan dua sumber utama penerimaan negara yakni pajak dan kepabeanan dan cukai, sama-sama tidak mampu memenuhi target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

Meski keduanya masih mencatat pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi hingga akhir tahun diperkirakan tetap berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak akan mencapai Rp2.310,8 triliun atau hanya 98% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak diproyeksikan mengalami kekurangan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun dari target.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai juga diperkirakan hanya mencapai Rp320,6 triliun atau setara 95,4% dari target APBN sebesar Rp336 triliun. Artinya, penerimaan bea dan cukai berpotensi mengalami kekurangan sekitar Rp15,4 triliun.

Secara total, kekurangan penerimaan dari dua instrumen tersebut mencapai sekitar Rp62,3 triliun. Meski demikian, dari sisi pertumbuhan, kedua pos penerimaan tersebut masih menunjukkan kinerja positif.

Dalam paparannya, Purbaya melaporkan penerimaan pajak diproyeksikan tumbuh 20,5% dibandingkan realisasi 2025, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 6,8% secara tahunan.

Kondisi ini membuat penerimaan perpajakan secara keseluruhan, yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai, diperkirakan hanya mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7% dari target APBN sebesar Rp2.693,7 triliun, meski masih tumbuh 18,6% dibandingkan tahun lalu.

"Ini kan penerimaan pajaknya turun lagi ke 20,5%. Kita akan jaga terus mudah-mudahan kita bisa tahan di 23% terus untuk penerimaan pajaknya sehingga income kita juga akan lebih baik," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Di tengah tingginya target penerimaan perpajakan, pemerintah mengklaim masih mampu menjaga total pendapatan negara tetap melampaui target. Purbaya memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun, atau 101,7% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kinerja tersebut terutama ditopang oleh lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun atau 125,2% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.

Dalam kaitan itu, kenaikan PNBP menjadi penopang utama yang mengimbangi shortfall pada penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai.

Perkuat Ekonomi, BI Lakukan Percepatan Penyaluran Kredit

Rabu, 8 Juli 2026 14:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114298/perkuat-ekonomi-bi-lakukan-percepatan-penyaluran-kredit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memaparkan sejumlah cara untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, salah satunya adalah dengan cara mempercepat penyaluran kredit melibatkan Pemerintah, otoritas terkait, perbankan, dan pelaku usaha.

“Upaya tersebut didukung Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), turut memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan bagi dunia usaha,” kata Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Denny menyebut, hal ini terlihat dari kredit perbankan yang tumbuh 11,51% (yoy) pada Mei 2026, meningkat dibandingkan 9,69% (yoy) pada akhir 2025. Peningkatan pembiayaan sektor produktif tersebut diharapkan bisa memperkuat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu BI juga memperkuat pengembangan UMKM binaan bank Indonesia yang pada tahun 2025, omzetnya mencapai Rp7,02 triliun atau tumbuh 23,1% (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi pada omzet UMKM Ekspor (21%) dan UMKM Digital (25%).

“Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta turut mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Denny.

Sebelumnya untuk menjaga stabilitas, terutama nilai tukar rupiah, BI menyebut bahwa telah melakukan berbagai cara dan akan menjaga stabilitas rupiah karena akan berada di pasar selama 24 jam.

“Bank Indonesia seperti biasa akan all out. Kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri dengan transaksi di pasar spot, di pasar NDF, di pasar DNDF dan juga melakukan komunikasi Intens dengan pelaku pasar,” jelas Denny.

Bagaimanapun, kata dia, perkembangan rupiah hingga saat ini relatif masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lain di emerging market. Dia berharap ke depannya rupiah akan mulai menguat terhadap dolar AS dan stabil.

Belanja Subsidi & Kompensasi Capai 52,1% APBN, Naik 44% YoY

Rabu, 8 Juli 2026 13:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114283/belanja-subsidi-kompensasi-capai-52-1-apbn-naik-44-yoy/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa hingga semester I-2026, jumlah belanja subsidi dan kompensasi yang telah dilakukan oleh pemerintah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari APBN.

Purbaya mengatakan, anggaran yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut terdiri dari anggaran subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.

“Realisasi subsidi dan kompensasi semester I tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp161,4 triliun,” kata Purbaya dalam rapat Kerja antara Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan, Selasa (7/7/2026).

Purbaya juga menyebut bahwa realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi sedangkan realisasi subsidi non-energi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran subsidi pupuk.

Selain itu, Purbaya juga mengatakan bahwa realisasi penyaluran barang bersubsidi sampai dengan semester I-2026 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode yang sama tahun 2025.

“Realisasi penyaluran volume BBM meningkat sebesar 7,8% volume LPG 3 kg meningkat sebesar 2% pelanggan listrik bersubsidi meningkat sebesar 2,1% volume pupuk meningkat sebesar 21,4% dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6%,” kata Purbaya.

Tambah Rp132 Triliun ke Subsidi dan Kompensasi

Hingga akhir tahun pemerintah menargetkan jumlah belanja negara yang mencapai Rp3.942,4 triliun atau mencapai 102,6% dibandingkan pagu APBN yang ditetapkan di tahun 2025. Angka tersebut tumbuh 14,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rinciannya sebesar 1.630 triliun ditujukan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), kemudian belanja non K/L sebesar Rp1.615 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp696,9 triliun.

“Outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah, subsidi dan kompensasi,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut bahwa outlook belanja ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat serta, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah penanggulangan bencana dan tambahan otonomi khusus.

Sementara itu, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau mencapai 101,7% dibanding target APBN dan tumbuh sebesar 16% year on year.

Sehingga, bendahara negara memperkirakan bahwa defisit APBN di tahun 2026 mencapai Rp734,3 triliun dengan presentasi sebesar 2,85% hadap PDB.

Pemerintah Tegaskan Pembentukan PFII Tidak Libatkan APBN, Tapi Andalkan Danantara

Rabu, 8 Juli 2026 18:58 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tegaskan-pembentukan-pfii-tidak-libatkan-apbn-tapi-andalkan-danantara>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan permodalan awal pembentukan kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi direncanakan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan, pemerintah mengupayakan agar pembentukan PFII tidak membebani keuangan negara.

"Ya modal awalnya untuk sementara prinsipnya kalau bisa tidak dari APBN. Karena Danantara sudah punya (dana). Tapi nanti kita lihat, masih bisa bergeser," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR RI di sela rapat dengan Komisi XI DPR RI membahas RUU PFII, Rabu (8/7/2026).

Herman menyampaikan, skema pendanaan tersebut masih dapat berubah seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII bersama DPR RI.

Sementara itu, Head of Economics, Portfolio Alignment and Sustainability BPI Danantara, Masyitah Crystallin, belum memberikan kepastian mengenai besaran modal maupun sumber penghimpunan modal yang melibatkan Danantara dalam penyediaan modal awal tersebut. Menurutnya, seluruh ketentuan masih menunggu pembahasan dan pengesahan RUU PFII.

"RUU-nya belum keluar. Itu terserah pemerintah, tanya ke Kemenkeu," ujar Masyitah kepada awak media di Kompleks Parlemen.

Dalam draf RUU PFII, tepatnya pada Pasal 5, disebutkan bahwa sumber permodalan awal PFII berasal dari BPI Danantara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran modal awal yang akan disetor untuk pembentukan kawasan pusat keuangan internasional tersebut.

RUU PFII hanya mengatur bahwa modal awal harus disalurkan paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan mengenai penyediaan modal tersebut ditetapkan.

Indeks Ekonomi Saat Ini Turun ke 109,2 pada Juni 2026, Optimisme Konsumen Melandai

Rabu, 8 Juli 2026 13:02 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-ekonomi-saat-ini-turun-ke-1092-pada-juni-2026-optimisme-konsumen-melandai>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) pada Juni 2026 mencapai sebesar 109,2 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 112,2. Meski menurun, memang IKE masih berada di level optimis yakni dengan indeks diatas 100.

“IKE Juni 2026 berada pada level optimis (indeks >100), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 112,2,” mengutip Laporan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), Rabu (8/7/2026).

BI menyebut, IKE masih berada di zona optimis ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 119,8, 101,8, dan 105,9, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3 (Grafik 4).

Adapun secara spasial, sebagian besar kota mengalami penurunan IKE terutama di Makassar, Banten, dan Medan.

Sejumlah kota yang mencatatkan peningkatan IKE, antara lain, di Mataram, Padang, dan Palembang.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat menurun pada seluruh kelompok, kecuali pada pengeluaran Rp 2,3 juta hingga Rp 3 juta.

Sedangkan Indeks Penghasilan Saat Ini per kelompok usia sebagian besar mengalami penurunan kecuali pada usia 51-60 tahun.

Selanjutnya, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini mengalami penurunan pada seluruh tingkat pendidikan. Meskipun demikian, responden berpendidikan sarjana dan akademi/diploma masih mencatatkan indeks pada level optimis (indeks >100), masing-masing sebesar 109,0 dan 101,2.

Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan lainnya telah berada pada level pesimis.

Berdasarkan kelompok usia, indeks masih berada di level optimis pada kelompok usia 20-40 tahun, sedangkan kelompok usia diatas 41 tahun berada pada level pesimis.

Cadangan Devisa Naik Tipis, BI Masih Hadapi Tantangan Jaga Stabilitas Rupiah

Rabu, 8 Juli 2026 09:10 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-naik-tipis-bi-masih-hadapi-tantangan-jaga-stabilitas-rupiah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah terus menyusut dalam beberapa bulan terakhir, cadangan devisa Indonesia akhirnya mencatat kenaikan pada Juni 2026.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Juni mencapai US\$ 145,6 miliar, naik tipis US\$ 700 juta dibandingkan posisi akhir Mei 2026.

Meski demikian, posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US\$ 152,57 miliar, sehingga belum mencerminkan pemulihan yang kuat.

BI menjelaskan, kenaikan cadangan devisa didukung oleh penerimaan pajak dan jasa, di tengah penggunaan devisa untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dengan nilai tersebut, cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar tiga bulan impor.

Perbaikan cadangan devisa juga sejalan dengan berbaliknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pada kuartal II-2026 terjadi arus modal masuk (capital inflow) sebesar US\$ 7,98 miliar, berbalik dari kuartal I-2026 yang mencatat arus keluar (capital outflow) sebesar US\$ 1,47 miliar.

Aliran dana tersebut terutama berasal dari instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencatat inflow sebesar US\$ 8,48 miliar, disusul Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$ 1,78 miliar.

Sementara itu, pasar saham masih mengalami arus keluar dana asing sebesar US\$ 2,3 miliar.

Namun, derasnya arus modal asing belum mampu mengangkat kinerja rupiah. Sepanjang kuartal II-2026, nilai tukar rupiah masih terdepresiasi sekitar 4,96%.

Pada akhir Juni, rupiah ditutup di level Rp 17.907 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah sempat menyentuh posisi terlemah Rp 18.178 per dolar AS pada 8 Juni lalu.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kenaikan cadangan devisa saat ini lebih mencerminkan hasil kebijakan stabilisasi BI dibandingkan sinyal pemulihan yang berkelanjutan.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan dan imbal hasil SRBI yang menarik kembali mendorong investor asing masuk ke instrumen berdenominasi rupiah, tetapi mayoritas masih memilih aset berimbal hasil tinggi dan berjangka pendek.

"Saya melihat pembalikan cadangan devisa Juni masih lebih bersifat stabilisasi sementara daripada awal tren pemulihan jangka panjang," ujar Josua.

Ia menjelaskan, pemulihan cadangan devisa baru akan lebih solid apabila surplus neraca dagang kembali terjaga secara konsisten, aliran modal asing semakin terdiversifikasi ke SBN dan investasi langsung, serta kebutuhan intervensi BI di pasar valas berkurang karena nilai tukar rupiah semakin stabil.

Selama arus dana masih bergantung pada SRBI, cadangan devisa memang dapat bertahan, tetapi tetap rentan terhadap pembalikan arus modal ketika sentimen global berubah.

Defisit APBN 2026 Diproyeksi Melebar, Kualitas Fiskal Masih Jadi Tantangan

Rabu, 8 Juli 2026 09:00 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-2026-diproyeksi-melebar-kualitas-fiskal-masih-jadi-tantangan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan tetap terjadi di tengah berbagai tekanan ekonomi.

Namun, pelebaran defisit di atas target APBN menjadi sinyal bahwa kualitas fiskal pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi penerimaan negara dan ketergantungan pada pembiayaan utang.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dibanding target dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Pelebaran defisit terjadi karena belanja negara diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan, meski keduanya sama-sama melampaui target awal.

Di balik proyeksi tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ukuran yang lebih penting untuk menilai kesehatan fiskal adalah keseimbangan primer.

Outlook keseimbangan primer 2026 diperkirakan defisit Rp 152,1 triliun, jauh lebih lebar dibanding target APBN sebesar Rp 89,7 triliun.

"Keseimbangan primer yang defisit jauh lebih besar memberi sinyal bahwa penerimaan negara belum cukup membiayai belanja pokok sebelum bunga utang diperhitungkan," ujar Yusuf, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah masih mengandalkan utang bukan hanya untuk membayar bunga, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan belanja dasar negara.

Dalam jangka pendek situasi ini masih dapat dikelola, tetapi jika terus berlangsung ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit karena porsi anggaran untuk membayar kewajiban utang akan terus membesar.

Yusuf juga menyoroti kualitas penerimaan negara. Ia memperkirakan penerimaan pajak pada 2026 belum mampu mencapai target, sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan melampaui target.

Kondisi itu memang membantu menahan pelebaran defisit, tetapi sekaligus menunjukkan APBN masih bergantung pada penerimaan yang bersifat siklikal, seperti harga komoditas dan dividen BUMN.

Meski demikian, ia melihat sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan. Defisit APBN pada semester I 2026 tercatat lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mulai pulih.

Tekanan fiskal pada awal tahun juga dinilai sebagai konsekuensi percepatan belanja pemerintah sebelum penerimaan negara meningkat pada paruh kedua tahun.

Dari sisi legislatif, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak pelebaran defisit terhadap persepsi pelaku pasar.

Meski selisihnya hanya sekitar 0,17 poin persentase dari target APBN, peningkatan defisit dinilai dapat memengaruhi kepercayaan investor di tengah tingginya perhatian terhadap belanja fiskal pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai proyeksi defisit tersebut masih berpotensi membaik. Outlook saat ini belum memasukkan potensi efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, penurunan harga minyak, perbaikan penerimaan pajak dan bea cukai, serta pertumbuhan ekonomi yang sesuai proyeksi diyakini dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga defisit APBN hingga akhir tahun masih berpeluang ditekan.

Realisasi PNBP Semester I Naik 21,6% Jadi Rp 271 Triliun, Didorong Harga Komoditas

Rabu, 8 Juli 2026 16:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pnbp-semester-i-naik-216-jadi-rp-271-triliun-didorong-harga-komoditas>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2026 mencapai Rp 271 triliun. Capaian tersebut setara 59% dari target APBN 2026 sebesar Rp 459,2 triliun dan tumbuh 21,6% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 222,9 triliun.

"Realisasi PNBP mencapai Rp 271,0 triliun atau tumbuh 21,6% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini setara 56,9% dari target APBN. Ini didukung oleh peningkatan volume layanan pemerintah, perbaikan tata kelola, serta masih terjaganya harga beberapa komoditas strategis," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (8/7/2026).

Purbaya mengatakan, peningkatan realisasi PNBP tersebut terutama ditopang oleh kinerja pendapatan sumber daya alam (SDA), peningkatan PNBP kementerian/lembaga (K/L), serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Menurutnya, pendapatan SDA migas mendapatkan dukungan dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), peningkatan lifting pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kinerja pendapatan SDA migas didukung oleh kenaikan ICP, kenaikan lifting periode Desember-Mei serta pelemahan nilai tukar rupiah," jelas Purbaya.

Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas terutama didorong oleh kenaikan harga mineral acuan, khususnya komoditas nikel, tembaga, emas, dan perak.

Di sisi lain, realisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak berulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang pengelolaannya telah dialihkan kepada BPI Danantara.

Adapun kinerja PNBP kementerian/lembaga (PNBP-K/L) ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa komunikasi dan informatika serta pendapatan penegakan hukum, termasuk hasil kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Sementara itu, pendapatan BLU didorong oleh peningkatan layanan kesehatan serta kenaikan harga dan tarif penjualan ekspor CPO sawit dan produk turunannya.

Sejalan dengan peningkatan realisasi tersebut, pemerintah juga menaikkan outlook target PNBPN dalam APBN 2026. Target PNBPN dikerek menjadi Rp 575,1 triliun atau mencapai 125,2% dari target awal APBN 2026 sebesar Rp 459,2 triliun.

Target tersebut tumbuh 6,2% secara tahunan (yoy), mencerminkan optimisme pemerintah terhadap penguatan penerimaan negara di luar pajak melalui optimalisasi SDA, layanan pemerintah, serta kinerja BLU.

Cadangan Devisa Diprediksi Tetap Stabil pada Semester II 2026

Rabu, 8 Juli 2026 16:56 WIB

Reporter: Vendy Yhulia Susanto, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-diprediksi-tetap-stabil-pada-semester-ii-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) memproyeksikan cadangan devisa Indonesia tetap stabil pada semester II 2026. Cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 sedikit meningkat menjadi US\$ 145,6 miliar dari US\$ 144,9 miliar pada Mei, menandai peningkatan pertama setelah menurun empat bulan berturut-turut.

Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan, pertahanan cadangan devisa BI selama periode ini ditutupi oleh pinjaman multi-mata uang yang lebih tinggi dengan penerbitan obligasi internasional US\$ 1,5 miliar oleh Danantara serta obligasi Samurai dan Blue sebesar US\$ 1,08 miliar.

Harry juga menyoroti kebijakan moneter lebih ketat dengan suku bunga BI yang naik sebesar 100 bps, membuat rupiah menguat ke bawah Rp 18.000 per dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun biaya intervensi menjadi lebih mahal, hal itu telah membantu mendukung kepercayaan pasar dan menyediakan pasar keuangan domestik yang lebih stabil.

“Ke depan, dengan asumsi pemerintah dapat menyampaikan komunikasi fiskal yang lebih jelas dan lebih baik, kami memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan tetap stabil di semester kedua tahun 2026,” ujar Harry Su dalam risetnya pada Rabu (8/7/2026).

Meski demikian, Harry bilang, risiko penurunan tetap ada. Ketidakpastian seputar kebijakan moneter global, imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan potensi episode arus keluar modal dapat terus menghasilkan volatilitas pada mata uang pasar negara berkembang, termasuk rupiah.

“Penurunan kinerja perdagangan Indonesia baru-baru ini perlu dipantau secara ketat, karena pendapatan ekspor yang lebih lemah dapat memperlambat laju akumulasi cadangan,” terang dia.

Selain itu, BI telah berupaya untuk menekan spekulasi ritel domestik dengan menurunkan batas atas untuk pembelian tunai dan spot mata uang asing tanpa dokumen pendukung dari US\$ 100.000 menjadi US\$ 50.000 pada Mei 2026 dan pemotongan lainnya menjadi US\$ 25.000 pada Juni 2026, sebelum pembatasan lebih lanjut menjadi US\$ 10.000 yang berlaku efektif 1 Juli 2026.

Hal ini telah membantu cadangan devisa berada pada angka 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, lebih tinggi dari patokan kecukupan internasional sekitar tiga bulan.

Sementara itu, Kiwoom Sekuritas menilai dari perspektif pasar keuangan, peningkatan cadangan devisa menjadi sentimen positif bagi aset domestik karena memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental eksternal Indonesia.

Ke depan, prospek cadangan devisa diperkirakan tetap terjaga seiring berlanjutnya arus masuk modal asing, surplus transaksi berjalan yang terkendali, serta kebijakan moneter yang tetap berfokus pada stabilitas nilai tukar.

Pemerintah Optimistis PFII Berpotensi Tarik Investasi Global hingga Rp 500 Triliun

Rabu, 8 Juli 2026 18:03 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-optimistis-pfii-berpotensi-tarik-investasi-global-hingga-rp-500-triliun>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperkirakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menarik investasi global sebesar Rp 300 triliun hingga Rp 500 triliun pada tahap awal.

Namun, angka tersebut masih berupa estimasi awal dan sangat bergantung pada daya saing Indonesia dalam menarik investor dibandingkan pusat keuangan internasional lainnya.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Herman Saheruddin, mengatakan, pemerintah masih menghitung potensi investasi yang dapat masuk ke PFII.

Meski demikian, berdasarkan perhitungan moderat, investasi yang berpotensi masuk diperkirakan berada di kisaran Rp 300 triliun hingga Rp 500 triliun.

"Nah itu gambaran awal. Dana awal itu masih kami estimasi. Kalau dari hitungan yang moderat, mungkin sekitar Rp 300 triliun sampai Rp 500 triliun. Tapi sekali lagi, ini semua tergantung dari asumsi karena kita bersaing dengan Singapura, Dubai, dan lain-lain," ujarnya kepada awak media di Gedung Parlemen, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan potensi investasi global yang masuk ke Indonesia melalui keberadaan PFII. Investasi tersebut dapat berupa pembukaan kantor cabang bank asing, pendirian perusahaan, maupun bentuk investasi kelembagaan lainnya.

"Kalau kita buka ini berarti investasinya masuk. Apakah mereka bikin cabang bank asing, apakah mereka bikin perusahaan yang diinkorporasi di situ, dan sebagainya," katanya.

Menurutnya, salah satu daya tarik PFII adalah adanya sistem regulasi yang lebih kompetitif dibandingkan ketentuan yang berlaku di dalam negeri saat ini.

Misalnya, sejumlah pembatasan kepemilikan asing yang berlaku di Indonesia dapat disesuaikan agar lebih menarik bagi pelaku usaha internasional.

Ia menambahkan, pengembangan PFII juga akan mengadopsi praktik-praktik yang lazim diterapkan di pusat keuangan global, termasuk penggunaan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan standar internasional, seperti penerapan common law untuk mendukung aktivitas bisnis lintas negara.

Pemerintah berharap kehadiran PFII dapat meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional sekaligus menarik lebih banyak investor dan lembaga keuangan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis kegiatan bisnis di kawasan.

Modal Awal Pusat Finansial Internasional Disiapkan dari Danantara, Bukan APBN

Rabu, 8 Juli 2026 19:03 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sebut-modal-pembentukan-pfii-bukan-dari-apbn-tapi-danantara>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan pembentukan kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diupayakan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai gantinya, modal awal pembentukan kawasan tersebut direncanakan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pemerintah berupaya agar pembentukan PFII tidak menambah beban keuangan negara.

Menurutnya, Danantara menjadi opsi utama penyedia modal awal karena telah memiliki dana yang dapat dimanfaatkan.

"Modal awalnya untuk sementara prinsipnya kalau bisa tidak dari APBN. Karena Danantara sudah punya (dana). Tapi nanti kita lihat, masih bisa bergeser," ujar Herman usai rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/7).

Meski demikian, Herman menegaskan skema pendanaan tersebut belum bersifat final. Sumber modal awal masih berpeluang berubah mengikuti perkembangan pembahasan RUU PFII di DPR.

Di sisi lain, Head of Economics, Portfolio Alignment and Sustainability BPI Danantara, Masyitah Crystallin, belum dapat memastikan besaran modal maupun mekanisme penghimpunan dana yang akan melibatkan Danantara. Ia menyebut seluruh ketentuan masih menunggu pembahasan dan pengesahan RUU PFII.

Dalam draf RUU PFII, Pasal 5 mengatur bahwa sumber modal awal lembaga berasal dari BPI Danantara dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah hingga kini belum menetapkan besaran modal yang akan disetor untuk membentuk kawasan pusat keuangan internasional tersebut. RUU PFII hanya mengatur bahwa modal awal wajib disalurkan paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan mengenai penyediaan modal ditetapkan.

Keyakinan Konsumen Turun ke 117,8, Ekonom: Alarm bagi Daya Beli Masyarakat

Rabu, 8 Juli 2026 17:57 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/keyakinan-konsumen-turun-ke-1178-ekonom-alarm-bagi-daya-beli-masyarakat>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indeks keyakinan konsumen (IKK) mencapai 117,8 pada Juni 2026. Indeks ini lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 120,9.

Keyakinan konsumen juga turun dari April 2026 lalu yang mencapai 123,0. Ekonom Makro dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto menilai, tren penurunan keyakinan konsumen tersebut menjadi sinyal adanya dampak dari tekanan eksternal yang sudah semakin terasa dari sisi konsumen.

“Jadi yang sebelumnya yang menanggung tekanan eksternal itu lebih banyak produsen, sekarang sudah terasa di sisi konsumen,” tutur Myrdal kepada Kontan, Rabu (8/7/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm yang sangat kuat terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, porsi tabungan konsumen terus menurun. Hal itu menunjukkan tekanan terhadap kondisi keuangan konsumen semakin terasa.

Mengutip laporan Survei Konsumen Bank Indonesia edisi Juni 2026 proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) tercatat sebesar 17,0% pada Juni 2026. Angka tersebut turun dari 17,5% pada Mei 2026.

Di sisi lain, proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) naik menjadi 73,0% dari sebelumnya 72,3%. Sementara itu, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membayar cicilan atau utang (debt installment to income ratio) relatif stabil, yakni 10,0%, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 10,2%.

Selain itu, ia menambahkan tekanan juga tercermin dari menurunnya kapasitas masyarakat untuk membeli barang tahan lama serta semakin beratnya kondisi konsumen dalam mencari pekerjaan.

“Jadi tekanan di sisi konsumen itu sudah sangat terasa, ditambah lagi juga dari aspek terkait dengan kapasitas pembelian barang tahan lama, lalu juga dari kondisi konsumen untuk mencari kerja, ini juga kalau kita lihat sudah mendapatkan pressure-nya,” ungkap Myrdal.

Myrdal menilai, dalam kondisi seperti saat ini pemerintah perlu tetap mengambil langkah yang bersifat defensif dengan memberikan stimulus yang kuat kepada masyarakat rentan, terutama kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang masih terbatas.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar kondisi ekonomi di tingkat akar rumput tetap kondusif. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus menyalurkan berbagai stimulus serta melanjutkan program bantuan sosial.

Di sisi lain, ia berpandangan pemerintah juga perlu tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terhadap program-program yang bersifat tersier atau belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Langkah efisiensi tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga minyak dunia setelah meningkatnya tensi geopolitik menyusul serangan Iran terhadap kapal Amerika Serikat.

“Terus ada serangan balik lagi, jadi kondisinya ini masih penuh dengan ketidakpastian, dari sisi global sendiri juga belum kondusif, sehingga mau tidak mau, kita harus dari sisi Indonesia, dari pemerintah,

harus melakukan langkah defensif, supaya dari aktivitas ekonomi kita tetap kondusif dan tidak mengalami peningkatan pressure sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Myrdal menambahkan, pelaku pasar masih menunggu rilis data penjualan ritel yang dijadwalkan terbit pada esok hari. Menurutnya, kinerja penjualan ritel berpotensi kembali melemah seiring tekanan yang masih membayangi konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, ia menilai Bank Indonesia (BI) perlu tetap mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari arus keluar modal pada pos other investment yang tercermin dalam neraca pembayaran Indonesia.

Karena itu, ia berpandangan BI perlu mengambil langkah intervensi pasar yang lebih agresif. Namun, di saat yang sama BI juga menghadapi dilema dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Menurutnya, kenaikan BI-Rate secara terus-menerus berpotensi membebani sektor riil sehingga insentif bagi masyarakat dan dunia usaha tetap perlu diberikan.

“Jangan sampai suku bunga naik, NPL (non-performing loan) juga naik, bisnis perbankan juga bisa tergerus kapasitasnya, bisa ada pressure lebih lanjut di sektor perbankan, jadi itu yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Lebih dari itu, ia mengatakan tekanan terhadap perekonomian kembali meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.

Meski demikian, Myrdal berharap lonjakan harga minyak tidak berlangsung lama seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, apabila harga minyak kembali menurun, tekanan inflasi global juga akan mereda sehingga berpotensi mendorong kembali arus modal masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, nilai tukar rupiah diharapkan dapat lebih stabil dan tidak terus mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dinilai akan memberikan ruang bagi perekonomian nasional untuk kembali tumbuh lebih kuat.

Ekonom Ungkap Sejumlah Faktor yang Tahan Penguatan Rupiah

Rabu, 8 Juli 2026 11:50 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114274/ekonom-ungkap-sejumlah-faktor-yang-tahan-penguatan-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom membeberkan pemulihan nilai tukar rupiah belum sepenuhnya akan terjadi karena penguatan sebelumnya lebih banyak ditopang oleh arus modal jangka pendek dan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia (BI) sementara hingga kini masih terdapat sejumlah tekanan struktural.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pelemahan rupiah mendekati Rp18.000/US\$ terjadi karena tekanan yang datang dari dua arah sekaligus yakni tekanan global yang kembali menguat dan faktor domestik yang belum cukup meyakinkan pasar.

Dari sisi global, dolar Amerika Serikat (AS) masih ditopang oleh ekspektasi suku bunga yang tetap tinggi, imbal hasil obligasi AS 10 tahun yang berada di sekitar 4,48%, serta pasar yang masih menunggu data ekonomi AS dan risalah rapat bank sentral AS.

Sejalan dengan hal itu, laporan Maybank juga memperkirakan indeks dolar AS bergerak dalam kisaran 100,50–101,80 dalam jangka pendek, yang berarti ruang penguatan dolar masih terbuka bila data AS kembali kuat.

Josua menjelaskan, tekanan rupiah juga dipicu oleh arus modal yang belum sepenuhnya kuat. Meskipun pada Juni 2026 Indonesia mencatat aliran masuk portofolio sekitar US\$5,52 miliar, terutama ke SRBI sebesar US\$3,85 miliar dan SBN sebesar US\$1,26 miliar, sementara pasar saham masih outflow US\$1,09 miliar.

“Artinya, dukungan ke rupiah lebih banyak berasal dari instrumen jangka pendek seperti SRBI, bukan dari arus modal jangka panjang yang lebih stabil. Kondisi ini membuat rupiah bisa menguat cepat ketika ada arus masuk, tetapi juga mudah kembali tertekan ketika sentimen global berubah,” kata Josua ketika dihubungi, Rabu (8/7/2026).

Tak hanya itu, dia menyebut faktor eksternal Indonesia juga belum sepenuhnya nyaman. Neraca perdagangan Mei 2026 mencatat defisit US\$1,16 miliar. Defisit pertama dalam lebih dari enam tahun, karena impor tumbuh 22,16% secara tahunan sementara ekspor turun 5,73%.

Kondisi tersebut, kata dia, memberi sinyal bahwa kebutuhan valas untuk impor masih tinggi, sedangkan penerimaan valas dari ekspor melemah. Jika tren surplus perdagangan makin mengecil dan transaksi berjalan melebar, maka tekanan ke rupiah akan lebih besar meskipun cadangan devisa masih memadai.

Selain itu, tekanan inflasi domestik juga mulai menjadi perhatian. Inflasi Juni 2026 naik menjadi 3,34% secara tahunan dan 0,44% secara bulanan, terutama karena kenaikan harga BBM nonsubsidi, tarif angkutan udara, pangan, dan pelemahan rupiah yang menaikkan biaya barang impor.

“Ini penting karena pelemahan rupiah tidak hanya menjadi isu pasar keuangan, tetapi mulai berpotensi masuk ke harga barang konsumsi dan biaya produksi. Bila tekanan ini berlanjut, pasar akan menilai BI perlu menjaga suku bunga tinggi lebih lama,” jelas dia.

Josua berpandangan, dalam jangka pendek atau sepekan ke depan rupiah kemungkinan masih bergerak rapuh di kisaran Rp17.900/US\$–18.150/US\$. Rupiah bisa kembali ke bawah Rp18.000 bila dolar AS melemah, imbal hasil obligasi AS turun, harga minyak tetap terkendali, dan lelang SBN mendapat permintaan yang baik.

“Namun, jika data AS kuat, risalah rapat bank sentral AS bernada ketat, harga minyak naik, atau investor asing kembali mengurangi posisi di SBN dan saham, rupiah berisiko bertahan di atas Rp18.000/US\$,” Josua menegaskan.

Berdasarkan data Bloomberg yang dia himpun, USD/IDR berada di sekitar Rp17.988, sementara imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 7,13% menjelang hasil lelang SBN, sehingga pasar masih menuntut imbal hasil tinggi untuk memegang aset rupiah.

Cadev Masih Kuat

Di sisi lain, dia menilai cadangan devisa (cadev) sekitar US\$145 miliar belum menunjukkan BI kehabisan amunisi. Justru cadev naik menjadi US\$145,9 miliar pada akhir Juni dari US\$144,9 miliar pada akhir Mei. Angka ini setara 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Jadi, bila rupiah kembali menembus Rp18.000/US\$, respons BI seharusnya bukan panik, tetapi memperkuat stabilisasi secara terukur agar cadangan devisa tidak terkuras berlebihan,” terangnya.

Josua berpendapat arah kebijakan moneter ke depan kemungkinan tetap defensif. BI sudah menaikkan suku bunga acuan alias BI-Rate menjadi 5,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) Juni, dengan alasan memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga inflasi 2026–2027 tetap dalam sasaran.

BI juga menyatakan akan meningkatkan intervensi valas melalui pasar dalam negeri dan luar negeri, menjaga daya tarik SRBI, serta tetap menggunakan kebijakan makroprudensial longgar agar kredit sektor riil tidak terlalu tertekan.

“Jadi, kebijakan BI akan tetap berlapis: intervensi valas, penguatan instrumen rupiah jangka pendek, pengelolaan likuiditas, dan suku bunga yang tetap tinggi,” ujarnya.

Kenaikan BI Rate

Josua menilai jika rupiah hanya sesaat menembus Rp18.000/US\$, nampaknya BI belum tentu langsung menaikkan kembali suku bunga. Bank sentral, kata dia, kemungkinan akan lebih dulu memperkuat intervensi, menjaga imbal hasil SRBI, dan memastikan pasokan valas tetap cukup.

Akan tetapi, jika rupiah bertahan lama di atas Rp18.000/US\$, pelemahan mulai tidak teratur, inflasi makin mendekati batas atas sasaran, dan aliran modal keluar meningkat, maka peluang kenaikan BI-Rate tambahan 25 basis poin menuju 6,00% akan kembali terbuka.

Josua menyarankan kenaikan suku bunga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena biaya ke sektor riil cukup besar, terutama saat PMI manufaktur sudah melemah dan daya beli masyarakat belum pulih kuat.

“BI tetap menjaga stabilitas rupiah tanpa terlalu agresif menguras cadangan devisa, pemerintah memperkuat kredibilitas fiskal dan pasokan valas dari ekspor, serta koordinasi kebijakan diarahkan untuk menjaga kepercayaan pasar. Selama kepercayaan pasar belum membaik, rupiah akan tetap sensitif di sekitar batas psikologis Rp18.000/US\$,” jelas dia.

Menilik Manuver Investor Asing di Pasar Surat Utang RI

Rabu, 8 Juli 2026 13:54 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114324/menilik-manuver-investor-asing-di-pasar-surat-utang-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Tekanan jual melanda pasar Surat Utang Negara (SUN) dalam sesi perdagangan Rabu (8/7/2026), yang tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) pada hampir semua tenor, terutama tenor menengah hingga panjang.

Melansir data Bloomberg, kenaikan yield terbesar terjadi pada tenor 9 tahun naik 8,2 basis poin (bps) ke 7,26%. Disusul 4 tahun naik 7,3 basis poin (bps) ke 7,25%, lalu tenor 8 tahun naik 6,9 bps ke 7,25%, dan tenor 5 tahun naik 6,5 bps ke 7,19%.

Yield tenor acuan 10 tahun juga ikut naik 4,8 bps ke level 7,23%, menunjukkan bahwa minat beli belum cukup kuat. Sebaliknya, hanya sedikit tenor yang mencatat penurunan yield, yakni tenor 1 tahun, 18 tahun, dan 40 tahun.

Sepertinya investor masih melakukan repricing terhadap aset pendapatan tetap Indonesia. Aksi jual melanda tenor yang paling likuid, sementara permintaan terhadap obligasi jangka pendek relatif lebih baik sebagai strategi defensif untuk mengurangi risiko durasi.

Aksi jual ini menggenapkan penurunan kepemilikan SUN oleh investor asing. Untuk diketahui, kepemilikan asing terhadap SUN hampir tidak mengalami peningkatan sejak 2019.

Meskipun terjadi perubahan kepemilikan dari waktu ke waktu, secara keseluruhan investor asing belum kembali menambah eksposurnya secara signifikan di pasar obligasi Indonesia.

Di sisi lain, dalam catatannya UBS menilai sebagian besar investor asing yang membeli aset Indonesia juga melakukan lindung nilai terhadap eksposur rupiah mereka. Akibatnya, meskipun dana asing masuk ke pasar obligasi atau saham, dampaknya terhadap permintaan rupiah relatif jauh lebih kecil.

Penyebab asing banyak melepas aset rupiah belakangan dipicu oleh data ekonomi yang belum dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi RI. Neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami penurunan pada semester pertama 2026, dan mendekati level terendah sejak pandemi Covid-19.

Pada saat yang sama, arus modal juga ikut turun ke level terendah dalam hampir dua puluh tahun terakhir. Di sisi lain, arus masuk investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI), investasi portofolio maupun investasi lainnya mengalami perlambatan sehingga total arus modal ke Indonesia tercatat terus melemah.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga telah memicu penurunan arus investasi sektor swasta sekitar US\$30 miliar per tahun, dibandingkan periode 2015-2019.

Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg hingga 3 Juli 2026, investor juga tercatat melepas kepemilikannya senilai US\$2,03 miliar di pasar obligasi dalam 12 bulan terakhir.

Dengan kondisi saat ini, UBS menilai bahwa secara struktural Indonesia kini menghadapi penurunan kemampuan menarik arus modal asing untuk membiayai defisit transaksi berjalan.

Artinya, defisit transaksi berjalan sebesar 1,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini memiliki dampak terhadap nilai tukar yang setara dengan defisit sekitar 3-4% terhadap PDB pada tahun 2018.

Dengan kata lain, kemampuan RI dalam membiayai defisit eksternal melalui arus modal telah melemah secara signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.

Purbaya Tambah Belanja Energi 2026 Rp132 T, Defisit Bisa Melebar

Rabu, 8 Juli 2026 15:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/114317/purbaya-tambah-belanja-energi-2026-rp132-t-defisit-bisa-melebar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan tambahan belanja sebesar Rp132 triliun hingga akhir tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah yang membengkak imbas harga minyak dunia melambung.

Dalam paparannya, Purbaya merevisi postur APBN 2026 lantaran target belanja naik 2,6% sehingga mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% hingga akhir tahun. Target pendapatan negara juga bertambah menjadi Rp3.208,1 triliun atau naik 1,7% dari target APBN 2026.

Walhasil, dia memperkirakan defisit hingga akhir 2026 dapat melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,85% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB, sekalipun masih berada di bawah batas maksimal 3% sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah, subsidi, dan kompensasi,” kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Purbaya meyakini defisit masih bisa ditekan lebih rendah ketika harga minyak dunia telah melandai.

Dia juga menjelaskan, proyeksi tersebut menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sekitar US\$83 per barel hingga akhir tahun. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga masih melihat peluang tambahan target penerimaan apabila reformasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan penambahan belanja energi tersebut memungkinkan terjadi karena adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itu subsidi dan kompensasi kalau sudah audit dari BPK, dia [Kemenkeu] wajib bayar,” terang Said.

Said menuturkan peningkatan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga energi di tingkat global. Penambahan pembayaran subsidi dan kompensasi juga sudah termasuk dalam anggaran yang dibuat pemerintah.

“Selagi kita ada subsidi, selagi kita ada kompensasi, itu baru boleh dibayar setelah audit dari BPK. Bukan langsung dibayar oleh pemerintah,” ujar dia.

Menggeser BA BUN

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengusulkan pergeseran pos anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Langkah ini, kata dia, untuk memperkuat jaminan sosial, bidang kesehatan dan peningkatan kapasitas K/L untuk melaksanakan tupoksi dan layanan.

Sementara itu, menurut Said, skema tersebut memungkinkan anggaran yang belum terserap dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kementerian lain yang memerlukan tambahan dana.

”Kalau ada kementerian yang membutuhkan tambahan anggaran bisa dipenuhi dari BA BUN. Sebaliknya, kalau ada anggaran yang belum digunakan, bisa ditarik kembali ke BA BUN untuk diprioritaskan ke kebutuhan lain. Tujuannya menjaga keseimbangan fiskal,” jelas Said.

Di sisi lain, Said menilai proyeksi defisit sebesar 2,85% terhadap PDB masih berada dalam batas yang aman. Bahkan, menurut dia, angka tersebut masih berpeluang turun apabila penerimaan negara meningkat atau kebutuhan pembiayaan utang lebih rendah dari perkiraan.

”Pemerintah biasanya mengambil proyeksi yang konservatif. Mudah-mudahan nanti bisa lebih rendah dari 2,85%” imbuhnya.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, hingga semester I-2026, jumlah belanja subsidi dan kompensasi yang telah dilakukan oleh pemerintah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari APBN. Anggaran yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut terdiri dari anggaran subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.

Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama 2025 yang sebesar Rp161,4 triliun.

Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemkab Pati Distribusikan 166.470 Benih Ikan

Rabu, 8 Juli 2026

Penulis: Kontributor Kab Pati, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/percepat-pemulihan-ekonomi-pemkab-pati-distribusikan-166-470-benih-ikan/>

PATI – Sebagai Langkah untuk memulihkan sektor perikanan budidaya ikan setelah terdampak banjir, Pemerintah Kabupaten Pati menmberikan bantuan benih ikan kepada pembudidaya, di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Selasa (7/7/2026).

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Sriwati menerangkan, bantuan yang disalurkan mencapai 166.470 ekor benih ikan nila. Seluruh benih tersebut merupakan hasil produksi UPTD Balai Benih Budidaya Ikan (BBBI) Kabupaten Pati, sebagai dukungan percepatan pemulihan usaha perikanan budidaya pascabanjir.

“Bantuan ini didistribusikan kepada pembudidaya ikan terdampak banjir di lima desa, yakni Desa Talun, Desa Gabus, Desa Bulumanis Lor, Desa Kembang di Kecamatan Dukuhseti, serta Desa Tegalombo di Kecamatan Dukuhseti,” jelas Sriwati.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan, penanganan dampak bencana di Kabupaten Pati tidak dilakukan secara sendiri, melainkan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

“Penanganan dampak bencana di Kabupaten Pati akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat agar bantuan dan pemulihan bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal,” ujar Chandra.

Dia berharap, penyaluran bantuan benih ikan nila tersebut mampu mempercepat pemulihan produktivitas tambak, menjaga keberlangsungan usaha para pembudidaya, sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Pati, setelah terdampak bencana.

Salah seorang pembudidaya ikan tambak asal Dukuhseti, Mahendra mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut, karena dapat memberikan harapan baru bagi para pembudidaya, untuk kembali menjalankan usaha setelah mengalami kerugian akibat banjir.

“Semoga usaha budidaya kami bisa bangkit kembali, semakin maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mahendra.

Pertanggungjawaban APBD Jateng 2025 Disetujui

Rabu, 8 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pertanggungjawaban-apbd-jateng-2025-disetujui/>

SEMARANG – Di tengah impitan tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah, berdaya guna bagi masyarakat.

“Program-program ini harus bisa kita lakukan, dan berdaya guna bagi masyarakat,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di sela acara rapat paripurna persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Rabu (8/7/2026).

Dalam melakukan kerja-kerja pembangunan, Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, sektor investasi, BUMD, dan BLUD perlu terus dikembangkan, untuk memperkuat ekonomi daerah.

Luthfi menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp110 triliun, dengan serapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Sementara pada triwulan pertama 2026, investasi yang masuk mencapai hampir Rp23 triliun, dengan serapan tenaga kerja 92 ribu orang.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jateng, yang telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, sehingga telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam pertanggungjawaban APBD tersebut, realisasi pendapatan APBD Jateng 2025 dilaporkan mencapai Rp23,761 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp23,871 triliun.

Dari struktur tersebut, terdapat defisit sebesar Rp109,86 miliar. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp577,04 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa tercatat sebesar Rp467,18 miliar.

Luthfi juga menyampaikan, nilai kekayaan daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp42,669 triliun. Jumlah tersebut naik Rp2,408 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyebut laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan pemprov, telah sesuai dengan pembahasan DPRD maupun hasil pemeriksaan BPK.

“Jadi antara yang disampaikan Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi sudah ketemu. Meskipun yang sudah dari BPK,” katanya.

Sumanto menjelaskan, defisit dalam APBD merupakan bagian dari manajemen akuntansi pemerintah daerah, dan telah memiliki sumber penutup melalui pembiayaan.

DPRD Jateng juga memberikan sejumlah catatan, terutama agar Silpa dikelola secara lebih terencana. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.

Sesuai mekanisme yang berlaku, raperda pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Humas Jateng)*ul

Harga Telur dan Ayam Hidup Anjlok, Peternak Terpaksa Gadai BPKB demi Beli Pakan

Rabu, 8 Juli 2026 10:28 WIB

Dian Tanti Burhani

<https://www.rmoljawatengah.id/harga-telur-dan-ayam-hidup-anjlok-peternak-terpaksa-gadai-bpkb-demi-beli-pakan>

Harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak terus merosot. Kondisi ini memaksa peternak mencari pinjaman hingga menggadaikan BPKB untuk membeli pakan.

Peternak ayam di Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, mengeluhkan anjloknya harga jual telur dan ayam hidup yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. Akibatnya, banyak peternak mengalami kerugian dan terpaksa mengambil berbagai langkah agar usaha tetap bertahan.

Salah satu peternak, Wahyudi, mengatakan harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp18.000 per kilogram. Sementara harga ayam hidup berada di angka Rp12.500 per kilogram.

Menurutnya, harga tersebut masih jauh di bawah titik impas. Agar usaha tetap menguntungkan, harga telur seharusnya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan ayam hidup minimal Rp20.000 per kilogram.

"Bila harga seperti sekarang, kami masih merugi," ujar Wahyudi, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, tingginya harga pakan menjadi beban terbesar bagi peternak. Di sisi lain, harga jual hasil ternak terus melemah sehingga keuntungan yang diperoleh semakin menipis.

Kondisi tersebut membuat banyak peternak memilih melakukan afkir dini terhadap ayam petelur untuk mengurangi biaya pakan. Bahkan, tidak sedikit yang menjual seluruh populasi ternaknya demi menekan kerugian.

Wahyudi mengaku masih berupaya mempertahankan usahanya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pakan, ia terpaksa mencari tambahan modal dengan menjaminkan aset seperti BPKB kendaraan maupun sertifikat.

"Saya masih bertahan. Sekarang sampai harus mencari pinjaman dengan jaminan BPKB atau sertifikat supaya tetap bisa membeli pakan," katanya.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak sekaligus mengendalikan harga pakan agar usaha peternakan rakyat tetap berjalan.

Menurut Wahyudi, perhatian terhadap peternak rakyat sangat penting untuk menjaga pasokan telur dan daging ayam di tengah meningkatnya biaya produksi.

Sapu Serabut Kelapa Banjarnegara Tembus Pasar Ekspor Asia

Rabu, 8 Juli 2026 08:25 WIB

Gatot Hery Cahyono

<https://www.rmoljawatengah.id/sapu-serabut-kelapa-banjarnegara-tembus-pasar-ekspor-asia>

Limbah serabut kelapa ternyata bisa menghasilkan cuan hingga pasar luar negeri. UMKM di Banjarnegara sukses mengekspor sapu ke China, Vietnam, dan Thailand. UMKM Banjarnegara, sapu serabut kelapa, ekspor sapu, serabut kelapa, Banjarnegara, ekspor China, UMKM ekspor

Serabut kelapa yang selama ini kerap dianggap limbah berhasil disulap menjadi produk bernilai ekspor oleh pelaku UMKM di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Sapu berbahan serabut kelapa produksi perajin lokal kini telah dipasarkan hingga China, Vietnam, dan Thailand.

Perajin sapu serabut kelapa, Esa, mengatakan usahanya mampu memproduksi rata-rata 100 sapu setiap hari dengan melibatkan enam orang pekerja. Waktu & Kalender

"Di sini ada enam karyawan yang membantu proses pembuatan. Rata-rata produksi setiap hari sekitar 100 sapu," ujar Esa saat ditemui di lokasi produksi, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, selain memenuhi permintaan pasar dalam negeri, produknya juga telah menembus pasar internasional. Pembeli dari luar negeri datang langsung ke lokasi produksi sebelum mengirimkan barang ke negara tujuan.

"Alhamdulillah sudah ada yang diekspor ke China, Vietnam, dan Thailand. Ada pembeli yang datang ke sini, kemudian mereka yang mengirimkannya ke luar negeri," katanya.

Proses pembuatan sapu diawali dengan mengolah serabut kelapa menggunakan mesin khusus untuk memisahkan sekaligus menghaluskan serat. Setelah itu, serabut dijemur hingga kering sebelum dirangkai menjadi sapu dengan beberapa tahapan untuk menjaga kualitas produk.

Meski permintaan terus meningkat, Esa mengaku masih menghadapi kendala dalam mengelola limbah sisa serabut kelapa. Selama ini, sisa bahan produksi tersebut sebagian besar masih dibuang atau dibakar karena belum tersedia teknologi yang dapat mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Ia berharap ke depan tersedia peralatan yang mampu mengolah limbah serabut kelapa menjadi produk baru sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi usaha dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Bea Cukai Kudus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp13,29 miliar

Rabu, 8 Juli 2026 15:04 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637753/bea-cukai-kudus-menyelamatkan-potensi-kerugian-negara-sebesar-rp1329-miliar>

Kudus (ANTARA) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp13,29 miliar melalui penindakan 96 kasus pelanggaran cukai rokok selama Januari–Juni 2026.

Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Nur Rusydi di Kudus, Rabu, mengatakan dari penindakan tersebut petugas mengamankan 13,76 juta batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp20,44 miliar.

"Tercatat selama semester pertama tahun 2026 terdapat 96 kasus pelanggaran di bidang cukai rokok yang berhasil ditindak," katanya.

Menurut Nur Rusydi, pelaku masih menggunakan modus yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yakni menerapkan sistem jaringan terputus untuk menghindari penindakan aparat.

Ia berharap pengawasan yang dilakukan secara konsisten, disertai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dapat menekan peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau dapat terus dioptimalkan.

Menurut dia, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berdampak pada industri hasil tembakau yang legal.

Hingga Mei 2026, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp20,35 triliun atau 46,34 persen dari target tahunan sebesar Rp42,5 triliun.

"Untuk mencapai target penerimaan hingga akhir tahun, kami akan mengoptimalkan berbagai upaya, termasuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal," ujarnya.

Nur Rusydi mengatakan keberhasilan optimalisasi penerimaan negara membutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.

Saat ini KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus melayani dan mengawasi 218 pabrik hasil tembakau, empat tempat penjualan eceran, tujuh penyalur barang kena cukai, 31 kawasan berikat, enam perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) besar, 12 perusahaan penerima fasilitas KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta satu perusahaan penerima fasilitas gudang berikat.

Membangun jejaring ekonomi desa di Solo Raya: Koperasi Desa Merah Putih sebagai simpul kemandirian pangan Jawa Tengah

Rabu, 8 Juli 2026 08:58 WIB

Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si

<https://jateng.antaranews.com/berita/637716/membangun-jejaring-ekonomi-desa-di-solo-raya-koperasi-desa-merah-putih-sebagai-simpul-kemandirian-pangan-jawa-tengah>

Solo (ANTARA) - Di tengah berbagai perbincangan mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perhatian publik seringkali lebih tertuju pada aspek-aspek yang bersifat administratif maupun polemik yang mengiringinya.

Padahal, jika dilihat dari perspektif ekonomi regional dan geografi pembangunan, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah koperasi tersebut mampu memperkuat ekonomi desa dan membangun jaringan distribusi pangan yang lebih efisien? Bagi Jawa Tengah, khususnya kawasan Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan sebagian wilayah sekitarnya, koperasi desa memiliki peluang menjadi simpul utama penguatan ekonomi lokal.

Kawasan ini memiliki karakter wilayah yang saling melengkapi sehingga sangat potensial dikembangkan melalui jejaring koperasi yang terintegrasi. Kabupaten Klaten dikenal sebagai salah satu lumbung padi Jawa Tengah sekaligus penghasil berbagai komoditas hortikultura. Boyolali berkembang sebagai sentra peternakan sapi perah dan sapi potong.

Karanganyar menghasilkan sayuran dataran tinggi, teh, kopi, serta berbagai komoditas perkebunan lereng Gunung Lawu. Wonogiri memiliki potensi peternakan, jagung, dan umbi-umbian. Sukoharjo berkembang melalui UMKM pangan dan industri pengolahan, sedangkan Surakarta menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan distribusi regional.

Keberagaman potensi tersebut sesungguhnya merupakan modal ekonomi wilayah yang sangat besar. Namun selama ini hubungan antardaerah belum sepenuhnya membentuk suatu sistem rantai pasok yang terintegrasi. Banyak produk pertanian masih dipasarkan secara individual, bergantung pada tengkulak, atau berpindah melalui jalur distribusi yang panjang sehingga nilai tambah di tingkat petani menjadi relatif kecil.

Di sinilah koperasi desa dapat memainkan fungsi strategis. Dalam perspektif spasial, koperasi bukan hanya lembaga simpan pinjam ataupun tempat membeli pupuk, melainkan pusat agregasi produksi desa. Produk hasil panen dari petani, peternak, nelayan, maupun UMKM dikumpulkan, diseleksi kualitasnya, dikemas, disimpan, kemudian dipasarkan secara kolektif sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi.

Pendekatan ini akan jauh lebih efektif apabila dibangun secara bertingkat. Pada level desa, koperasi menjadi pusat inventarisasi produksi lokal. Pada tingkat kecamatan, beberapa koperasi dapat

membentuk pusat distribusi bersama yang melayani sejumlah desa. Selanjutnya pada tingkat kabupaten dibangun pusat logistik yang menghubungkan berbagai sentra produksi menuju pasar regional. Dengan demikian tercipta sistem distribusi yang efisien dari desa menuju kota tanpa harus melalui terlalu banyak mata rantai perdagangan.

Solo Raya memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan untuk mengembangkan model tersebut. Didukung jaringan jalan nasional, jalan tol, jalur kereta api, serta keberadaan Bandara Adi Soemarmo dan berbagai pusat perdagangan regional, kawasan ini memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap berbagai wilayah di Jawa Tengah maupun provinsi lain.

Kondisi tersebut memungkinkan koperasi desa tidak berhenti pada pemasaran lokal, tetapi berkembang menjadi bagian dari jaringan logistik pangan regional. Penguatan koperasi juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital. Sistem informasi berbasis spasial memungkinkan pemerintah daerah mengetahui lokasi sentra produksi, volume hasil panen, kapasitas gudang, kondisi jaringan jalan, hingga kebutuhan pasar secara lebih akurat.

Dengan dukungan Sistem Informasi Geografis (SIG), distribusi komoditas dapat direncanakan secara lebih efisien sehingga biaya logistik menurun dan keuntungan petani meningkat. Yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi antarkoperasi. Selama ini sebagian besar koperasi masih bekerja sendiri-sendiri.

Padahal tantangan ekonomi modern justru menuntut terbentuknya jaringan usaha yang saling terhubung. Koperasi di Boyolali tidak harus bersaing dengan koperasi di Klaten, demikian pula koperasi Karanganyar tidak harus berdiri sendiri. Sebaliknya, masing-masing dapat menjadi bagian dari rantai pasok kawasan Solo Raya yang saling memperkuat.

Dalam konteks inilah, perhatian publik semestinya lebih diarahkan pada ukuran keberhasilan yang nyata. Yang perlu dievaluasi bukan sekadar bagaimana sebuah program dijalankan pada tahap awal, melainkan apakah koperasi benar-benar mampu meningkatkan pendapatan petani, memperluas akses pasar UMKM, mengurangi biaya distribusi, memperkuat posisi tawar produsen desa, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Perdebatan mengenai berbagai aspek implementasi tentu merupakan bagian yang wajar dalam ruang demokrasi. Namun, pada akhirnya keberhasilan koperasi akan ditentukan oleh kualitas tata kelola, transparansi, profesionalisme pengurus, akuntabilitas keuangan, kemampuan membangun jejaring usaha, serta keberhasilannya memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Indikator-indikator tersebut jauh lebih mudah diukur dan menjadi dasar evaluasi yang objektif. Bagi Jawa Tengah, keberadaan ribuan desa dengan karakter ekonomi yang beragam merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah. Apabila setiap koperasi mampu menjadi simpul ekonomi lokal, kemudian terhubung dalam jaringan kecamatan, kabupaten, hingga antarkabupaten, maka akan terbentuk ekosistem ekonomi desa yang kokoh.

Sistem seperti inilah yang berpotensi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

Ke depan, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya berbasis bukti (evidence-based). Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkan analisis spasial untuk memetakan persebaran koperasi, mengukur jangkauan pelayanannya, mengevaluasi konektivitas dengan sentra produksi, serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan cara tersebut, kebijakan dapat terus diperbaiki berdasarkan data, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau polemik. Apabila koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi secara profesional dan membangun jejaring distribusi yang efisien, maka Solo Raya dapat menjadi contoh

bagaimana desa-desa di Jawa Tengah berkembang bukan hanya sebagai lokasi produksi, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari desa yang saling terhubung akan lahir sistem pangan yang lebih tangguh, rantai pasok yang lebih pendek, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Itulah ukuran utama yang patut dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah koperasi: manfaat nyata bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi bangsa

Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh modal usaha, infrastruktur logistik, maupun dukungan pemerintah. Pengalaman pembangunan pedesaan di berbagai negara menunjukkan bahwa kekuatan terbesar justru terletak pada modal sosial (social capital), yaitu kepercayaan, gotong royong, kepemimpinan lokal, dan jejaring kelembagaan yang telah hidup di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, koperasi perlu dibangun sebagai gerakan bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar sebagai institusi ekonomi. Di Jawa Tengah, salah satu kekuatan yang telah lama mengakar adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani (KWT), karang taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai komunitas lokal yang selama ini menjadi penggerak pembangunan desa.

Jejaring sosial yang telah terbentuk selama puluhan tahun tersebut merupakan modal yang sangat berharga untuk memperkuat keberhasilan koperasi.

Dalam konteks ini, organisasi seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) di lingkungan Muhammadiyah memiliki pengalaman panjang dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, pendampingan petani, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan desa yang berkemajuan.

Struktur organisasinya yang menjangkau tingkat ranting, cabang, daerah, hingga wilayah merupakan jaringan sosial yang dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Keberadaan MPM tidak perlu diposisikan sebagai pelaksana operasional koperasi, melainkan sebagai mitra pemberdayaan yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat literasi kewirausahaan, mengembangkan inovasi produk lokal, mendampingi tata kelola kelembagaan, serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pendekatan tersebut, koperasi memperoleh dukungan bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek pendidikan masyarakat dan penguatan kelembagaan.

*(Guru Besar Geografi UMS) & Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo

Tingkat Inflasi China Melambat, Harga Pabrik Mulai Melandai

Kamis, 9 Juli 2026 11:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114441/tingkat-inflasi-china-melambat-harga-pabrik-mulai-melandai/2>

Bloomberg, Indeks harga konsumen China tumbuh lebih lambat dari perkiraan, sementara tingkat inflasi di sektor pabrik mulai menunjukkan tanda-tanda melandai. Kondisi ini terjadi menyusul penurunan harga komoditas global setelah meredanya ketegangan terkait konflik Iran pada bulan lalu.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (NBS) pada Kamis (9/7), indeks harga konsumen (IHK/CPI) China melambat ke angka 1% pada bulan Juni secara tahunan (year-on-year), dibandingkan dengan kenaikan sebesar 1,2% pada bulan sebelumnya. Angka ini sedikit di bawah estimasi nilai tengah dalam survei ekonom Bloomberg yang memproyeksikan angka 1,1%.

Sementara itu, inflasi di tingkat produsen (IHP/PPI) sedikit meningkat menjadi 4,1% dibandingkan setahun lalu, sesuai dengan perkiraan pasar. Namun, secara bulanan (month-on-month), harga-harga di tingkat pabrik justru turun 0,3% dari bulan Mei, yang menandai penurunan bulanan pertama sejak Juli 2025.

“Penurunan harga minyak mentah global menyebabkan penurunan harga pada sektor-sektor terkait di China,” ujar Dong Lijuan, ahli statistik NBS, dalam pernyataan resmi yang menyertai rilis data tersebut.

Menyusul publikasi data ekonomi tersebut, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah China tenor 10 tahun terpantau stabil di level 1,73%. Di pasar valuta asing, mata uang yuan di pasar domestik (onshore) menguat tipis 0,1% terhadap dolar AS, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik di Asia pada perdagangan Kamis ini.

Pasar obligasi dan mata uang yuan China relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir, di saat pasar keuangan di negara-negara lain justru tertekan oleh penguatan dolar AS serta meningkatnya spekulasi bahwa bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan menaikkan suku bunga acuan.

China kemungkinan besar telah berhasil keluar dari zona deflasi ekonomi secara menyeluruh pada kuartal lalu, setelah sempat terjebak selama tiga tahun berturut-turut. Pembalikan arah ini sebagian besar dipicu oleh masifnya investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) serta guncangan harga minyak yang bersumber dari konflik di Timur Tengah.

Namun, terlepas dari adanya reli harga minyak, chip, dan logam di tingkat global, keberlanjutan pemulihan inflasi secara luas masih diragukan. Hal ini disebabkan karena pihak produsen masih kesulitan untuk membebaskan kenaikan biaya produksi tersebut sepenuhnya kepada konsumen akibat masih lesunya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menekan profitabilitas perusahaan.

Indeks IHK inti, yang menyelidik dan mengeluarkan komponen bergejolak seperti harga bahan pangan dan energi, turun ke angka 1% pada bulan Juni. Angka pertumbuhan ini merupakan laju paling lambat sejak Januari lalu.

Kembalinya tekanan inflasi di negara dengan sektor manufaktur terbesar di dunia itu berpotensi memicu dampak inflasi ke berbagai negara. Harga ekspor China saat ini juga meningkat dengan laju tercepat sejak awal 2023, berbalik arah setelah bertahun-tahun mengalami kontraksi yang hampir tidak terputus.

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan ASEAN, RI Tetap 5,2%

Kamis, 9 Juli 2026 17:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114490/adb-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-asean-ri-tetap-5-2/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara menjadi sebesar 4,5% dari sebelumnya sebesar 4,6%. Tak cuma ASEAN, pertumbuhan ekonomi negara Asia Tenggara berkembang (Developing Southeast Asia) juga direvisi.

“Untuk kawasan Developing Southeast Asia, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi turun menjadi 4,6% pada 2026 dan dipertahankan sebesar 4,8% pada 2027,” kata laporan ADB dalam laporannya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Menurut ADB, Konflik di Timur Tengah telah melemahkan permintaan eksternal, meningkatkan ketidakpastian global, mengganggu rantai pasok, serta mendorong kenaikan biaya input dan harga komoditas.

Meski penurunan proyeksi kawasan hanya sebesar 0,1 poin persentase (pps), ADB menilai dampaknya berbeda di setiap negara. Filipina menjadi salah satu negara yang mengalami revisi turun akibat tertundanya investasi, melemahnya konsumsi swasta karena kenaikan harga komoditas, serta meningkatnya risiko terkait perubahan iklim.

Meski demikian target pertumbuhan Indonesia tetap relatif stabil. ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2026 dan 5,2% pada 2027, tanpa perubahan dari perkiraan sebelumnya.

“Prospek ekonomi Indonesia tetap stabil, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak berubah di level 5,2% pada 2026 dan 5,2% pada 2027,” kata ADB.

Inflasi Indonesia Diperkirakan Naik

ADB juga merevisi naik proyeksi inflasi di sejumlah negara Developing Southeast Asia seperti Filipina, Kamboja Vietnam, Malaysia dan termasuk Indonesia.

“Proyeksi inflasi Indonesia untuk 2026 juga dinaikkan secara moderat, yakni 0,5 poin persentase menjadi 3,0%,” sebut ADB

Di sisi inflasi, ADB justru menaikkan proyeksi inflasi kawasan Asia Tenggara berkembang menjadi 3,9% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi April sebesar 3,2%. Proyeksi inflasi 2027 juga direvisi naik tipis menjadi 2,9% dari sebelumnya 2,8%.

Sementara proyeksi inflasi untuk Developing Southeast Asia direvisi naik dari 3,2% pada proyeksi April menjadi 3,9% pada 2026, serta dari 2,8% menjadi 2,9% pada 2027.

“Revisi kenaikan tersebut mencerminkan lonjakan harga energi dan pangan global yang dipicu oleh krisis di Timur Tengah, serta tekanan nilai tukar yang meningkatkan biaya impor di seluruh kawasan,” sebutnya.

Inflasi Produsen China Capai Level Tertinggi Hampir Empat Tahun pada Juni

Kamis, 9 Juli 2026 09:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-china-capai-level-tertinggi-hampir-empat-tahun-pada-juni>

KONTAN.CO.ID - Inflasi produsen di China meningkat selama empat bulan berturut-turut pada Juni 2026 dan mencapai level tertinggi dalam hampir empat tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan biaya produksi masih tinggi di sektor manufaktur, meski inflasi konsumen mulai melambat.

Mengutip Reuters, data National Bureau of Statistics (NBS) yang dirilis Kamis (9/7/2026) menunjukkan Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) naik 4,1% secara tahunan (year on year/YoY) pada Juni.

Angka tersebut sesuai dengan perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,9% YoY pada Mei.

Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak Juli 2022.

Namun, secara bulanan (month to month/MTM), PPI justru turun 0,3% pada Juni.

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) naik 1,0% YoY pada Juni setelah meningkat 1,2% YoY pada Mei.

Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi ekonom yang memperkirakan inflasi konsumen sebesar 1,1% YoY.

Secara bulanan, CPI turun 0,3%, lebih dalam dibandingkan ekspektasi penurunan 0,2% dan penurunan 0,1% yang terjadi pada Mei.

Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya di tingkat produsen masih cukup tinggi, sementara permintaan domestik belum cukup kuat untuk mendorong percepatan inflasi konsumen.

Dolar Bertahan Menguat Kamis (9/7), Konflik Timur Tengah Picu Permintaan Safe Haven

Kamis, 9 Juli 2026 08:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-bertahan-menguat-kamis-97-konflik-timur-tengah-picu-permintaan-safe-haven>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan menguat terhadap mayoritas mata uang utama pada perdagangan Kamis (9/7/2026).

Eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong permintaan terhadap aset safe haven, sementara lonjakan harga minyak memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) masih berpeluang menaikkan suku bunga.

Mengutip Reuters, dolar AS diperdagangkan di level 162,41 yen, tidak jauh dari posisi terkuatnya sejak 1 Juli. Sementara itu, euro relatif stabil di US\$ 1,1426 dan pound sterling berada di level US\$ 1,3392.

Di kawasan Pasifik, dolar Selandia Baru melanjutkan penguatan setelah bank sentral negara tersebut kembali menaikkan suku bunga dan memberikan sinyal kebijakan moneter yang tetap agresif (hawkish). Mata uang tersebut naik 0,5% menjadi US\$ 0,5725.

Adapun dolar Australia menguat tipis 0,1% ke level US\$ 0,6936.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekoranjang enam mata uang utama, relatif tidak berubah di level 100,96.

Analisis Senior Pasar Keuangan Capital.com Kyle Rodda mengatakan, memanasnya kembali konflik di Timur Tengah telah mengguncang pasar global dan mendorong investor kembali mencari aset yang dianggap aman.

"Lonjakan harga minyak membawa konsekuensi terhadap inflasi dan prospek suku bunga global. Kenaikan harga minyak dapat mempercepat waktu kenaikan suku bunga The Fed," ujarnya.

Sentimen tersebut menguat setelah militer AS melancarkan serangan baru terhadap Iran, hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang dengan Iran telah berakhir.

Perkembangan tersebut mendorong harga minyak melonjak tajam.

Kenaikan harga energi juga memicu kekhawatiran baru terhadap inflasi.

Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun dan 30 tahun naik ke level tertinggi dalam tujuh pekan seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga.

Di sisi lain, risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Juni, yang merupakan pertemuan pertama di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh menunjukkan, pandangan yang lebih hawkish di kalangan pejabat bank sentral.

Berdasarkan CME FedWatch, pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed tahun ini mencapai sekitar 87%.

Harga minyak juga masih bertahan di level tinggi. Minyak mentah Brent diperdagangkan di kisaran US\$ 79,28 per barel setelah melonjak lebih dari 5% pada perdagangan sebelumnya dan mencatat level penutupan tertinggi dalam lebih dari dua pekan.

Yen kembali tertekan

Di sisi lain, yen Jepang kembali berada di bawah tekanan akibat lonjakan harga minyak dan menguatnya dolar AS.

Mata uang Jepang tersebut sempat menyentuh level 162,71 per dolar AS, mendekati titik terlemahnya dalam hampir 40 tahun.

Pelemahan itu menghapus sebagian besar penguatan yen yang terjadi secara tiba-tiba pada pekan lalu.

Analisis IG Tony Sycamore mengatakan, penguatan yen pada pekan lalu diduga dipicu oleh intervensi diam-diam pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Namun, dugaan tersebut baru dapat dipastikan setelah Kementerian Keuangan Jepang merilis data resmi intervensi pada akhir bulan ini.

Menurutnya, arah pergerakan yen dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh data ekonomi AS yang akan datang serta perkembangan di pasar obligasi pemerintah Jepang.

Malaysia Masih Tanggung Beban Utang 1MDB, Sisa Kewajiban Capai RM 8,9 Miliar

Kamis, 9 Juli 2026 15:56 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/malaysia-masih-tanggung-beban-utang-1mdb-sisa-kewajiban-capai-rm-89-miliar>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pemerintah Malaysia masih harus menanggung sisa kewajiban utang sebesar RM 8,9 miliar atau sekitar S\$ 2,8 miliar yang berasal dari skandal 1Malaysia

Development Berhad (1MDB). Kewajiban tersebut terdiri dari pokok utang dan bunga pembiayaan yang akan terus dibayar hingga surat utang syariah (sukuk) jatuh tempo pada 2039.

Melansir Bloomberg (9/7), Wakil Menteri Keuangan Malaysia Liew Chin Tong mengatakan pemerintah masih harus membayar pokok pembiayaan sebesar RM 5 miliar dan bunga senilai RM 3,9 miliar atas sukuk yang dijamin pemerintah.

Hingga akhir Juni 2026, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan RM 42,5 miliar untuk memenuhi kewajiban utang terkait 1MDB. Di sisi lain, pemerintah berhasil memulihkan aset dan dana sebesar RM 31,3 miliar dari kasus tersebut.

Namun, menurut Liew, jika tidak ada lagi aset yang berhasil dipulihkan, pemerintah harus menanggung kerugian bersih sebesar RM 20,1 miliar akibat skandal tersebut.

"Jika tidak ada lagi pemulihan aset, pemerintah akan menyerap kerugian sebesar RM 20,1 miliar," ujar Liew di hadapan parlemen, Rabu (9/7).

Skandal 1MDB merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di dunia yang melibatkan dana investasi milik negara Malaysia. Kasus bernilai miliaran dolar AS itu memicu penyelidikan pidana di berbagai negara dan menyeret sejumlah pejabat serta pelaku bisnis.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang mendirikan 1MDB, telah menjalani hukuman penjara sejak 2022 setelah dinyatakan bersalah dalam perkara yang berkaitan dengan skandal tersebut.

Sementara itu, pengusaha Low Taek Jho atau Jho Low, yang diduga menjadi dalang utama skandal 1MDB, masih buron meski pemerintah Malaysia telah berulang kali berupaya memulangkannya ke negara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Liew juga membantah kabar bahwa Jho Low bersama delegasi dari China sempat memasuki Malaysia pada 2025 untuk merundingkan penyelesaian kasus tersebut.

Bank Sentral Malaysia (BNM) Pertahankan Suku Bunga Enam Kali Berturut-turut

Kamis, 9 Juli 2026 14:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-malaysia-bnm-pertahankan-suku-bunga-enam-kali-berturut-turut>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Bank sentral Malaysia alias Bank Negara Malaysia (BNM) mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil dalam pertemuan kebijakan keenam berturut-turut pada hari Kamis (9/7/2026).

Kebijakan ini sejalan seperti yang diharapkan para ekonom, di tengah inflasi moderat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Negara Malaysia mempertahankan suku bunga kebijakan semalam di level 2,75%, seperti yang telah diperkirakan oleh semua kecuali satu dari 31 ekonom yang disurvei dalam jajak pendapat Reuters.

"Fundamental ekonomi Malaysia yang kuat akan terus menopang ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal," kata BNM dalam sebuah pernyataan, seraya mengatakan bahwa bank sentral Malaysia tersebut memperkirakan data akan menunjukkan pertumbuhan kuartal kedua yang tangguh karena permintaan domestik dan ekspor yang lebih kuat dari perkiraan.

Ketidakpastian yang berkelanjutan seputar konflik Timur Tengah dan produksi komoditas yang lebih rendah dapat memengaruhi prospek, tetapi pengeluaran rumah tangga kemungkinan akan tetap didukung oleh kebijakan pemerintah, pertumbuhan lapangan kerja dan upah, serta aktivitas investasi yang berkelanjutan, kata BNM.

Lebih lanjut BNM bilang, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran perkiraan bank sentral antara 4% dan 5%, melambat dari pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025.

Produk domestik bruto (PDB) meningkat lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,4% pada kuartal pertama dibandingkan tahun sebelumnya karena permintaan domestik yang kuat mengimbangi guncangan yang timbul dari krisis Timur Tengah.

Inflasi utama dan inflasi inti rata-rata masing-masing sebesar 1,7% dan 2,1% pada lima bulan pertama tahun ini, secara umum sesuai dengan ekspektasi, kata BNM.

Harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan memberikan tekanan ke atas pada harga, tetapi dampaknya terhadap inflasi diproyeksikan tetap terkendali, tambahnya.

"Pada tingkat suku bunga acuan (OPR) saat ini, Komite Kebijakan Moneter (MPC) menganggap sikap kebijakan moneter sudah tepat dan konsisten dengan prospek stabilitas harga yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata BNM, merujuk pada komite kebijakan moneternya.

Mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan tidak akan ada perubahan pada suku bunga kebijakan untuk sisa tahun 2026, dengan hanya lima dari 29 yang memberikan perkiraan mengharapkan kenaikan 25 basis poin menjadi 3,00% pada akhir tahun. Perubahan terakhir pada suku bunga kebijakan adalah penurunan pada Juli 2025.

Wall Street Bergerak Fluktuatif Usai Serangan AS ke Iran

Kamis, 9 Juli 2026 06:00 WIB

Levin Stamm dan Natalia Kniazhevich

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/114395/wall-street-bergerak-fluktuatif-usai-serangan-as-ke-iran/2>

Bloomberg, Saham-saham Amerika Serikat hampir menghapus seluruh pelemahan pada awal perdagangan yang dipicu oleh kekhawatiran eskalasi perang antara AS dan Iran, yang mendorong kenaikan harga energi.

Indeks Nasdaq 100 yang didominasi saham teknologi ditutup naik 0,3%, sedangkan S&P 500 melemah 0,3%, memangkas penurunan yang sebelumnya sempat mencapai 1,1% dan menempatkannya di jalur untuk menguji rata-rata pergerakan (50-day moving average) selama 50 hari.

Sektor material, barang konsumsi non-primer (consumer discretionary), dan keuangan menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.

Saham-saham sektor energi AS menguat setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata sementara dengan Iran telah "berakhir" dan merupakan "buang-buang waktu." Pernyataan tersebut disampaikan tidak lama setelah AS melancarkan gelombang baru serangan terhadap Iran dan mencabut pengecualian (waiver) yang sebelumnya memungkinkan penjualan minyak Iran.

Harga minyak Brent naik 5,9%, mendorong penguatan saham-saham seperti Chevron Corp., Venture Global Inc., dan Diamondback Energy Inc.

"Untuk saat ini, kami menganggap ini sebagai pembalikan arah jangka pendek. Kami tidak memiliki informasi mengenai negosiasi yang berlangsung di balik layar, tetapi kami tetap berpandangan bahwa Presiden Trump berfokus mengakhiri konflik ini," tulis Kepala Strategi Ekuitas AS di Citigroup Global Markets Inc., Scott Chronert, dalam catatan riset pada Rabu.

"Namun, perubahan sentimen yang mendukung penguatan pasar secara lebih luas, terutama ketika saham-saham teknologi belakangan mulai kehilangan momentum, akan benar-benar diuji."

Sementara itu, ahli strategi pasar Ed Yardeni mengatakan runtuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran berisiko memicu percepatan baru inflasi, yang pada akhirnya dapat memaksa Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga.

Sejumlah pejabat The Fed dalam pertemuan kebijakan moneter terakhir mereka menyatakan terdapat alasan untuk menaikkan suku bunga, meskipun pada akhirnya mereka mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga tetap.

Secara lebih luas, risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 16–17 Juni yang dirilis Rabu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran para pembuat kebijakan terhadap inflasi, sementara kekhawatiran mengenai pasar tenaga kerja sedikit mereda.

Pasar saham AS belakangan diwarnai pergerakan yang sangat fluktuatif, seiring investor bergantian memanfaatkan penurunan harga (buy the dip) dan mengurangi risiko (de-risking), di tengah pertanyaan mengenai seberapa lama reli saham semikonduktor dan emiten yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) masih dapat berlanjut.

Kabar positif mengenai laba perusahaan diperkirakan akan menopang pasar, dengan para analis memperkirakan musim laporan keuangan kuartal II bagi perusahaan-perusahaan anggota S&P 500 akan berlangsung kuat.

Di antara pergerakan saham individual, saham Bloom Energy Corp. memperpanjang penurunannya setelah Hunterbrook Media melaporkan bahwa afiliasinya, Hunterbrook Capital, mengambil posisi short pada saham tersebut. Saham Alcoa Corp. dan Vale SA juga ditutup melemah setelah analis Morgan Stanley, Carlos de Alba, menurunkan rekomendasinya karena memperkirakan pasar logam akan mengalami surplus dan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, saham Dollar Tree Inc. menguat setelah analis di Raymond James dan Goldman Sachs menaikkan rekomendasi terhadap saham tersebut.

Saham DraftKings Inc. dan Flutter Entertainment Plc sempat melonjak ke level tertinggi intraday pada Rabu setelah Michael Burry—investor yang dikenal luas melalui buku dan film *The Big Short*—mengungkapkan dalam unggahan di Substack bahwa ia membeli saham kedua perusahaan tersebut.

Dalam perkembangan korporasi lainnya, Apple Inc., sebagai tindak lanjut atas komitmennya untuk meningkatkan belanja komponen buatan Amerika Serikat, mengatakan bahwa perluasan kerja samanya dengan Broadcom Inc. diperkirakan bernilai lebih dari US\$30 miliar.

Sementara itu, OpenAI dijadwalkan merilis model kecerdasan buatan paling canggihnya secara luas pada Kamis sekaligus memperluas akses pratinjau (preview) ke pasar global, menurut keterangan perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan antariksa Blue Origin LLC milik Jeff Bezos disebut tengah memulai putaran penggalangan dana eksternal pertamanya, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Langkah itu diambil untuk memanfaatkan antusiasme investor yang meningkat setelah penawaran umum perdana (IPO) bersejarah dari pesaing utamanya, SpaceX.

Rupiah Ditutup Rp18.084/US\$

Kamis, 9 Juli 2026 15:35 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114477/rupiah-ditutup-rp18-084-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup sesi perdagangan Kamis (9/7/2026) dengan pelemahan 0,47% ke level Rp18.084/US\$, sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang melemah, kala tekanan eksternal sudah sedikit terpankas.

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) sedikit melemah 0,07% ke 100,91 dari posisi sebelumnya 101,03. Sementara, minyak mentah brent kembali melunak dan turun 1,24% ke US\$77,05 per barel pada 15:01 WIB.

Tekanan harga minyak yang mereda membawa sebagian mata uang Asia menguat sore ini. Baht Thailand menguat paling tajam 0,17%, disusul yuan China, yen Jepang, yuan offshore, rupee India dan dolar Singapura serta dolar Hong Kong.

Sebaliknya, rupiah melemah bersama dolar Taiwan, won Korea Selatan, dan peso Filipina.

Pelemahan rupiah terjadi dipicu oleh berbagai sentimen domestik yang saling berkelindan.

Pertama, serangkaian indikator ekonomi semakin memperkuat persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kehilangan momentum. Pelemahan terlihat pada konsumsi rumah tangga, aktivitas manufaktur, hingga tingkat keyakinan konsumen yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Terbaru, Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia terbaru mengindikasikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kehilangan tenaga, dan menggambarkan bahwa konsumsi bukan cuma belum pulih, tetapi laju pelemahannya malahan semakin dalam.

Penjualan ritel pada April mengalami kontraksi 3,7% secara tahunan, lalu kembali turun 0,39% pada Mei, dan diperkirakan masih akan berlanjut pada Juni menjadi turun 4,4%.

Kedua, S&P Dow Jones Indices memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi reklasifikasi pasar pada 2027. Jika persoalan transparansi dan likuiditas pasar tidak segera dibenahi, pasar saham Indonesia berisiko diturunkan ke kategori special measures atau bahkan frontier market.

Ketiga, kenaikan yang kembali terjadi pada harga minyak mentah dunia kembali menghantui kondisi fiskal dan eksternal Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

Keempat, arus neraca pembayaran (balance of payments) Indonesia tercatat berada di posisi yang terlemah sejak 2013. Berbeda dengan 2013, penurunan neraca pembayaran dan indeks nilai tukar efektif rupiah selama 12 bulan terakhir didorong oleh faktor domestik, sehingga menurut UBS arus modal turun ke level terendah dalam hampir 20 tahun.

Di saat yang sama, investor banyak melepas kepemilikan mereka di pasar obligasi pemerintah. Dalam catatannya, UBS menilai selisih suku bunga Indonesia-AS yang rendah, membuat arus masuk ke pasar obligasi tetap terbatas sejak 2020.

"Arus modal lain yang sensitif terhadap suku bunga, seperti pinjaman dan simpanan, juga turun sekitar 1% terhadap PDB," sebut UBS dalam laporannya.

Berdasarkan data Bloomberg, yield obligasi pemerintah tenor pendek melonjak 13 bps hingga 7,4% pada sesi perdagangan siang tadi, dan melampaui tenor-tenor lainnya. Sore ini, yield tenor 1 tahun kembali memangkas kenaikannya 5,2 bps menjadi 7,32%, pada 15.20 WIB.

Di sisi lain, UBS menilai ketidakpastian kebijakan domestik, seperti nasionalisme sumber daya alam serta pengendalian ekspor dan devisa, turut memperparah kebocoran arus modal, misalnya melalui under-invoicing ekspor dan lemahnya arus investasi sektor swasta.

UBS memperkirakan pelemahan rupiah secara bertahap (slow-motion weakness) akan terus berlanjut, dengan proyeksi pergerakan di rentang Rp18.500-Rp19.000/US\$ pada semester II-2026.

Untuk diketahui, pada 15:25 WIB rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) masih melanjutkan pelemahan 0,21% ke posisi Rp18.155/US\$, setelah dibuka stagnan di level Rp18.117/US\$ tadi pagi.

Sektor-Sektor Riil Paling Rentan Terdampak Pelemahan Rupiah

Kamis, 9 Juli 2026 10:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114423/sektor-sektor-riil-paling-rentan-terdampak-pelemahan-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah diminta mewaspadai dampak pelemahan rupiah terhadap sektor-sektor riil di dalam negeri, khususnya pada sektor yang memiliki ketergantungan tinggi kepada bahan baku berbasis impor.

Menurut ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, setidaknya ada tiga karakteristik utama industri yang paling rentan mengalami tekanan bila keadaan depresiasi rupiah bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

"Sektor paling rentan ialah sektor dengan tiga ciri: kandungan impor tinggi, kemampuan menaikkan harga rendah, dan utang valas besar," kata Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, Kamis (9/7/2026).

Farmasi, kata dia akan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak besar karena masih bergantung pada impor bahan baku aktif. Disusul industri makanan dan minuman yang turut menghadapi risiko serupa jika memakai gandum, susu, gula tertentu, kedelai, bahan tambahan, atau kemasan impor.

Lebih lanjut, Syafruddin menuturkan tekanan serupa juga diperkirakan akan dirasakan oleh industri tekstil dan alas kaki yang masih mengandalkan bahan baku, pewarna, mesin, dan komponen impor. Begitu juga industri elektronik dan otomotif yang berpotensi mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya komponen impor, sementara permintaan konsumen cenderung melemah di tengah suku bunga yang tinggi.

"Industri kimia, plastik, dan baja juga rentan karena bergantung pada bahan antara global dan energi." Di samping itu, "sektor properti ikut tertekan secara tidak langsung karena suku bunga tinggi, biaya material naik, dan kemampuan beli rumah tangga melemah."

Di sisi lain, Syafruddin menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak berhenti pada biaya impor. Sebab kata dia, ketika rupiah melemah, perusahaan juga menghadapi risiko harga energi, biaya logistik, cicilan utang valas, dan kebutuhan lindung nilai (hedging) yang lebih mahal.

Akibatnya, banyak pelaku usaha menghadapi tekanan ganda karena biaya produksi meningkat sementara daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga.

"Dampaknya ke sektor riil akan terasa lewat margin laba yang menipis, kenaikan harga jual, penundaan ekspansi, dan risiko penurunan produksi jika perusahaan tidak mampu meneruskan kenaikan biaya ke konsumen. Dalam kondisi daya beli belum kuat, industri tidak bebas menaikkan harga. Akibatnya,

pelemahan rupiah berubah menjadi tekanan ganda: biaya naik, permintaan belum tentu mengikuti," jelasnya.

Kebijakan yang Tak Korbankan Sektor Riil

Meminimalkan dampak ini, pemerintah dan Bank Indonesia diminta perlu menjalankan kebijakan yang mampu menahan tekanan nilai tukar tanpa mengorbankan sektor riil.

"BI perlu menjaga daya tarik aset rupiah melalui operasi moneter, SRBI, intervensi valas yang terukur, dan komunikasi yang kredibel. Tetapi kenaikan bunga tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban karena BI Rate sudah 5,75% dan rupiah tetap tertekan," tegas Syafruddin.

Sementara dari sisi fiskal, pemerintah diminta menjaga disiplin anggaran, mengendalikan subsidi energi, mempercepat peningkatan ekspor bersih, serta menekan impor yang tidak produktif.

Sedangkan untuk menopang sektor riil, prioritas harus jatuh pada keringanan likuiditas bagi industri produktif, fasilitas lindung nilai yang lebih terjangkau, percepatan restitusi bagi eksportir patuh, penguatan rantai pasok domestik, hingga insentif terbatas untuk substitusi impor bahan.

"Kebijakan yang paling tepat bukan subsidi luas, melainkan dukungan selektif untuk perusahaan yang menjaga produksi, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan devisa. Jika fiskal, moneter, dan industri berjalan sendiri-sendiri, tekanan rupiah akan terus masuk ke harga, biaya produksi, dan kualitas kredit," pungkasnya.

Sebagai catatan saja, rupiah menutup sesi perdagangan Rabu (8/7/2026) dengan pelemahan terbatas 0,09% di posisi Rp17.999/US\$, setelah sempat menyentuh Rp18.002/US\$ pada sesi perdagangan siang kemarin

Kinerja APBN Semester I: Fiskal Terjaga, Ruang Pembiayaan Memadai

Kamis, 9 Juli 2026 15:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114466/kinerja-apbn-semester-i-fiskal-terjaga-ruang-pembiayaan-memadai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan baru saja melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) paruh pertama tahun ini kepada para wakil rakyat.

Hasilnya tak mengecewakan. Terbukti, defisit APBN tercatat hanya Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp204,2 triliun atau 0,84% terhadap PDB.

Angka defisit diperoleh dari nominal pendapatan negara yang lebih rendah dibanding belanja negara. Tercatat, pendapatan negara sampai semester I 2026 sebesar Rp1.459,4 triliun atau melonjak 21,4% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8%.

Menanggapi hal itu, sejumlah ekonom menilai realisasi APBN semester I-2026 yang mengalami defisit 0,76% terhadap PDB menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal pemerintah relatif terjaga dan masih berada dalam koridor yang kredibel.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menjelaskan kondisi ini mencerminkan ruang pembiayaan yang masih memadai, sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.

Dari sisi pasar keuangan, hal tersebut menjadi sentimen positif karena mengurangi kekhawatiran terhadap risiko pelebaran defisit maupun peningkatan utang pemerintah di tengah ketidakpastian global.

"Defisit fiskal yang rendah juga dipengaruhi oleh penerimaan negara yang masih cukup baik," ujar Rizal kepada Bloomberg Technoz, Kamis (9/7/2026).

Kendati demikian, Rizal menilai level defisit APBN juga mencerminkan realisasi belanja pemerintah yang belum sepenuhnya optimal, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jika belanja produktif, terutama belanja modal dan program yang memiliki efek pengganda terhadap ekonomi, masih tertahan, maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga berpotensi belum maksimal.

"Artinya, kualitas belanja negara pada semester II-2026 akan menjadi faktor kunci agar APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah," kata Rizal.

Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut defisit APBN semester I-2026 di bawah 1% memberi makna ekonomi bahwa posisi fiskal pemerintah masih relatif terkendali pada paruh pertama tahun.

Defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% PDB menunjukkan belanja negara belum menekan pembiayaan secara berlebihan dan masih jauh dari batas defisit 3% PDB.

Secara teknis, angka ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan belanja semester II-2026, termasuk subsidi energi, perlindungan sosial, dan program prioritas.

"Akan tetapi, angka semester I tidak boleh dibaca sebagai bukti APBN 2026 sudah aman sampai akhir tahun," tuturnya.

Dia berpandangan pola belanja pemerintah biasanya meningkat pada semester II-2026 sedangkan tekanan rupiah, harga minyak, yield, dan potensi shortfall pajak dapat memperbesar kebutuhan pembiayaan.

"Beberapa laporan juga mencatat defisit Mei 2026 sudah berada di Rp180,4 triliun atau 0,70% PDB, lalu melebar menjadi Rp196,5 triliun atau 0,76% PDB pada Juni, sehingga arah defisit tetap perlu diawasi," terang dia.

Sentimen Terhadap Rupiah

Lebih jauh Syafruddin menyebut defisit di bawah 1% dapat menjadi sentimen positif untuk rupiah dan ekonomi, tetapi pengaruhnya terbatas jika tidak didukung indikator lain.

Dia menilai pasar dapat membaca angka ini sebagai sinyal awal bahwa pemerintah masih menjaga disiplin fiskal, terutama saat rupiah bergerak di sekitar Rp18.077/US\$, credit default swap (CDS) 5 tahun berada di sekitar 91,776 bps, dan investor menuntut premi risiko lebih tinggi terhadap aset Indonesia.

Dia menyebut sentimen positif baru akan kuat jika pemerintah mampu menjelaskan kualitas belanja, rencana pembiayaan semester II-2026, pengendalian subsidi energi, dan strategi menjaga defisit akhir tahun tetap kredibel.

Syafruddin menerangkan, jika pasar melihat defisit rendah hanya akibat belanja yang tertunda, dampaknya ke rupiah kecil. Jika pasar melihat defisit rendah sebagai hasil disiplin fiskal, penerimaan yang sehat, dan pembiayaan yang terukur, rupiah dapat memperoleh dukungan psikologis.

“Jadi, angka 0,76% PDB memberi modal komunikasi yang baik, tetapi stabilitas rupiah tetap ditentukan oleh kombinasi fiskal yang kredibel, kebijakan BI yang tegas, harga minyak, arus modal, dan kepercayaan investor,” jelas dia.

Defisit hingga semester I-2026 disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang signifikan meningkat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan pendapatan negara hingga semester I-2026 sebesar Rp1.459,4 triliun, atau setara 46,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan negara ini mengalami pertumbuhan sebesar 21,4% year on year (yoy).

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak bea dan cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau setara 43,1% dari target pagu APBN. Realisasi ini juga naik 17,8% yoy.

Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp452 triliun atau sudah 65,6% dari target APBN 2026.

BI Lapor Kondisi Penjualan Ritel Mei-Juni, Ini Hasilnya

Kamis, 9 Juli 2026 10:21 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114432/bi-lapor-kondisi-penjualan-ritel-mei-juni-ini-hasilnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Penjualan Eceran terbaru. Pada Mei, penjualan eceran atau ritel mengalami kontraksi (tumbuh negatif) baik secara bulanan maupun eceran, dan situasi serupa diperkirakan juga terjadi pada Juni.

Pada Kamis (9/7/2026), BI mengumumkan penjualan ritel yang dicerminkan dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) periode Mei sebesar 223,4. Turun 3,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan lebih dalam ketimbang kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,7% yoy.

"Sejumlah kelompok masih mencatatkan pertumbuhan dan menjadi penopang pada periode laporan, antara lain Kelompok Suku Cadang dan Aksesoris (indeks 150,1, tumbuh 11,2% yoy); Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (indeks 107,0, tumbuh 0,3% yoy), serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (indeks 57,5, tumbuh 0,2% yoy). Sementara itu, kelompok lainnya diperkirakan masih berada dalam fase kontraksi terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (indeks 317,9, terkontraksi 4,1% yoy), Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi (indeks 68,7, terkontraksi 18,4% yoy), serta Subkelompok Sandang (indeks 79,1, terkontraksi 12% yoy)", papar laporan BI.

Secara bulanan (month-to-month/mtm), kinerja penjualan eceran pada Mei turun sebesar -1,5%. Meski turun, tetapi jauh membaik ketimbang bulan sebelumnya yang terkontraksi 11,6% mtm.

"Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi dan Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang masing-masing tumbuh 1% mtm dan 1,3% mtm, setelah pada April masing-masing tercatat sebesar -9,4% mtm dan 0,2% mtm. Selain itu, kelompok lainnya juga menunjukkan perbaikan yang tecermin dari kontraksi yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-

1,3% mtm), Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (-4,2%,mtm), dan Subkelompok Sandang (-11%, mtm). Perkembangan tersebut didorong oleh terjaganya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak," jelas laporan BI.

Untuk Juni, BI memperkirakan IPR berada di 221,6, turun 4,4% yoy. Berdasarkan kelompoknya, Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (indeks 145,5, tumbuh 11% yoy) serta Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (indeks 83,8, tumbuh 1,8% yoy) masih menunjukkan kinerja yang positif.

Di sisi lain, beberapa kelompok diperkirakan masuk ke dalam zona kontraksi adalah Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (indeks 56,4, terkontraksi 8,5% yoy) serta Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (indeks 103,5, terkontraksi 7,8% yoy), setelah pada periode sebelumnya masing-masing tumbuh sebesar 0,2% yoy dan 0,3% yoy.

Secara bulanan, kinerja penjualan eceran pada Juni juga diproyeksikan turun 0,8%. Lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang turun sebesar 1,5% mtm.

"Perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja penjualan pada Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (1,9%, mtm) dan Subkelompok Sandang (4,7%, mtm) seiring mulai masuknya periode liburan sekolah pada akhir Juni. Sementara itu, Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (-2% mtm), Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (-3,1% mtm), serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-0,7% mtm) mengalami perbaikan dari periode sebelumnya meski masih tertahan di zona kontraksi," demikian lapornya BI.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Agustus diperkirakan meningkat, sementara pada November diperkirakan relatif stabil. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus sebesar 178, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH pada Juli sebesar 175,8, didorong oleh kenaikan harga bahan baku.

Sementara itu, IEH November diperkirakan sebesar 167,5, relatif stabil dibandingkan dengan IEH Oktober sebesar 167,6.

Insentif Pajak PFII Diharapkan Selaras Standar Global demi Tarik Investor

Kamis, 9 Juli 2026 18:30 WIB

Reporter: Noverius Laoli, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/insentif-pajak-pfii-diharapkan-selaras-standar-global-demi-tarik-investor>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengingatkan agar berbagai insentif perpajakan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tetap selaras dengan standar perpajakan internasional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus menghindari potensi persoalan perpajakan di tingkat internasional.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, kebijakan perpajakan dalam PFII perlu disusun sejalan dengan berbagai komitmen internasional, seperti OECD/G20 Inclusive Framework, Global Minimum Tax (Pillar Two), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta Automatic Exchange of Information (AEOI).

Dengan demikian, Indonesia dapat membangun pusat finansial internasional yang kompetitif tanpa mengorbankan kredibilitas di mata investor global.

"Indonesia perlu membangun pusat finansial internasional yang kompetitif, namun tetap menjaga kredibilitas di mata komunitas internasional. Kebijakan perpajakan yang tidak selaras dengan standar global justru berpotensi mengurangi daya tarik investasi dalam jangka panjang," ujar Vaudy dalam siaran pers, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara yang berhasil mengembangkan pusat finansial internasional tetap menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan perkembangan aturan global.

Karena itu, Indonesia perlu menghindari kebijakan yang berpotensi memicu persaingan pajak yang tidak sehat maupun membuka celah penghindaran pajak lintas negara.

Selain itu, harmonisasi dengan standar internasional juga dinilai akan memberikan kepastian hukum bagi investor multinasional yang kini semakin mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan global dalam mengambil keputusan investasi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Umum IKPI Novalina Magdalena menilai penerapan standar internasional tidak mengurangi kedaulatan Indonesia dalam menyusun kebijakan perpajakan.

Justru, penyelarasan tersebut diperlukan agar berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan memiliki kepastian hukum dan diakui dalam praktik perpajakan internasional.

Ia menambahkan, harmonisasi juga penting untuk mencegah praktik profit shifting, treaty shopping, maupun penyalahgunaan fasilitas perpajakan yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai economic substance, beneficial ownership, serta ketentuan anti-penghindaran pajak dinilai perlu menjadi bagian integral dalam RUU PFII.

IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Stabil pada 2026 Saat Dunia Melambat

Kamis, 9 Juli 2026 13:47 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/imf-proyeksikan-ekonomi-indonesia-stabil-pada-2026-saat-dunia-melambat>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027, di tengah perlambatan yang dialami sejumlah negara di kawasan Asia maupun ekonomi besar dunia.

Dalam pembaruan World Economic Outlook (WEO) Juli 2026, IMF tidak mengubah proyeksi Indonesia dibandingkan perkiraan yang dirilis pada April 2026.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang proyeksinya tetap, ketika sejumlah negara lain mengalami perlambatan pertumbuhan.

Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7% pada 2026, melambat dari realisasi 5,2% pada 2025.

Sementara Filipina diperkirakan hanya tumbuh 3,9%, turun cukup tajam dibandingkan 4,4% pada 2025.

Thailand juga diproyeksikan melambat menjadi 1,9% dari 2,4% pada tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara besar Asia, perlambatan juga terjadi di China yang diproyeksikan tumbuh 4,6% pada 2026, turun dari 5,0% pada 2025.

India masih menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, tetapi lajunya diperkirakan melambat dari 7,7% menjadi 6,4%.

Fenomena serupa juga terlihat di negara maju. Amerika Serikat diperkirakan tumbuh 2,3%, relatif membaik dari 2025 sebesar 2,1%, namun masih jauh di bawah laju pertumbuhan Indonesia.

Selain mempertahankan proyeksi Indonesia, IMF juga tidak mengubah perkiraan pertumbuhan untuk Malaysia, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, Rusia, dan Italia dibandingkan proyeksi April 2026.

Sebaliknya, IMF memangkas proyeksi sejumlah negara, seperti Filipina, India, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Turki, dan Arab Saudi.

APBN Tertekan Subsidi Energi: Pemerintah Harus Berani Lakukan Ini!

Kamis, 9 Juli 2026 13:34 WIB

Reporter: Arif Ferdianto, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/apbn-tertekan-subsidi-energi-pemerintah-harus-berani-lakukan-ini>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah dinilai tidak akan menjadi tren bullish jangka panjang hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Trading Economics, harga minyak mentah melonjak hingga 7% menjadi US\$75,6 per barel pada hari Rabu (8/7/2026), seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo memperkirakan kenaikan harga komoditas energi tersebut hanya bersifat temporer karena dinamika pasar global belaka.

Ia menilai, kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini merupakan respons pasar dari beberapa kejadian yang kebetulan berlangsung bersamaan di skala global.

"Menurut saya ini tren sementara. Secara umum sudah pada posisi menuju harga normal sebelum perang. Ini hanyalah dinamika di mana beberapa accident saling terjadi, namun bukan skala penuh," tuturnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/7/2026).

Hadi meyakini ketegangan di kawasan Timur Tengah tersebut tidak akan berlangsung lama dan harga minyak dunia akan segera kembali menemukan titik keseimbangan barunya dalam waktu dekat.

"Menurut saya, keadaan tidak berlanjut. Bulan Juni rata rata ICP sekitar US\$ 88/bbl, dan bulan Juli walau ada riak riak spot kenaikan, sifatnya sementara dan menuju angka kesetimbangan sebelum perang," jelasnya.

Meski fluktuasi harga diperkirakan mereda, Hadi mengingatkan bahwa beban fiskal dalam negeri sebenarnya sudah dalam kondisi tertekan akibat alokasi belanja untuk kompensasi dan subsidi energi yang sangat besar.

"Tanpa ada spot kenaikan pun APBN sudah defisit, subsidi energi juga membengkak. Sehingga Pemerintah harus mulai serius re-visit APBN untuk menghapus program-program yang bukan prioritas," tegasnya.

Untuk mengerem pembengkakan defisit anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), IATMI menyarankan pemerintah untuk segera mempercepat implementasi diversifikasi energi ke sektor non-minyak secara masif di masyarakat.

"Mulai menggalakkan kembali program konversi BBM ke Gas, LPG ke Gas, BBM ke Listrik," tambah Hadi.

Di sisi lain, momentum kenaikan harga minyak ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berjalan paralel antara pemenuhan energi fosil saat ini dengan akselerasi program transisi energi yang berkelanjutan.

"Agenda transisi energi yang berbasis gas (pembangunan massive infrastruktur gas), berjalan beriringan dengan kegiatan memperkuat ketahanan energi dengan mengamankan pasokan Crude, BBM dan LPG dalam jangka pendek, dengan menambah cadangan energi yang cukup dengan mengamankan cargo import dan pembangunan/penyewaan infrastrukturnya," pungkasnya.

ADB Pertahanan Proyeksi Ekonomi Indonesia, Saat Negara Tetangga Dipangkas

Kamis, 9 Juli 2026 13:32 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/adb-pertahanan-proyeksi-ekonomi-indonesia-saat-negara-tetangga-dipangkas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonominya di tengah gelombang revisi turun yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) terhadap sejumlah negara di kawasan.

Dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) edisi Juli 2026, ADB tetap memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada 2026, tidak berubah dibandingkan perkiraan pada April lalu.

Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara tetangga yang justru mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan.

Kamboja misalnya, proyeksi pertumbuhan ekonominya dipangkas menjadi 4,1% dari proyeksi sebelumnya 4,5%. Kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina dipangkas dari 4,4% menjadi 3,8%.

Di tingkat kawasan, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang Asia dan Pasifik menjadi 4,9% pada 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi April sebesar 5,1%.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ASEAN turun tipis menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,6%.

Meski demikian, Indonesia tetap diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia berkembang maupun ASEAN.

Di ASEAN, laju pertumbuhan Indonesia hanya berada di bawah Vietnam yang diproyeksikan tumbuh 7,2% pada 2026.

Kepala Ekonom ADB Albert Park menilai bahwa pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik disebabkan oleh ekslasi konflik serta ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan.

"Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik masih tetap tangguh, tapi gangguan berkepanjangan akibat konflik memerlukan keseimbangan kebijakan yang hati-hati antara mendukung pertumbuhan dengan menjaga inflasi," ujar Albert Park dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, kedua kondisi tersebut dapat makin memperketat pasar energi, meningkatkan premium risiko, serta memperparah inflasi dan tekanan eksternal.

Kondisi keuangan global yang makin ketat membawa berbagai risiko tambahan, yaitu kenaikan imbal hasil obligasi negara dan biaya pinjaman, serta membesarnya proyeksi defisit fiskal di sejumlah perekonomian.

Tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan juga dapat menekan kegiatan ekonomi, sedangkan kenaikan harga pupuk terus mengancam produksi pertanian dan ketahanan pangan.

Realisasi PNBP Melonjak, Pemerintah Optimistis Target 2026 Terlampaui

Kamis, 9 Juli 2026 13:13 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pnbp-melonjak-pemerintah-optimistis-target-2026-terlampaui>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2026 akan melampaui target APBN.

Dalam outlook APBN 2026, proyeksi PNBP dinaikkan menjadi Rp 575,1 triliun atau setara 125,2% dari target awal Rp 459,2 triliun, didorong kuatnya realisasi penerimaan pada semester I-2026.

Hingga akhir semester I-2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp 271 triliun atau sekitar 59% dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 21,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan penerimaan tersebut didukung oleh masih terjaganya harga sejumlah komoditas strategis.

"Ini berasal dari terjaganya harga beberapa komoditas strategis," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2026).

Purbaya menjelaskan, kenaikan PNBP terutama berasal dari membaiknya penerimaan sumber daya alam (SDA), PNBP kementerian/lembaga (K/L), serta Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan SDA migas terdongkrak kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), peningkatan lifting migas, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara itu, PNBP SDA nonmigas meningkat berkat penguatan harga sejumlah mineral seperti nikel, tembaga, emas, dan perak.

Di sisi lain, penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) mengalami penurunan karena dividen BUMN perbankan kini tidak lagi disetorkan ke kas negara, melainkan dialihkan ke BPI Danantara.

Meski demikian, penurunan tersebut tertutupi oleh meningkatnya PNBP K/L dan BLU yang didorong kenaikan pendapatan layanan pemerintah, penegakan hukum, layanan kesehatan, serta ekspor CPO dan produk turunannya.

Ekonom BTN Myrdal Gunarto menilai, kenaikan outlook PNBPN menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbesar penerimaan negara di luar sektor perpajakan.

Menurutnya, peningkatan itu ditopang oleh kinerja BLU, sektor komoditas, serta membaiknya penerimaan bea dan cukai di tengah tidak adanya lagi kontribusi dividen BUMN.

Meski prospeknya positif, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurrahman mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung pada tingginya harga komoditas.

Dengan harga batubara, nikel, dan CPO yang mulai kembali normal serta permintaan global yang melemah, peningkatan PNBPN ke depan perlu ditopang oleh kenaikan produksi, optimalisasi lifting migas, penguatan kinerja BLU, dan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengarahkan strategi PNBPN pada penguatan kualitas sumber penerimaan yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar kenaikan target nominal setiap tahun.

Pemkot Salatiga dan Bank Jateng Perkuat Kolaborasi Percepat Digitalisasi dan Tingkatkan PAD

Kamis, 9 Juli 2026

Penulis: Kontributor Kota Salatiga, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-salatiga-dan-bank-jateng-perkuat-kolaborasi-percepat-digitalisasi-dan-tingkatkan-pad/>

SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat transformasi digital sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, menerima audiensi jajaran Direksi Bank Jateng di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (7/7/2026).

Audiensi membahas sejumlah program strategis, mulai dari perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kolaborasi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kota Salatiga.

Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, menegaskan, digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Pemkot Salatiga terus mendorong perluasan pembayaran nontunai pada berbagai sektor penerimaan daerah, seperti parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui elektronifikasi transaksi, masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan, sementara pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Kami ingin pelayanan publik semakin sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Robby.

Ia menambahkan, Pemkot Salatiga juga tengah menyiapkan strategi jempit bola hingga tingkat kelurahan agar masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak secara digital. Di sisi lain, digitalisasi pada sektor hotel, restoran, dan hiburan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola perpajakan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Selain itu, Robby berharap Bank Jateng dapat terus menjadi mitra strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, khususnya melalui perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk skema penjaminan kredit. Ia juga mengajak Bank Jateng mendukung berbagai program Dewan Kerajinan

Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Salatiga dalam pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, menyampaikan komitmen Bank Jateng untuk terus mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Salatiga.

Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pembayaran elektronik, pengembangan ekosistem digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga peluang kolaborasi dalam mendukung kegiatan Dekranasda.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Kota Salatiga dan Bank Jateng, diharapkan transformasi digital di berbagai sektor dapat berjalan lebih cepat, kualitas pelayanan publik semakin meningkat, daya saing UMKM semakin kuat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Salatiga.

Magelang Fair 2026 Jadi Ajang Penguatan UMKM dan Penggerak Ekonomi Daerah

Kamis, 9 Juli 2026

Penulis: Prokompim, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/magelang-fair-2026-jadi-ajang-penguatan-umkm-dan-penggerak-ekonomi-daerah/>

KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang kembali menggelar Magelang Fair 2026 sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan keberadaan event menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM karena mampu menghadirkan pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi.

“UMKM ditopang oleh event. Tanpa event yang terstruktur, UMKM tidak bisa tumbuh. Karena itu, Kota Magelang terus berupaya menciptakan berbagai event yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Damar saat membuka Magelang Fair 2026 di Alun-alun Kota Magelang, Rabu (8/7/2026) malam.

Magelang Fair tahun ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, business matching, hingga fasilitasi pembiayaan usaha melalui kerja sama dengan sektor perbankan.

Menurut Damar, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus membuka lapangan kerja.

Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang saat ini mencapai sekitar 5,96 persen atau berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

“Saya berharap Magelang Fair menjadi tempat bertemunya pelaku usaha dengan investor, kreativitas dengan pasar, serta melahirkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah, mengatakan Magelang Fair 2026 diikuti sekitar 120 stan yang diisi oleh organisasi perangkat

daerah (OPD) Kota Magelang, kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pelaku UMKM, perguruan tinggi, serta peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

“Magelang Fair menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus memperluas jejaring usaha dan kolaborasi antarpelaku ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Magelang,” ujarnya.

Berbagai kegiatan turut meramaikan Magelang Fair 2026, di antaranya pameran nasional produk unggulan daerah, pameran UMKM, industri, pendidikan, dan startup. Selain itu, tersedia pelayanan publik, Magelang Food Festival, pentas seni budaya, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan, temu usaha Koperasi Desa Merah Putih, program UMKM Cerdas Digital, hingga sosialisasi program dari kementerian dan lembaga yang terlibat.

Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat

Kamis, 9 Juli 2026

Penulis Budi Aris

<https://radioidola.com/2026/ranperda-perlindungan-tenaga-kerja-informal-jateng-perlu-dipercepat/>

Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah mendorong DPRD, agar melakukan percepatan penyusunan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal di provinsi ini.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan dengan aturan itu, maka pekerja informal memiliki payung hukum mengenai baik dalam perlindungan kinerja, jaminan sosial dan lainnya. Hal itu dikatakan saat ditemui di gedung DPRD Jateng, kemarin.

Luthfi menjelaskan, pendataan jumlah pekerja informal di Jateng juga perlu dilakukan.

Dengan adanya data tersebut, memudahkan untuk memberikan bantuan hukum, bantuan akses modal, hingga bantuan terkait kesejahteraan lain agar tepat sasaran.

“(Raperda) ini harus segera dibahas dan diselesaikan, sehingga kita punya payung hukum. Kalau ada datanya lebih gampang nanti untuk intervensi bantuan,” kata Luthfi

Sementara Anggota Komisi E DPRD Jateng Ja’far Shodiq menyatakan, pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Tenaga kerja informal memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal,” ucapnya. (Bud)

Pemkab Kudus catat penyerapan APBD selama semester I 2026 capai Rp927,81 miliar

Kamis, 9 Juli 2026 16:25 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/637904/pemkab-kudus-catat-penyerapan-apbd-selama-semester-i-2026-capai-rp92781-miliar>

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyerapan APBD Tahun 2026 selama periode Januari-Juni 2026 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.

"Meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai target awal di semester awal ini, tetapi indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Kamis.

Pasalnya, kata dia, ada beberapa pekerjaan fisik yang pengerjaannya dibiayai secara total hingga jadi oleh pihak ketiga. Setelah pekerjaan selesai 100 persen, baru mengajukan tagihan kepada Pemkab Kudus.

Selain itu, imbuh dia, ada pula pekerjaan fisik yang pencairan anggarannya berdasarkan termin, sesuai realisasi pekerjaan fisiknya. Sehingga, dari sisi penyerapan APBD belum terlihat maksimal karena masih menunggu pihak ketiga.

"Kami pastikan semua proyek kegiatan sudah jalan. Kalaupun ada yang terlambat kami monitor untuk dilakukan percepatan agar semua bisa selesai di bulan Oktober atau November 2026," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga membentuk desk percepatan penyerapan anggaran dengan melibatkan Asisten II Setda Kudus untuk memonitor ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah mengungkapkan realisasi penyerapan APBD hingga semester pertama tahun 2026 sebesar Rp927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.

Berdasarkan data realisasi belanja per OPD, sejumlah perangkat daerah telah mencatatkan penyerapan anggaran bervariasi. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja daerah seiring pelaksanaan berbagai program pelayanan publik.

Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus dari anggaran sebesar Rp673,25 miliar, terserap sebesar Rp302,6 miliar atau 44,95 persen. Sedangkan RSUD Kudus dari anggaran Rp413,1 miliar terserap sebesar Rp112,57 miliar atau 27,25 persen.

Kemudian disusul Dinas Kesehatan Kudus dari anggaran Rp229 miliar terserap Rp106,78 miliar atau 46,63 persen. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran di OPD lainnya bervariasi antara ratusan juta hingga puluhan miliar.

Dari sisi persentase, tertinggi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai 75,82 persen atau Rp37,47 miliar dari total anggaran sebesar Rp49,42 miliar.

Pemkab Kudus terus mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh OPD agar serapan anggaran semakin optimal pada semester kedua tahun anggaran 2026. Percepatan penyerapan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.